

Buku Profil **KELUARGA INDONESIA** **TAHUN 2023**



Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Direktorat Pelaporan dan Statistik
2024



Buku Profil Keluarga Indonesia Tahun 2023

KATA SAMBUTAN

Pemutakhiran Pendataan Keluarga menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan program Pembangunan lainnya di Indonesia. Basis Data Keluarga Indonesia hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga diharapkan dapat menyediakan data dan informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya serta memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan dan dapat menjawab kebutuhan data dan informasi keluarga untuk kepentingan penyusunan program dukungan maupun intervensi oleh pemerintah dan mengakomodasi kebutuhan sektor lain, khususnya dalam upaya mendukung pembangunan kualitas manusia Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PP No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, bahwa kebutuhan akan data dan informasi yang berkaitan dengan parameter kependudukan dalam Program Bangga Kencana di semua tingkatan wilayah merupakan hal yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas informasi.

Saya mengharapkan buku Profil Keluarga tahun 2023 ini bermanfaat bagi pengguna data terutama sebagai masukan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan Program Bangga Kencana maupun program pembangunan terkait lainnya serta dapat memenuhi kebutuhan dalam mengeksplorasi data dan untuk keperluan analisa lanjut. Semoga Tuhan Yang Maha Esa tetap memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam upaya membangun keluarga Indonesia yang berkualitas.

Jakarta, April 2024
Deputi Bidang Advokasi,
Penggerakan, dan Informasi



Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd



KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan buku Profil Keluarga Indonesia Tahun 2023 ini. Buku Profil Keluarga Indonesia Tahun 2023 ini sebagai media penyajian serta penyebarluasan data dan informasi yang telah dikumpulkan dan diolah selama pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023.

Buku Profil Keluarga Indonesia berisi gambaran keluarga secara lengkap berdasarkan indikator kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang telah dimutakhirkan. Data hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga sebagai sumber data dan informasi pelaksanaannya diharapkan benar-benar dapat menghasilkan data dan informasi yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga serta memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan.

Akhirnya kepada semua pihak, terutama tim kerja yang telah menyusun dan memberikan masukan, saran dan koreksi hingga selesaiannya buku Profil Keluarga Tahun 2023 ini, kami mengucapkan terima kasih. Saran serta kritik sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas buku Profil Keluarga di tahun berikutnya yang dapat disampaikan melalui Direktorat Pelaporan dan Statistik, email ppdatastunting@gmail.com. Buku ini juga kami sediakan dalam bentuk softcopy yang dapat diunduh pada <https://cis.bkkbn.go.id/adpin/Ditlaptik>.

Jakarta, April 2024
Direktur Pelaporan dan Statistik

Lina Widyastuti, SKM, MAPS

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Lina Widyastuti, SKM, MAPS
(Direktur Pelaporan dan Statistik)

Editor:

Lina Widyastuti, SKM, MAPS

Penyusun:

Anisty Hayanti, S.Si, M.Si
Ristya Ira Murti, SE, MAPS
Vina Alistiana, S.Sos
Fauziah Ajeng Aryanti, SKM

Analisis Data:

Istiqomatal Fajriyah Yuliati, S.Si, M.Si

Manajemen Data:

Nindi Widyakirono, Amd
Tim PPDS

Kontributor:

Didik Trihantoro, S.Si, MAPS; Zulkipli Lubis, SE; SE, MAPS; Ira Fitriyani Rachmat, S. Sos; Olyanti A, SKM; Titik Puspa Dewi, SE; Riza Puspitasari, S. Kom; lis Yuliani, S. Kom; Husnul Wahyu Mahmudah, S. Stat; Isa AL Anshori, A.Md, Ak.; Tri Maryati, S.Pd; Eko Prasetyo, S.Kom; Anggar Lingga Rhomadona, S.Kom

Design Layout:

Wahyu Hamdani

Naskah:

Direktorat Pelaporan dan Statistik

Direktorat Pelaporan dan Statistik
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
2023

AKRONIM

BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
KB	Keluarga Berencana
KIE	Komunikasi Informasi Edukasi
KK	Kepala Keluarga
MKJP	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
NIK	Nomor Induk Kependudukan
PBI	Penerima Bantuan Iuran
PD-KB	Perangkat Daerah Keluarga Berencana
PLKB	Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PK	Pendataan Keluarga
PKB	Penyuluhan Keluarga Berencana
PLN	Perusahaan Listrik Nasional
PP	Peraturan Pemerintah
PT	Perguruan Tinggi
PUP	Pendewasaan Usia Perkawinan
PUS	Pasangan Usia Subur
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
SIGA	Sistem Informasi Keluarga
SD	Sekolah Dasar
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
UKP	Usia Kawin Pertama

DAFTAR ISI

- iii Kata Sambutan**
 - v Kata Pengantar**
 - vi Tim Penyusun**
 - vii Akronim**
 - viii Daftar Isi**
 - x Daftar Gambar**
 - xi Daftar Grafik**
-

1 Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Sasaran
- 1.4 Ruang Lingkup

7 Bab II Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023

- 2.1 Tentang Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023
- 2.2 Indikator Dan Variabel
- 2.3 Pengumpulan Dan Pengolahan Data
- 2.4 Evaluasi Kualitas Data Pemutakhiran PK-23
- 2.5 Cakupan Pemutakhiran Pk-23 Dan Basis Data Keluarga Indonesia

27 Bab III Keluarga Menurut Karakteristik Demografi

- 3.1 Jumlah Keluarga
- 3.2 Karakteristik Kepala Keluarga

37 Bab IV Keluarga Menurut Indikator Pelayanan KB

- 4.1 Karakteristik PUS
- 4.2 Status Kehamilan
- 4.3 Kesertaan Ber-KB

47 Bab V Keluarga Menurut Indikator

Pembangunan Keluarga

5.1 Indikator Pembangunan Keluarga Sejahtera

5.1.1 Dimensi Ketentraman

5.1.2 Dimensi Kemandirian

5.1.3 Dimensi Kebahagiaan

5.2 Indikator Rumah Layak Huni

5.3 Keluarga Terpapar Program Bangga Kencana

62

BAB VI Penutup

6.1 Kesimpulan

6.2 Rekomendasi

67

Lampiran

Keluarga Menurut Karakteristik Demografi berdasarkan Provinsi

Keluarga Menurut Indikator Pelayanan KB berdasarkan Provinsi

Keluarga Menurut Indikator Pembangunan Keluarga berdasarkan

Provinsi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Pendataan Keluarga.....	3
Gambar 2.1 Perkembangan Pendataan Keluarga.....	9
Gambar 2.2 Regulasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.....	13
Gambar 2.3 Regulasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	14
Gambar 2.4 Pengorganisasian Lapangan.....	15
Gambar 2.5 Struktur Tim Manajemen Data.....	16
Gambar 2.6 Panduan dan Pedoman.....	16
Gambar 2.7 Tenaga Pelaksana Pemutakhiran PK-23.....	19
Gambar 2.8 Proses Pengolahan Data Pemutakhiran PK-23.....	20
Gambar 2.9 Evaluasi Kualitas Data Umur Pemutakhiran PK-23.....	22
Gambar 2.10 Hasil Perhitungan United Nation Index, Whipple Index, dan Myer Index.....	24
Gambar 2.11 Cakupan Pemutakhiran PK-23.....	24
Gambar 2.12 Cakupan Basis Data Keluarga Indonesia.....	25
Gambar 3.1 Provinsi dengan Persentase KK di bawah Usia 19 Tahun Berdasarkan Provinsi, 2023.....	30
Gambar 3.2 Persentase Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin di Indonesia, 2023	30
Gambar 3.3 Persentase Kepala Keluarga Bekerja, 2023.....	33
Gambar 3.4 Persentase Jiwa dalam Keluarga Berdasarkan Kesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional, 2023.....	33
Gambar 4.1 Sebaran PUS menurut Wilayah.....	38
Gambar 4.2 Persentase PUS Menurut Kelompok Umur, 2023.....	39
Gambar 4.3 Distribusi PUS Berdasarkan Kelompok Umur < 20 tahun, 2023.....	39
Gambar 4.4 Persentase PUS Berdasarkan UKP Perempuan, 2023.....	40
Gambar 4.5 Distribusi PUS dengan UKP Perempuan < 19 tahun, 2023.....	40
Gambar 4.6 Distribusi Persentase PUS dengan Jumlah ALH, AMH, dan Anak Ideal Lebih Dari 2 Anak Tertinggi, 2023.....	41
Gambar 4.7 Persentase PUS Hamil 4 Terlalu, 2023.....	42
Gambar 4.8 PUS Berdasarkan Kesertaan ber-KB di Indonesia, 2023.....	43
Gambar 5.1 Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Atap Rumah.....	54
Gambar 5.2 Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Dinding Rumah	54
Gambar 5.3 Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Lantai Rumah Terluas.....	55
Gambar 5.4 Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Sumber Air Minum Utama.....	56
Gambar 5.5 Persentase Keluarga Berdasarkan Kepemilikan Rumah/ Bangunan Tempat Tinggal.....	57

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Jumlah Keluarga Tertinggi Menurut Provinsi di Indonesia, 2023.....	29
Grafik 3.2 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur.....	29
Grafik 3.3 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur di Indonesia, 2023.....	30
Grafik 3.4 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin Per Provinsi di Indonesia, 2023.....	31
Grafik 3.5 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Indonesia, 2023.....	32
Grafik 3.6 Kepala Keluarga dengan Tingkat Pendidikan, 2023.....	32
Grafik 3.7 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Indonesia, 2023.....	33
Grafik 3.8 Persentase Jaminan Kesehatan terhadap Individu per Provinsi, 2023.....	34
Grafik 4.1 Persentase PUS Berdasarkan ALH, AMH, dan Anak Ideal, 2023.....	41
Grafik 4.2 Persentasi PUS Hamil Berdasarkan Keinginan Kehamilan.....	42
Grafik 4.3 PUS Peserta KB Modern Berdasarkan Metode Kontrasepsi, 2023.....	44
Grafik 4.4 PUS Peserta KB Modern Berdasarkan Provinsi, 2023.....	44
Grafik 4.5 PUS Peserta KB MKJP dan Non MKJP Berdasarkan Provinsi, 2023.....	45
Grafik 5.1 Persentase Konflik Dalam Keluarga, 2023.....	50
Grafik 5.2 Persentase Keluarga Terpapar Pesan/Informasi Bangga Kencana Melalui Media, 2023.....	57
Grafik 5.3 Persentase Keluarga terpapar pesan/informasi Bangga Kencana melalui Petugas.....	58

BAB I

Pendahuluan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga melalui upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan kematian, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat.

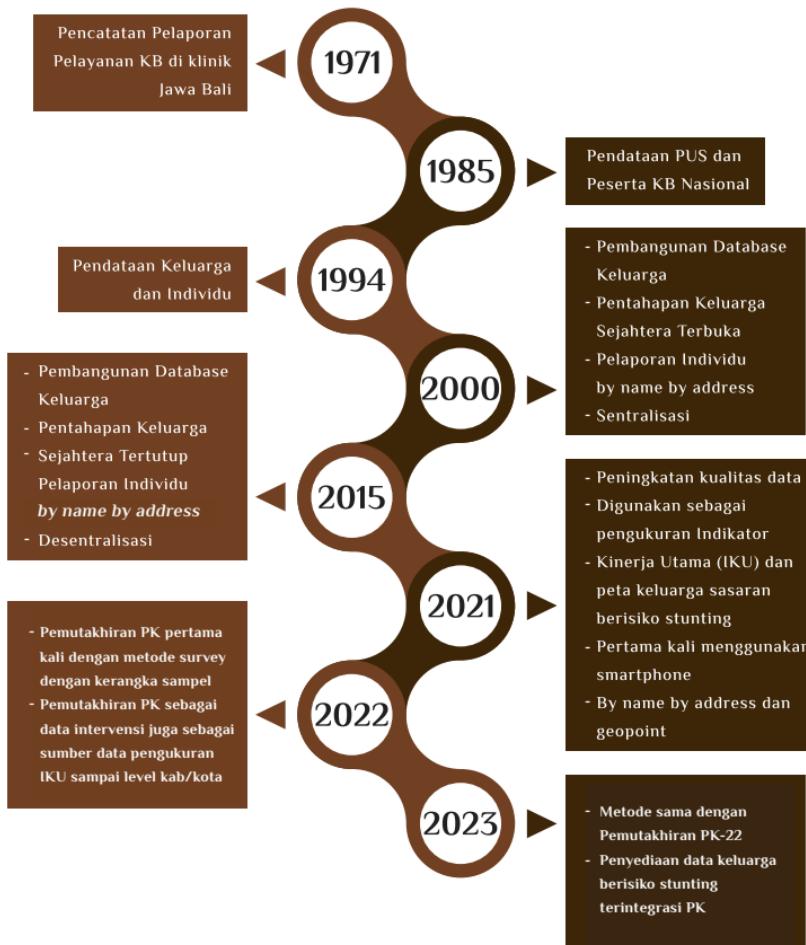


Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibentuk dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam melaksanakan tugas pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana, BKKBN mempunyai fungsi perumusan kebijakan nasional; penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria; pelaksanaan advokasi dan koordinasi; penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi; penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; serta pembinaan, bimbingan dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga tersebut, sesuai dengan pasal 49 sampai dengan pasal 52 UU No 52 Tahun 2009, harus berdasarkan data dan informasi kependudukan dan keluarga sehingga pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga melalui penyelenggaraan dan pengembangan sistem informasi kependudukan dan keluarga secara berkelanjutan.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada lampiran N menekankan bahwa sub urusan Keluarga Berencana salah satunya adalah pengelolaan dan pengendalian Sistem Informasi Keluarga. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga lebih lanjut diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 63 BAB IV Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga yang menekankan bahwa penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga bertujuan untuk menyediakan data dan informasi keluarga yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan pembangunan lain yang diperoleh melalui pendataan keluarga yang dilakukan secara serentak setiap 5 (lima) tahun.

Pendataan Keluarga telah dilaksanakan lima kali sejak pertama dilakukan pada tahun 1971 :



Gambar 1.1 Perkembangan Pendataan Keluarga

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, Pendataan Keluarga yang dilaksanakan sekali dalam 5 tahun kemudian dilakukan pemutakhiran setiap tahunnya. Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia adalah kegiatan untuk memutakhirkan dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbarui, mencatat mutasi dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam BDKI melalui kunjungan rumah ke rumah dengan cara wawancara dan atau observasi kepala keluarga, yang dilakukan secara serentak pada waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan Instruksi Presiden (inpres) No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem point 27 tertuang bahwa Kepala BKKBN untuk (a) menyiapkan hasil pendataan keluarga untuk penetapan kebijakan

dalam intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem termasuk penurunan *stunting*; (b) menyiapkan dan memberikan pelayanan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, serta intervensi percepatan penurunan *stunting* kepada keluarga miskin ekstrem.

Salah satu keunggulan dari data Pendataan Keluarga maupun hasil pemutakhirannya adalah data tersebut merekam data keluarga serta individu di dalam keluarga sampai *by name by address* (BNBA) sehingga penggunaannya sebagai data pensasaran dan dimanfaatkan sebagai peta operasional Program Bangga Kencana maupun Program pembangunan lain berbasis keluarga. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan data dan informasi keluarga secara luas, maka diperlukan penyajian serta penyebarluasan hasil pengumpulan dan pengolahan data dan informasi keluarga ke dalam berbagai saluran atau media publikasi data terhadap hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 salah satunya melalui buku Profil Keluarga Indonesia.

1.2 Tujuan



Tujuan Umum

Memberikan gambaran secara menyeluruh tentang karakteristik keluarga hasil Pemutakhiran PK-23 yang dimanfaatkan untuk perencanaan, intervensi, evaluasi hingga pengukuran kinerja sasaran strategis program Bangga Kencana maupun program pembangunan terkait lainnya yang berbasis keluarga.

Tujuan Khusus

1. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Pemutakhiran PK-23;
2. Memberikan gambaran mengenai cakupan hasil Pemutakhiran PK-23;
3. Memberikan gambaran mengenai karakteristik keluarga Indonesia menurut indikator kependudukan;
4. Memberikan gambaran mengenai karakteristik keluarga Indonesia menurut indikator Keluarga Berencana;
5. Memberikan gambaran mengenai karakteristik keluarga Indonesia menurut indikator Pembangunan Keluarga ;

1.3 Sasaran

Sasaran pengguna Buku Profil Keluarga Indonesia hasil Pemutakhiran PK-23 adalah pengelola Program Bangga Kencana di semua tingkatan wilayah, Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sampai dengan desa/kelurahan, Perangkat Daerah kabupaten dan Kota serta *stakeholder* dan mitra kerja baik akademisi, pihak swasta, maupun organisasi profesi dan lainnya.

1.4 Ruang Lingkup

Profil Keluarga Indonesia Tahun 2023 meliputi karakteristik keluarga secara nasional sampai dengan tingkat provinsi yang memuat informasi tentang keluarga dan individu anggota keluarga di setiap wilayah yang didata menurut karakteristik kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

BAB

II

Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023

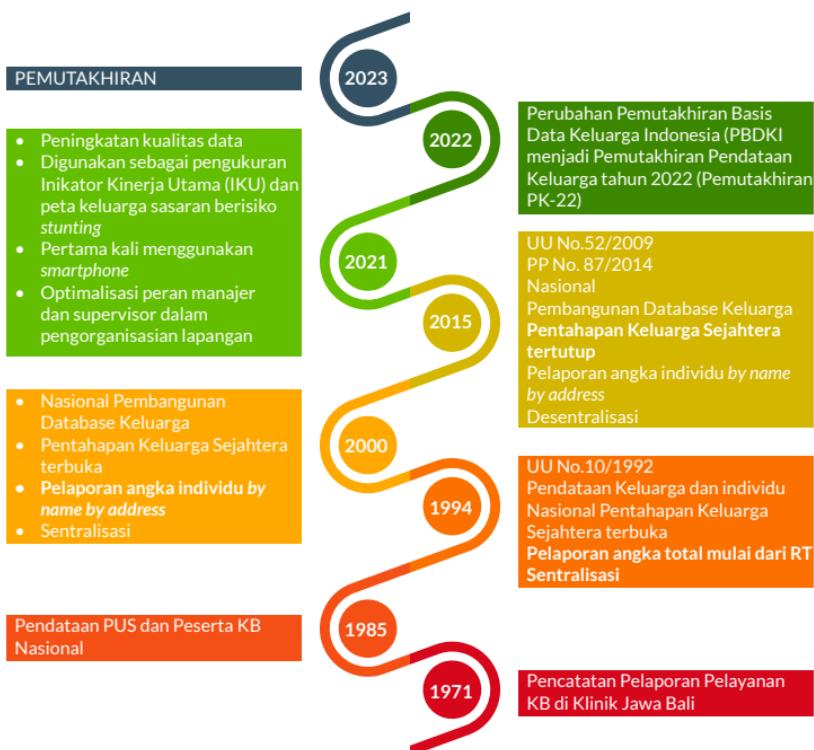
BAB II. PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA 2023

Pendataan Keluarga telah dilaksanakan lima kali sejak tahun 1971 sebagai periode awal digalakkannya Program Keluarga Berencana dan terus megalami perubahan sebagai upaya peningkatan cakupan dan kualitas data. Perkembangan tersebut secara ringkas dijelaskan sebagai berikut :

- **1971**, dilakukannya pencatatan pelaporan pelayanan KB di klinik yang dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali;
- **1985**, pendataan secara nasional dilangsungkan pertama dengan mendata Pasangan Usia Subur (PUS) dan peserta KB;
- **1994**, pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Inilah awal mula individu dan keluarga Indonesia didata secara terpusat dengan skala nasional. Pendataan ini mengukur tahapan keluarga sejahtera secara terbuka dimulai dari tingkat rukun tetangga;
- **2000**, pendataan serupa dengan pendataan sebelumnya dengan penekanan pada pembangunan data basis keluarga dan data individu berdasarkan nama dan alamat (*by name, by address*);
- **2015**, pendataan keluarga dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan beberapa penyesuaian antara lain perubahan pada variabel yang dikumpulkan dan perubahan pada mekanisme di lapangan yaitu pelaksanaan pendataan dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dengan update data setiap tahun melalui Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia;
- **2021**, pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 49, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi kependudukan dan keluarga melalui sensus, survei dan pendataan keluarga, sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan dan pembangunan, serta dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Pasal 53 bahwa Pendataan Keluarga wajib dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga. Pendataan Keluarga dalam rangka penyediaan data dan informasi keluarga sebagai dasar pembangunan Sistem informasi Keluarga (SIGA). Data PK tahun 2021 selain sebagai peta operasional/peta intervensi di lapangan juga digunakan untuk

mengukur indikator kinerha utama (IKU) Program bangga Kencana dan peta sasaran keluarga berisiko *stunting*. Dari aspek pelaksanaannya, pertama kali pengumpulan data dengan metode smartphone dan optimalisasi peran kader, supervisor serta manajer pada pengorganisasi lapangan.

- **2022**, pemutakhiran pertama terhadap hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021, mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 50 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi kependudukan dan keluarga secara berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya data dan informasi yang diperlukan dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Pasal 53, bahwa hasil Pendataan Keluarga wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun.
- **2023**, pemutakhiran terhadap hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 dan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022. Data hasil Pemutakhiran PK-23 saat ini telah banyak diminati dan dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi/perguruan tinggi, swasta serta mitra kerja lainnya, di antaranya sebagai data pensasaran program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022) dan Percepatan Penurunan *Stunting* (peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021). Dalam rangka menjaga kualitas data serta urgensi keberlanjutan pemenuhan kebutuhan data pensasaran tersebut, maka pemutakhiran data PK21 dan Pemutakhiran PK-22 menjadi mutlak dilakukan.



Gambar 2.1 Perkembangan Pendataan Keluarga

2.1 Tentang Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023



Definisi

Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 (Pemutakhiran PK-23) adalah kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam basis data keluarga Indonesia hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) dan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 (Pemutakhiran PK-22) dengan cara mewawancara dan atau mengobservasi keluarga melalui kunjungan rumah ke rumah.

Sasaran

Pemutakhiran PK-23 dilaksanakan serentak pada tanggal **1 sampai dengan 31 Juli 2023** pada masing-masing kabupaten/kota di seluruh provinsi dengan didahului pra pelaksanaan tanggal **20 sampai dengan 30 Juni 2023** dengan sasaran untuk mendata keluarga dan keluarga khusus yang menjadi target pendataan.



Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: suami istri, atau; suami istri dan anaknya, atau; ayah dan anak, atau; ibu dan anak (Definisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009).



Keluarga Khusus adalah keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan keluarga sesama anggotanya, misalnya kakak dan adik tanpa orang tua, seorang kakek/nenek dan cucunya atau seorang diri. Anggota keluarga lain dapat didata pada tipe keluarga khusus dengan kode hubungan dengan kepala keluarga lainnya dengan syarat memiliki hubungan kekeluargaan, tidak memiliki orang tua kandung dan berstatus tidak kawin. Keluarga didata tidak berdasarkan kepemilikan administrasi kependudukan di wilayah tersebut, namun berdasarkan di mana keluarga berada saat pendataan dengan syarat :

- 1) Keluarga telah tinggal di wilayah tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
- 2) Jika kurang dari 6 (enam) bulan maka dipastikan keluarga tersebut berencana menetap di wilayah tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
- 3) Satu formulir Pemutakhiran PK-23 hanya boleh terdapat 1 pasangan menikah, jika memiliki istri/suami lebih dari 1 maka dicatat pada formulir terpisah.

Lokus

- Pemutakhiran PK-23 dilaksanakan pada desa/kelurahan sampel yang terpilih berdasarkan kerangka sampel dan target keluarga yang telah ditentukan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan teknik *two stage stratified sampling*.
- Pemutakhiran PK-23 pada wilayah sampel ditujukan agar hasil pemutakhiran PK-23 dapat menggambarkan populasi sehingga Pemutakhiran PK-23 dapat menyediakan data untuk perhitungan indikator kinerja Program Bangga Kencana.
- Desa/kelurahan Prioritas adalah desa/kelurahan yang terpilih sesuai arah kebijakan pelaksanaan Pemutakhiran PK-23 yaitu peningkatan cakupan dan perbaikan kualitas data basis keluarga, sehingga dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria sebagai berikut :
 - 1) Desa/kelurahan belum terdata pada PK21 dan Pemutakhiran PK-22
 - 2) Desa/kelurahan dengan cakupan keluarga terdata pada PK21 dan Pemutakhiran PK-22 rendah
 - 3) Desa/kelurahan yang bukan termasuk dalam lokus PK-22.

- Target KK sasaran pada desa/kelurahan prioritas menyesuaikan ketersediaan sumber daya untuk memenuhi target KK masing-masing provinsi. Dari sasaran keluarga berdasarkan arah kebijakan maka dilakukan penajaman sasaran target KK didata yaitu:
 - 1) Keluarga belum terdata baik keluarga baru maupun keluarga tidak terdata pada PK21 dan Pemutakhiran PK-22.
 - 2) Keluarga memiliki anak usia 0-4 tahun (baduta/balita)
 - 3) Memperbarui/ memutakhirkan/ meng-update data keluarga berdasarkan observasi pada *listing*, memenuhi
 - Keluarga sasaran berisiko *stunting* (ibu hamil/memiliki baduta atau balita), memiliki rumah tidak layak huni dan lingkungan tidak sehat (sanitasi dan air bersih layak)
 - Keluarga layak menerima fasilitasi bantuan sosial



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 NOMOR 97/KEP/G4/2023
 TENTANG
 PENETAPAN WILAYAH PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA
 TAHUN 2023

- Lokus pemutakhiran PK-23 ditetapkan melalui Keputusan Kepala BKKBN Nomor 97/KEP/G4/2023 tentang Penetapan wilayah Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023.

Manfaat

1. Peta Sasaran
 - a) Penentuan sasaran yang lebih tajam berdasarkan kondisi, potensi dan kebutuhan aktual dari masing-masing keluarga yang ada di setiap tingkatan wilayah
 - b) Pemutakhiran peta keluarga berdasarkan indikator strategis
2. Program, Dukungan, Sarana, dan Motivasi
 - a) Penentuan program dukungan yang sesuai untuk setiap keluarga dan wilayah
 - b) Peningkatan kualitas kesertaan ber-KB untuk penggunaan metode kontrasepsi yang lebih efektif, aman dan nyaman
 - c) Data pensasaran upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan *stunting*
 - d) Sarana motivasi untuk mendorong setiap keluarga mengikuti kelompok kegiatan (poktan) Bagi keluarga yang memiliki sasaran pembinaan
3. Program Pembangunan lainnya

Pemanfaatan hasil pemutakhiran PK-23 untuk kepentingan pembangunan keluarga melalui keterlibatan sektor lain seperti Program Penerima Bantuan Pangan, Program Bantuan Subsidi Perumahan dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dan lainnya.

Urgensi Pemutakhiran PK-23

- **Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem** sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 yang menetapkan data Pendataan Keluarga serta pemutakhirannya sebagai sumber data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.



Gambar 2.2 Regulasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Intervensi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara tepat sasaran dilakukan kementerian/Lembaga melalui kebijakan strategi dalam pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Khusus Kepala BKKBN, sesuai instruksi Presiden 1) menyiapkan hasil Pendataan Keluarga untuk penetapan kebijakan dalam intervensi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem termasuk penurunan *stunting*; 2) menyiapkan dan memberikan pelayanan program Bangga Kencana serta intervensi percepatan penurunan *stunting* kepada keluarga miskin ekstrem.

- **Percepatan Penurunan *Stunting***, BKKBN diberikan mandat oleh Presiden sebagai ketua pelaksana dalam menyiapkan perumusan rencana aksi nasional, melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan antar kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa serta pemangku kepentingan, melakukan koordinasi peningkatan kapasitas, kerja sama dan kemitraan serta menyiapkan dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

percepatan penurunan *stunting*. Sebagaimana amanat Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* serta Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (RAN PASTI) 2021-2024, bahwa salah satu kegiatan prioritas dalam RAN PASTI adalah penyediaan data sasaran keluarga berisiko *stunting* yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga dan pemutakhirannya. Penyediaan data keluarga berisiko *stunting* dimaksudkan untuk menyediakan data operasional/data intervensi melalui penapisan terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) 4 Terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak) serta penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih yang layak. Data keluarga berisiko *stunting* akan digunakan sebagai data pensasar *by name by address* dalam melakukan pendampingan keluarga sasaran (keluarga memiliki baduta (0-23 bulan), balita (23-59 bulan), PUS dan PUS hamil).



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1398, 2021

BKKBN. Percepatan. Penurunan. Angka *Stunting*.
Indonesia. Tahun 2021-2024.

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL
PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA *STUNTING* INDONESIA
TAHUN 2021-2024



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Gambar 2.3 Regulasi Percepatan Penurunan *Stunting*

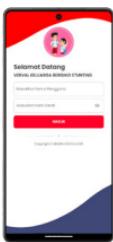
Tools Pengumpulan Data

Salah satu upaya peningkatan kualitas data, Pemutakhiran PK-23 dilakukan dengan menggunakan *smartphone* (80%), kecuali pada daerah dengan kondisi geografis khusus, keterbatasan koneksi, dan keterbatasan sumber daya kader pendata (spesifikasi *smartphone* tidak mendukung); maka pendataan di daerah tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir (20%).

Pada Pemutakhiran PK-23 terdapat provinsi yang melakukan pengumpulan data 100% menggunakan smartphone yaitu provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Riau, Jambi, Lampung, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Banten, Kep.Bangka Belitung, dan Gorontalo.



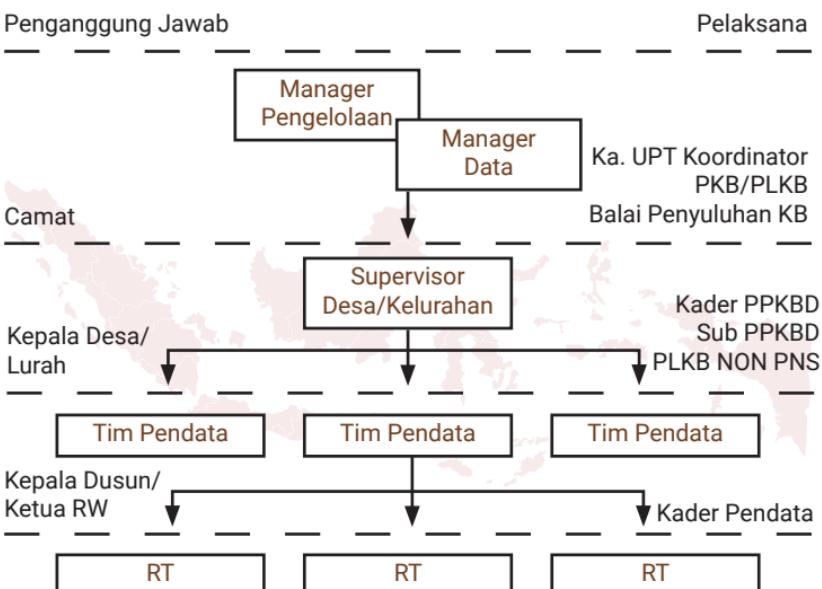
- 2 Kader Pendata melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kertas formulir F/I/Pemutakhiran-PK/23;
- Terdapat dua jenis formulir yang digunakan yaitu : formulir cetak output (formulir dengan data) dan formulir kosong/ tanpa data;
- Pengolahan data dilakukan di tingkat kecamatan, dalam hal ini dapat memanfaatkan Balai Penyuluhan KB.



- Kader melakukan pengumpulan data dan input ke dalam aplikasi PWA menggunakan *smartphone*;
- Data akan masuk ke server regional untuk dilihat ketepatan pengisian dan kebenaran datanya oleh manajer data kecamatan;
- Data dapat masuk ke server pusat dengan persetujuan manajer pengelolaan kecamatan;
- Metode *smartphone* digunakan untuk pengumpulan, penginputan dan perekaman data keluarga dan anggota keluarga pada desa/kelurahan terpilih sample BPS.

Pengorganisasian Lapangan

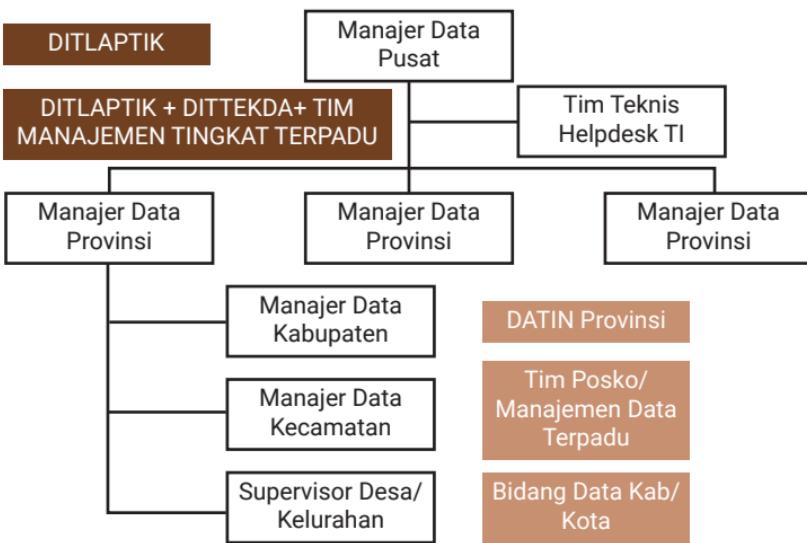
Pelaksanaan Pemutakhiran PK-23 tidak lepas dari komitmen pimpinan baik pusat dan daerah, peran pengelola data dan informasi tingkat pusat sampai dengan kecamatan, petugas lini lapangan yang terdiri dari manajer pengelolaan dan manajer data tingkat kecamatan, supervisor tingkat desa, dan kader pendata terlatih yang berasal dari lingkungan RT/RW dimana keluarga tinggal di tingkat RT/RW.



Gambar 2.4 Pengorganisasian Lapangan

Struktur Manajemen Data

Dalam rangka memastikan pelaksanaan manajemen data Pemutakhiran PK-23 (pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, dan pemberian umpan balik) berjalan dengan baik, maka diterapkan alur manajemen data secara berjenjang dimulai dari tingkat desa/kelurahan hingga di tingkat pusat. Pada pelaksanaan Pemutakhiran PK-23, struktur manajemen data sama dengan PK21 dan Pemutakhiran PK-22 yaitu pelibatan tugas dan fungsi tim posko/tim manajemen data terpadu/helpdesk dalam mengatasi kendala pelaksanaan Pemutakhiran PK-23 di lapangan.



Gambar 2.5 Struktur Tim Manajemen Data

Panduan Dan Pedoman

Sebagai acuan/referensi bagi para pengelola data dan informasi baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan manajemen Pemutakhiran PK-23 dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan (pengumpulan dan pengolahan data), mekanisme pembayaran hingga pemantauan dan evaluasi, maka disusun pedoman dan panduan sesuai dengan tugas, fungsi dan peran pelaksana pengorganisasian lapangan.



Gambar 2.6 Panduan dan Pedoman

2.2 Indikator Dan Variabel

Indikator Kependudukan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 87 Pasal 46 ayat (2), disebutkan bahwa data demografi paling sedikit meliputi data rumah tangga, data kepala keluarga menurut status perkawinan, data anggota keluarga menurut jenis kelamin dan data kelompok umur; sehingga dirumuskan indikator kependudukan pada Pemutakhiran PK-23 meliputi:

Nomor Anggota Keluarga	Nama Anggota Keluarga Dan Nik	Jenis Kelamin
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir	Status Perkawinan	Usia Kawin Pertama
Kepemilikan Akte Lahir	Hubungan Dengan Kepala Keluarga	Kode Ibu Kandung
Agama	Jenis Pekerjaan	Status Pekerjaan
Pendidikan	Kepesertaan JKN/Asuransi Kesehatan Lainnya	Mutasi Anggota Lainnya

Indikator Keluarga Berencana

Berdasarkan PP 87 Pasal 46 ayat (3), Data Keluarga Berencana paling sedikit meliputi jumlah pasangan usia subur, jumlah pasangan usia subur yang sedang menjadi peserta KB, dan jumlah pasangan usia subur yang tidak menjadi peserta KB; sehingga dirumuskan indikator KB pada Pemutakhiran PK-23 meliputi :

Frekuensi Melahirkan	Jumlah Anak Ideal	Status Kehamilan
Keinginan Punya Anak	Penggunaan Alat/Obat/Cara KB	Status penggunaan alat/obat/cara KB
Lama Penggunaan Alat/Obat/Cara KB	Alasan Utama Tidak Pakai KB atau Putus Pakai KB	Jenis Alat/Obat/Cara KB Yang Dipakai Saat Ini Atau Terakhir Dia Pakai
Sumber Mendapatkan Pelayanan Alat/Obat/Cara KB Terakhir	Jenis Informasi Metode KB Yang Didapatkan Ditempat Pelayanan KB	

Indikator Pembangunan Keluarga

Berdasarkan PP 87 pasal 46 ayat (4), data keluarga sejahtera berdasarkan indikator keluarga sejahtera dengan variabel paling sedikit meliputi agama, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kepesertaan dalam program KB, tabungan, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan, informasi dan peranan dalam masyarakat; sehingga dirumuskan indikator Pembangunan Keluarga pada Pemutakhiran PK-23 meliputi :

Anggota Keluarga Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntutan Agama Atau Kepercayaan Yang Dianut	Keluarga Memiliki Buku/Akte Nikah Yang Sah	Konflik Antar Keluarga Selama 6 Bulan Terakhir
Anggota Keluarga Memiliki Sumber Penghasilan Untuk Kebutuhan Pokok Perbulan Selama 6 Bulan Terakhir	Setiap Anggota Keluarga Makan Makanan Beragam Paling Sedikit 2 Kali Sehari Dalam 6 Bulan Terakhir	Keluarga Memiliki Aset
Anggota Keluarga Memiliki Penyakit Kronis Selama 1 Bulan Terakhir	Terdapat Anggota Disabilitas	Anggota Keluarga Mengakses Informasi Dari Internet Selama 6 Bulan Terakhir
Anggota Keluarga Memiliki Waktu Berinteraksi Setiap Hari Selama 6 Bulan Terakhir	Pengasuhan Anak Dilakukan Bersama Suami Istri Selama 6 Bulan Terakhir	Keluarga Pernah Berekreasi Bersama Di Luar Rumah Selama 6 Bulan Terakhir
Keluarga Ikut Serta Dalam Kegiatan Sosial/Gotong Royong Di Lingkungan RT Selamat 6 Bulan Terakhir	Jenis dan Kondisi Atap Rumah Terluas	Jenis dan Kondisi Dinding Rumah Terluar
Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Luas Rumah/Bangunan Keseluruhan	Orang Yang Tinggal dan Menetap Dirumah /Bangunan
Bahan Bakar Utama Memasak	Status Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tingga	Jenis dan Kondisi Dinding Rumah Terluar
Jenis Media Informasi	Keluarga Pernah Memperoleh/Mendengar, Melihat/ Membaca Pesan Informasi Program Bangga Kencana dan Stunting	Petugas Yang Memberikan Informasi Program Bangga Kencana Dan Stunting
Jenis dan kondisi lantai terluas	Sumber penerangan utama	Sumber air minum utama

2.3 Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Pengumpulan Data

Pemutakhiran PK-23 dilakukan dengan mengumpulkan data primer keluarga terkait data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga

serta data individu anggota keluarga yang dilakukan oleh kader pendata/masyarakat secara serentak pada waktu yang telah ditentukan. Pemutakhiran PK-23 dilaksanakan serentak pada tanggal **1 sampai dengan 31 Juli 2023** pada masing-masing kabupaten/kota di seluruh provinsi dengan didahului **pra pelaksanaan** tanggal **20 sampai dengan 30 Juni 2023**. Pemutakhiran PK-23 dilakukan dengan metode survei pada lokus wilayah tertentu baik wilayah sampel maupun prioritas pendataan, kecuali Provinsi DKI Jakarta, karena DKI Jakarta menggunakan metode pengumpulan data melalui CARIK Jakarta.

Tenaga pelaksana Pemutakhiran PK-23 meliputi kader pendata di tingkat RT/RW, supervisor di tingkat desa/kelurahan, manajer data dan manajer pengelolaan di tingkat kecamatan.



Gambar 2.7 Tenaga Pelaksana Pemutakhiran PK-23

Pengumpulan data Pemutakhiran PK-23 dilakukan dengan 2 (dua) tools yaitu:

1) Pengumpulan Data menggunakan Formulir F/I/Pemutakhiran-PK/23 (*paperbased*)

Kader mendata menggunakan formulir F/I/Pemutakhiran-PK/23, kemudian Pengolahan data dilakukan di tingkat kecamatan dengan memanfaatkan Balai Penyuluhan. Pengumpulan data dengan menggunakan formulir (*paperbased*) hanya dilakukan di sebagian kecil wilayah terutama untuk wilayah yang tidak memiliki akses jaringan maupun tidak tersedianya sarana *smartphone* maupun SDM kader pendata yang kurang mampu mengoperasikan aplikasi *smartphone*.

2) Pengumpulan Data dengan Menggunakan Smartphone

Kader mendata menggunakan aplikasi berbasis *smartphone* (PWA). Pengumpulan data dengan menggunakan *smartphone* dilakukan di sebagian besar wilayah. Provinsi yang berkomitmen melakukan Pemutakhiran PK-23 metode *smartphone* sepenuhnya (100%) adalah Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa Tengah, Banten, Bali, DI Yogyakarta, NTB, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

Pengolahan Data Pendataan Keluarga

Setelah periode pengumpulan data ditutup terhadap keseluruhan proses entri data maka selanjutnya dilakukan pengolahan data di tingkat pusat untuk menghasilkan data yang bersih, valid dan sesuai fakta di lapangan. Proses Pengolahan data yang terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Persiapan
- 2) *Coding, Editing-validasi*
- 3) Pengolahan
- 4) Diseminasi Hasil Pemutakhiran PK-23
- 5) Penyajian Data: Tabulasi Output

Kegiatan	Agustus		Agustus
Proses	<input checked="" type="checkbox"/>		</> <i>Coding, editing, cleansing</i>
Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan panduan (<i>editing</i> dan <i>coding</i>, tabulasi serta validitas) analisis dataset keluarga dan anggota cakupan 80 persen Penetapan <i>rule cleansing</i>: data missing, tidak wajar, tidak valid dan pemadaman keluarga penyusunan rancangan 59 tabel output indikator 	Batas pengumpulan data s.d 15 Agustus	<ul style="list-style-type: none"> <i>Cleansing</i> sesuai <i>rule data missing</i>, data tidak wajar, dan data tidak valid Pemadaman keluarga hasil pemutakhiran PK23 dengan padanan Pemutakhiran PK22 melalui KKI dan atau NIK KK: <ul style="list-style-type: none"> <i>matching</i> - data keluarga dimutakhirkan tidak <i>matching</i> - keluarga baru atau tidak dimutakhirkan
Output	Panduan <i>rule cleansing</i> dan pemadaman keluarga		Golden data
Pelaksana	DITLAPTIK		DITLAPTIK, DITTEKDA, Pengembang
September -Oktober	November	Desember	
Pengolahan	 <ul style="list-style-type: none"> Implementasi golden data ke dalam tabulasi Analisis kualitas data Analisis konsistensi data Diseminasi hasil Pemutakhiran PK23 - Oktober minggu ke-4 	 Diseminasi hasil Pemutakhiran PK-23 <ul style="list-style-type: none"> Asistensi dan transfer knowledge perhitungan penimbangan dan SE dengan BPS Penyiapan dataset sampel - pengolahan IKU BKKBN Metadata IKU BKKBN 2023 Pengukuran IKU BKKBN 2023 Diseminasi hasil pengukuran IKU BKKBN 2023 November minggu ke-4 	 Penyajian output tabulasi data <ul style="list-style-type: none"> Penyiapan dataset sampel pengolahan IKK BKKBN Metadata IKK BKKBN 2023 Pengukuran IKK BKKBN 2023 Diseminasi hasil pengukuran IKK BKKBN Desember minggu ke-4
59 Tabel indikator		Hasil pengukuran IKU BKKBN 2023	Hasil pengukuran IKK BKKBN 2023
DITLAPTIK, Pengembang	DITLAPTIK, DITRENDUK		DITLAPTIK

Gambar 2.8 Proses Pengolahan Data Pemutakhiran PK-23

Gambar 2.8 menjelaskan proses pengolahan data Pemutakhiran PK-23 yang dimulai tahap sebagai berikut :

- 1) Persiapan**, dilaksanakan pada bulan Agustus 2023, dengan *output* adalah Panduan, Rule Cleansing dan Pemadanan Keluarga meliputi kegiatan:
 - Penyusunan panduan (*editing* dan *coding*, tabulasi, serta validitas)
 - Analisis dataset keluarga dan anggota cakupan 80 persen
 - Penetapan *rule cleansing*: struktur data, validasi data, data *missing*, tidak wajar, tidak valid, dan pemadanan keluarga
 - Penyusunan rancangan 59 tabel *output* indikatorPelaksana kegiatan adalah Direktorat Pelaporan dan Statistik
 - Penetapan *rule* pemadanan keluargaPelaksana adalah Direktorat Pelaporan dan Statistik
- 2) Cleansing-Coding dan Editing**, dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 dengan *output* adalah *golden data*, meliputi kegiatan:
 - *Cleansing* sesuai *rule data missing*, data tidak wajar, dan data tidak valid
 - Pemadanan keluarga hasil Pemutakhiran PK2-3 dengan padanan Pemutakhiran PK-22 melalui KKI dan atau NIK KKPelaksana kegiatan adalah Direktorat Pelaporan dan Statistik, Direktorat Teknologi Informasi dan Data serta Pengembang Aplikasi.
- 3) Pengolahan**, dilaksanakan pada bulan September - Oktober 2023, *output* adalah 59 tabel indikator, meliputi kegiatan:
 - Implementasi *golden data* ke dalam tabulasi
 - Analisis kualitas data
 - Analisis konsistensi data
 - Diseminasi hasil Pemutakhiran PK-23 pada Oktober minggu ke-4Pelaksana adalah Direktorat Pelaporan dan Statistik bersama Pengembang Aplikasi.
- 4) Diseminasi Hasil Pemutakhiran PK-23**, dilaksanakan pada bulan November 2023, *output* adalah hasil pengukuran IKU BKKBN 2023, meliputi kegiatan:
 - Asistensi dan *transfer knowledge* perhitungan penimbang dan SE dengan BPS
 - Penyiapan dataset sampel – pengolahan IKU BKKBN
 - Metadata IKU BKKBN 2023
 - Pengukuran IKU BKKBN 2023
 - Diseminasi hasil pengukuran IKU BKKBN 2023 pada bulan November minggu ke-4Pelaksana adalah Direktorat Pelaporan dan Statistik bersama Direktorat
- 5) Penyajian data:** Tabulasi Output, dilaksanakan bulan Desember 2023 dengan *output* hasil pengukuran IKK BKKBN 2023, meliputi kegiatan:
 - Penyiapan dataset sampel – pengolahan IKK BKKBN
 - Metadata IKK BKKBN 2023
 - Pengukuran IKK BKKBN 2023
 - Diseminasi hasil pengukuran IKK BKKBN 2023 pada bulan Desember minggu ke-4Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Pelaporan dan Statistik

2.4 Evaluasi Kualitas Data Pemutakhiran PK-23



Pemutakhiran PK-23 dalam proses pengumpulannya memungkinkan terjadi kesalahan pencatatan dan pelaporan data. Kesalahan umum yang biasanya terjadi adalah kesalahan data umur anggota keluarga. Kurang tepatnya pelaporan umur atau tidak melaporkan umur dengan benar disebabkan anggota keluarga tersebut tidak mengetahui tanggal kelahirannya atau

umurnya, sehingga pelaporan umurnya hanya berdasarkan perkiraan sendiri atau perkiraan Kader Pendata.

Pada Pemutakhiran PK-23, untuk memperoleh keterangan umur yang lebih baik dilakukan dengan pengisian tanggal, bulan dan tahun lahir anggota keluarga. Selain itu, untuk anggota keluarga yang tidak tahu tanggal kelahirannya, tetap diupayakan memperoleh keterangan tentang tanggal, bulan, dan tahun lahir dengan menghubungkan peristiwa penting setempat atau nasional, atau bisa juga waktu kelahiran anak pertamanya. Namun demikian, walaupun telah dilakukan berbagai cara untuk memperoleh keterangan tentang tanggal, bulan, dan tahun lahir, data anggota keluarga menurut umur dalam Pemutakhiran PK-23 masih memungkinkan tidak terlepas dari kesalahan dalam pelaporan. Untuk melihat kualitas data umur dan jenis kelamin, dilakukan evaluasi kualitas data umur hasil Pemutakhiran PK-23 dengan menggunakan *United nation Index*, *Whipple Index*, dan *Myer Index*.

	UNITED NATION INDEX	WHIPPLE INDEX	MYER INDEX
Tujuan	Untuk melihat tingkat keakurasiyan umur dan jenis kelamin	Untuk mengukur kecenderungan keluarga melaporkan umur yang berakhir 0 atau 5	Untuk mengukur kecenderungan pelaporan umur berakhir 1 sampai 9, sehingga dapat dievaluasi digit mana yang paling diminati (dijadikan preferensi) dan juga digit yang paling dihindari
Ketentuan	Jika nilai <i>united nation index</i> <20 berarti data umur dan jenis kelamin tersebut akurat	Jika nilai <i>whipple index</i> = 100 berarti tidak ada kecenderungan untuk menyebutkan umur pada angka tertentu	Jika <i>myer index</i> <100 berarti pencatatan dan pelaporan umur dapat dikatakan baik
Hasil	13,59 (AKURAT)	100,00 (SANGAT AKURAT)	1,33 (BAIK)

Gambar 2.9. Evaluasi Kualitas Data Umur Pemutakhiran PK-23

1) United Nation Index

United Nation Index digunakan untuk melihat tingkat keakurasan umur dan jenis kelamin. Index ini menggabungkan perkiraan akurasi dari umur menurut kelompok umur untuk laki-laki dan perempuan secara terpisah dengan perkiraan akurasi dari rasio jenis kelamin untuk kelompok umur yang berbeda. Dalam menentukan tingkat keakurasan data umur menggunakan *United Nation Index*, ada tiga kriteria, yaitu jika *United Nation Index* < 20 , maka data umur dan jenis kelamin tersebut akurat; jika *United Nation Index* sekitar 20 - 40, maka data umur dan jenis kelamin tersebut tidak akurat; dan jika *United Nation Index* > 40 , maka data umur dan jenis kelamin tersebut sangat tidak akurat (BPS, 2010).

Pada Gambar 2.9 menunjukkan bahwa perhitungan *United Nation Index* pada hasil Pemutakhiran PK-23 sebesar 13,59. Hal ini mengindikasikan bahwa data umur dan jenis kelamin hasil Peemutakhiran PK-23 dikategorikan **AKURAT**.

2) Whipple Index

Whipple Index digunakan untuk mengukur kecenderungan keluarga melaporkan umur yang berakhiran 0 atau 5. Index ini dihitung sebagai rasio dari anggota keluarga umur 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan 60 dari satu per lima dari jumlah anggota keluarga umur 23 sampai dengan 62 tahun. Umur pada masa kanak-kanak dan umur tua tidak dilibatkan dalam perhitungan index ini, karena kelompok umur tersebut lebih banyak kesalahan yang berhubungan dengan kesalahan pelaporan umur daripada kecenderungan untuk menyebutkan angka tertentu. Dalam menentukan tingkat keakurasan data umur menggunakan *Whipple Index*, ada tiga kriteria, yaitu jika *Whipple Index* < 105 , maka data umur tersebut sangat akurat; jika *Whipple Index* sekitar 105 – 109,9, maka data umur tersebut relatif akurat; jika *Whipple Index* sekitar 110 – 124,9, maka data umur tersebut kurang akurat; jika *Whipple Index* sekitar 125 – 175,9, maka data umur tersebut buruk; dan jika *Whipple Index* ≥ 175 , maka data umur tersebut sangat buruk (BPS, 2010).

Pada Gambar 2.9 menunjukkan bahwa perhitungan *Whipple Index* pada hasil Pemutakhiran PK-23 sebesar 100,00. Hal ini mengindikasikan bahwa data umur hasil Pemutakhiran PK-23 dikategorikan **SANGAT AKURAT**, artinya tidak ada kecenderungan untuk menyebutkan umur pada angka tertentu.

3) Myer Index

Myer Index bertujuan untuk mengukur kecenderungan pelaporan umur berakhiran 0 dan menghindari penyebutan umur yang berakhiran angka 1 sampai dengan 9, sehingga dapat dievaluasi digit mana yang paling diminati (dijadikan preferensi) dan juga digit yang paling dihindari. Nilai *Myer Index* akan berkisar 0 hingga 90. Jika *Myer Index* sama dengan 0 menunjukkan tidak adanya kecenderungan menyebutkan umur berakhiran 0. Sedangkan, jika *Myer Index* lebih kecil dari 10 berarti pelaporan dan pencatatan umur dapat dikatakan baik. Namun, jika *Myer Index* sama dengan 90, maka seluruh umur dilaporkan pada akhiran angka yang sama (BPS, 2010).

Pada Gambar 2.9 menunjukan bahwa perhitungan Myer Index pada hasil Pemutakhiran PK-23 sebesar 1,33. Hal ini mengindikasikan bahwa pencatatan dan pelaporan data umur hasil Pemutakhiran PK-23 dikategorikan **BAIK**, artinya tidak ada kecenderungan untuk menyebutkan umur pada angka tertentu.



Gambar 2.10 Hasil Perhitungan United Nation Index, Whipple Index, dan Myer Index

Kesimpulan

Evaluasi kualitas data umur hasil Pemutakhiran PK-23 pada ketiga index memberikan hasil yang akurat, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil Pemutakhiran PK-23 terjamin kualitasnya. Hal ini menunjukan bahwa pemanfaatan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 untuk pengambilan kebijakan akan cenderung tepat sasaran dan tepat guna.

2.5 Cakupan Pemutakhiran Pk-23 Dan Basis Data Keluarga Indonesia

A) Cakupan Pemutakhiran PK-23

Cakupan Pemutakhiran PK-23 adalah data keluarga hasil pengumpulan tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2023 dan pengolahan pada periode pemutakhiran sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.

PROVINSI	KAB/KOTA	KECAMATAN	DESA
100%	100%	99,87%	99,37%
Target : 33 Didata : 33	Target : 514 Didata : 514	Target : 3.760 Didata : 3.755	Target : 14.296 Didata : 14.206

*Hasil pemutakhiran PK-23 Tidak Termasuk DKI Jakarta

Gambar 2.11 Cakupan Pemutakhiran PK-23

Gambar 2.11 menjelaskan cakupan Pemutakhiran PK-23 sebagai berikut :

- 1) **Provinsi**, bahwa cakupan laporan di tingkat provinsi mencapai 100%, artinya seluruh provinsi (minus Provinsi DKI Jakarta) telah melakukan Pemutakhiran PK-23.
- 2) **Kabupaten/Kota**, bahwa cakupan laporan di tingkat kabupaten/kota sebesar 100%, artinya seluruh kabupaten/kota (minus kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta) telah melakukan Pemutakhiran PK-23.

- 3) **Kecamatan**, bahwa cakupan laporan di tingkat kecamatan sebesar 99,87%, artinya terdapat 3.755 kecamatan telah melakukan pemutakhiran PK-23 dari 3.760 kecamatan yang menjadi target pemutakhiran.
- 4) **Desa/kelurahan**, bahwa cakupan laporan di tingkat desa/kelurahan sebesar 99,37%, artinya terdapat 14.206 desa/kelurahan telah melakukan Pemutakhiran PK-23 dari 14.296 desa/kelurahan yang menjadi target pemutakhiran.

B) Cakupan Basis Data Keluarga Indonesia

Cakupan Basis Data Keluarga Indonesia adalah data keluarga hasil pengumpulan dan pengolahan data hasil Pemutakhiran PK-23 dan ditambahkan dengan data hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 dan Pemutakhiran PK-23 telah masuk ke dalam Data Basis Keluarga Indonesia.

PROVINSI	KAB/KOTA	KECAMATAN	DESA
100%	100%	98,60%	97,48%
Target : 33 Didata : 33	Target : 514 Didata : 514	Target : 7.280 Didata : 7.178	Target : 83.987 Didata : 81.873

**Basis Data Keluarga Indonesia Tidak Termasuk DKI Jakarta*

Gambar 2.12 Cakupan Basis Data Keluarga Indonesia

Gambar 2.12 menjelaskan cakupan Basis Data Keluarga Indonesia sebagai berikut :

- 1) **Provinsi**, bahwa cakupan laporan di tingkat provinsi mencapai 100%, artinya seluruh provinsi (minus Provinsi DKI Jakarta) telah masuk ke dalam Data Basis Keluarga Indonesia.
- 2) **Kabupaten/Kota**, bahwa cakupan laporan di tingkat kabupaten/kota sebesar 100%, artinya seluruh kabupaten/kota (minus kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta) telah masuk ke dalam Data Basis Keluarga Indonesia.
- 3) **Kecamatan**, bahwa cakupan laporan di tingkat kecamatan sebesar 98,60%, artinya terdapat 7.178 kecamatan telah masuk ke dalam Data Basis Keluarga Indonesia dari 7.280 kecamatan yang ada.
- 4) **Desa/kelurahan**, bahwa cakupan laporan di tingkat desa/kelurahan sebesar 97,48%, artinya terdapat 81.873 desa/kelurahan telah masuk ke dalam Data Basis Keluarga Indonesia dari 83.987 desa/kelurahan yang ada.

BAB

III

Keluarga Menurut Karakteristik Demografi

BAB III. KELUARGA MENURUT KARAKTERISTIK DEMOGRAFI

3.1 Jumlah Keluarga

Demografi merupakan aspek yang sangat penting dalam penentuan suatu kebijakan baik kebijakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KB, maupun kebijakan program pembangunan lain. Gambaran mengenai jumlah, struktur/komposisi dan distribusi kepala keluarga baik menurut jenis kelamin, umur, status kawin, pendidikan, pekerjaan; akan memudahkan pengembangan suatu kebijakan, penyediaan sarana dan prasarana serta pemenuhan kebutuhan kepala keluarga dan anggota keluarganya. Data demografi yang disajikan mencakup karakteristik keluarga yang berkaitan dengan jumlah keluarga, kepala keluarga berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan; dan jumlah jiwa dalam keluarga.

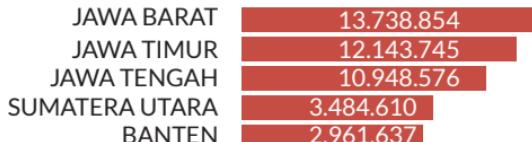
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU No.52 Tahun 2009). Data keluarga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam perencanaan pembangunan keluarga. Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023 mencatat bahwa jumlah keluarga terdata sebanyak 71.784.419 keluarga yang tersebar secara tidak merata di seluruh provinsi di Indonesia. Jika dibandingkan dengan estimasi jumlah keluarga pada tahun 2023, maka cakupan basis data keluarga indonesia hasil pendataan keluarga dan pemutakhirannanya mencakup 80% dari jumlah keluarga yang ada. Dengan demikian, karakteristik keluarga yang dijelaskan dalam buku ini mennggambarkan 80% keluarga di Indonesia.

Sebagaimana persebaran penduduk, persebaran keluarga Indonesia masih terfokus di Pulau Jawa.

Fenomena persebaran keluarga menurut wilayah geografis yang tidak merata ini masih menjadi ciri demografis di Indonesia.

(221.825), Papua (168.747), Papua Barat (162.463), Papua Tengah (160.336), Kalimantan Utara (127.494), dan Papua Selatan (88.164)

Persebaran penduduk menurut wilayah seringkali digunakan untuk mengetahui tingkat kepadatan dan daya dukung terhadap suatu wilayah. Sebagaimana persebaran penduduk, fenomena persebaran keluarga menurut wilayah geografis yang tidak merata masih menjadi ciri demografis Indonesia. Provinsi dengan jumlah keluarga di bawah 350 ribu KK adalah Provinsi Gorontalo (339.372), Sulawesi Barat (322.204), Maluku Utara (256.496), Papua Pegunungan



Grafik 3.1 Jumlah Keluarga Tertinggi Menurut Provinsi di Indonesia, 2023

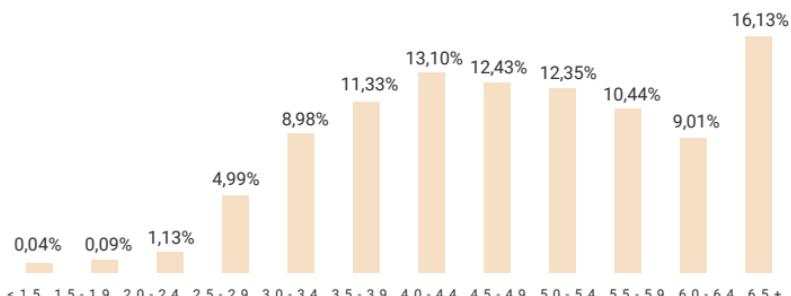
5 Provinsi dengan jumlah kepala keluarga tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat (13.738.854 KK), Jawa Timur (12.143.745 KK), Jawa Tengah (10.948.576 KK), Sumatera Utara (3.484.610 KK), dan Banten (2.961.637 KK).

3.2 Karakteristik Kepala Keluarga

Kepala keluarga adalah laki-laki atau perempuan yang berstatus kawin, atau janda, atau duda, atau tidak kawin, yang mengepalai suatu keluarga yang anggotanya terdiri dari istri/suaminya, anak-anaknya dan atau lainnya.

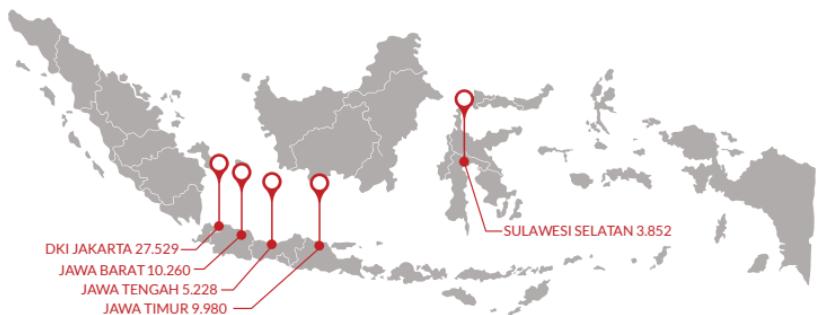
A) Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan kelompok umur, persentase kepala keluarga di Indonesia yang berada pada kelompok umur produktif (15-64 tahun) adalah sebesar 83,83%. Persentase kepala keluarga tertinggi berada pada kelompok usia 65+ tahun yaitu sebesar 16,13%, sedangkan persentase terendah berada pada kelompok usia kurang dari 15 tahun yaitu sebesar 0,04%.



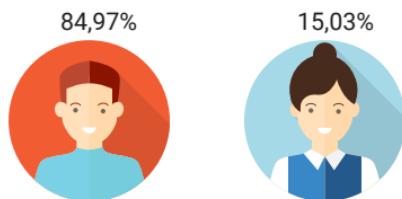
Grafik 3.2 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur, 2023

Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2023 ini menunjukkan masih terdapat kepala keluarga baik laki-laki maupun perempuan yang berumur di bawah 19 tahun. Hal ini mengindikasikan masih terjadinya pernikahan dini hampir di seluruh wilayah Provinsi di Indonesia. Berdasarkan grafik 3.2 jika dirinci berdasarkan provinsi, persentase kepala keluarga baik laki-laki maupun perempuan yang berusia di bawah umur tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta (1,20%), Papua Tengah (0,88%), Papua (0,63%), Papua Pegunungan (0,45%), dan Papua Barat (0,45%).



Gambar 3.1 Provinsi dengan Persentase KK di bawah Usia 19 Tahun Berdasarkan Provinsi, 2023

B) Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3.2 Persentase Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin di Indonesia, 2023

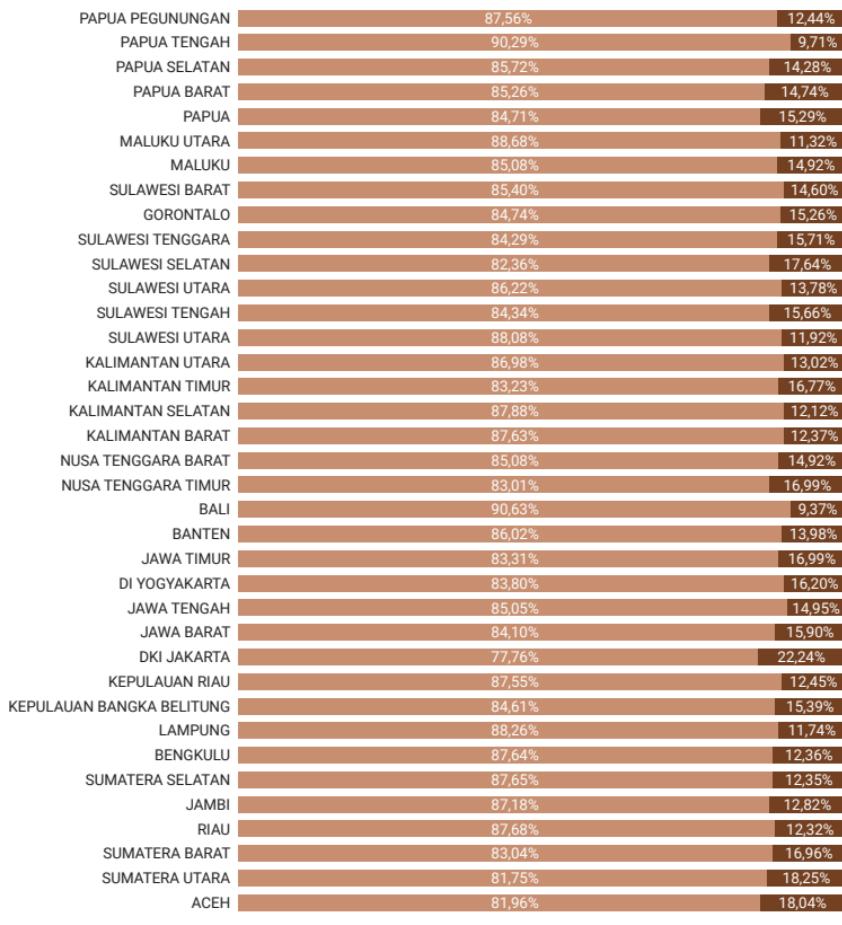
Gambar 3.2 menunjukkan bahwa secara nasional, persentase kepala keluarga yang berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi (84,47%) dibandingkan kepala keluarga berjenis kelamin perempuan (15,53%).

Jika dilihat berdasarkan kelompok umurnya, kepala keluarga berjenis kelamin laki-laki paling tinggi pada kelompok usia 40-44 tahun yaitu sebesar 14,29%, dan paling rendah pada kelompok usia <15 tahun yaitu sebesar 0,03%. Gambaran ini berbeda dengan kepala keluarga yang berjenis kelamin perempuan, dimana persentase paling tinggi berada pada kelompok usia lebih dari 65 tahun yaitu sebesar 35,51%.



Grafik 3.3 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur di Indonesia, 2023

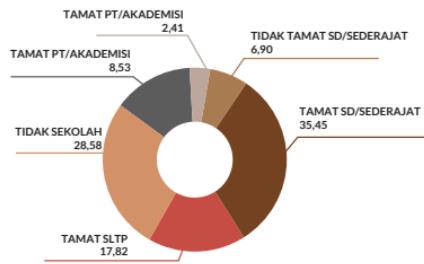
Jika dilihat menurut provinsi seperti yang digambarkan pada grafik 3.4, persentase kepala keluarga di Indonesia berdasarkan jenis kelamin memiliki gambaran yang cukup menarik di mana persentase kepala keluarga berjenis kelamin laki-laki tertinggi berada di Provinsi Bali yaitu sebesar 90,63% dan persentase terendah berada di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 81,75%. Sebaliknya, persentase kepala keluarga di Indonesia berdasarkan jenis kelamin perempuan tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 22,24% dan persentase terendah berada di Provinsi Bali yaitu sebesar 9,37%.



Grafik 3.4 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin Per Provinsi di Indonesia, 2023

C) Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pendidikan

Keberadaan kepala keluarga dengan pendidikan yang memadai memegang peranan penting dalam pembangunan keluarga. Secara nasional, tingkat pendidikan kepala keluarga di Indonesia masih cukup rendah. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya persentase kepala keluarga yang hanya menamatkan pendidikan di jenjang Sekolah Dasar yaitu sebesar 35,45%, bahkan terdapat 28,58% kepala keluarga tidak sekolah.



Grafik 3.5 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Indonesia, 2023

Pendidikan dikatakan rendah apabila kepala keluarga hanya menempuh pendidikan sampai tingkat SD, kepala keluarga dengan tingkat pendidikan sedang jika hanya sampai SMP dan SMA, sedangkan tingkat Pendidikan tinggi jika kepala keluarga menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi. Secara nasional, persentase kepala keluarga dengan tingkat pendidikan rendah sebesar 44,76%, pendidikan sedang sebesar 46,41% dan pendidikan tinggi sebesar 8,83%. Provinsi dengan persentase kepala keluarga dengan tingkat pendidikan rendah tertinggi adalah Provinsi Papua Pegunungan (80,64%).

	KK Pendidikan Rendah	KK Pendidikan Sedang	KK Pendidikan Tinggi
NASIONAL	44,76	46,41	8,83
PAPUA PEGUNUNGAN	80,64	16,63	2,73
PAPUA TENGAH	65,23	28,99	5,78
PAPUA SELATAN	50,49	43,08	6,43
PAPUA BARAT	34,51	51,87	13,62
PAPUA	26,06	61,08	12,86
MALUKU UTARA	36,48	53,29	10,34
MALUKU	32,30	56,50	11,20
SULAWESI BARAT	55,24	36,13	8,63
GORONTALO	58,21	33,60	8,19
SULAWESI TENGGARA	40,85	47,03	12,12
SULAWESI SELATAN	48,40	40,90	10,30
SULAWESI UTARA	47,58	43,92	8,50
SULAWESI TENGAH	31,91	58,19	8,90
SULAWESI UTARA	40,26	48,65	11,09
KALIMANTAN UTARA	31,67	56,92	11,41
KALIMANTAN TIMUR	46,98	44,33	8,69
KALIMANTAN SELATAN	44,16	47,04	8,80
KALIMANTAN BARAT	52,86	40,24	6,90
NUSA TENGGARA BARAT	58,47	32,34	9,19
NUSA TENGGARA TIMUR	51,37	39,53	9,11
BALI	36,05	49,97	13,98
BANTEN	38,87	51,36	9,77
JAWA TIMUR	49,25	43,15	7,60
DI YOGYAKARTA	32,06	53,16	14,78
JAWA TENGAH	51,04	41,94	7,02
JAWA BARAT	46,04	44,96	9,00
DKI JAKARTA	17,42	63,97	18,62
KEPULAUAN RIAU	31,31	58,43	10,26
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	50,59	41,85	7,56
LAMPUNG	46,11	48,17	5,72
BENGKULU	41,74	48,07	10,19
SUMATERA SELATAN	47,13	45,96	6,90
JAMBI	43,18	47,67	9,15
RIAU	38,44	52,72	8,84
SUMATERA BARAT	40,59	49,58	9,83
SUMATERA UTARA	31,80	60,98	7,22
ACEH	34,79	54,14	11,06

Grafik 3.6 Kepala Keluarga dengan Tingkat Pendidikan, 2023

D) Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan dapat menunjukkan status sosial ekonomi dan kemandirian karena dengan bekerja maka diperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebesar 90,05 % kepala keluarga yang berusia di atas 10 tahun tercatat memiliki pekerjaan dan hanya 9,95 % kepala keluarga yang tidak bekerja.

Jenis pekerjaan yang paling banyak dijalani kepala keluarga di Indonesia yaitu swasta (32,08%), kemudian petani (29,05%) di urutan kedua.



Gambar 3.3 Persentase Kepala Keluarga Bekerja, 2023



Grafik 3.7 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Indonesia, 2023

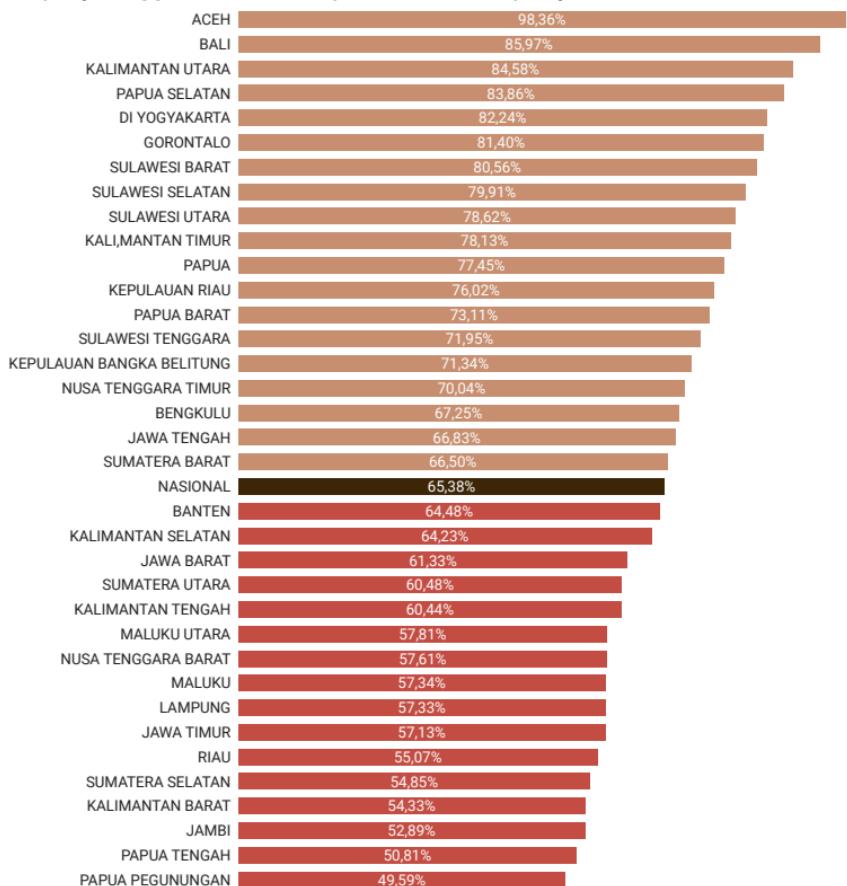
E) Kesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah sistem pelayanan kesehatan berjenjang dengan sistem asuransi yang diberlakukan mulai 1 Januari 2014, dan bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Peserta JKN adalah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non Penerima Bantuan Iuran (non PBI) yang dijamin memperoleh pelayanan kesehatan tingkat dasar maupun pelayanan kesehatan tingkat lanjutan baik rawat jalan maupun rawat inap. Peserta Non JKN merupakan peserta yang memiliki jaminan kesehatan di luar sistem JKN.



Gambar 3.4 Persentase Jiwa dalam Keluarga Berdasarkan Kesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional, 2023

Berdasarkan Gambar 3.4 kesertaan dalam Jaminan Kesehatan, terdapat 67,77% keluarga memiliki jaminan kesehatan sedangkan 32,23% tidak memiliki. Peserta yang memiliki jaminan kesehatan tersebut, sebanyak 96,47% merupakan peserta JKN dan 3,53% merupakan peserta NON JKN. Penduduk yang masih belum mempunyai JKN merupakan sasaran utama pemberian komunikasi, informasi dan edukasi terkait pentingnya ikut serta dan mendukung JKN serta catatan bagi BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara dalam memperbaiki kualitas pelayanan.



Grafik 3.8 Persentase Jaminan Kesehatan terhadap Individu per Provinsi, 2023

Secara nasional pada tahun 2023, persentase tertinggi berdasarkan status kepemilikan JKN per provinsi adalah Provinsi Aceh sebesar 98,36% sedangkan provinsi dengan tingkat keikutsertaan JKN terendah yaitu Provinsi Papua Pegunungan sebesar 49,59%.

BAB

IV

Keluarga Menurut Indikator Pelayanan KB

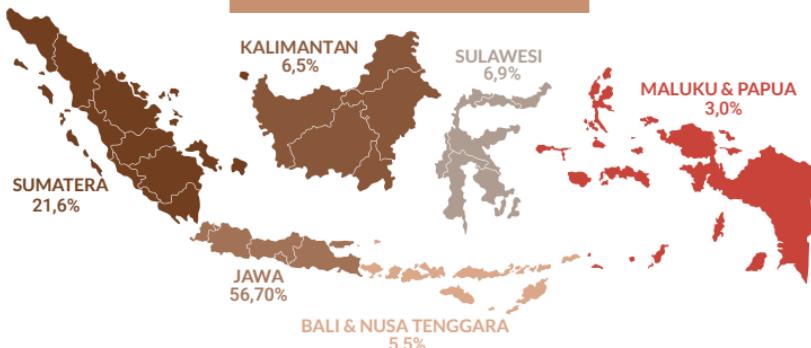
BAB IV. KELUARGA MENURUT INDIKATOR PELAYANAN KB

4.1 Karakteristik Pasangan Usia Subur (PUS)

Hasil pendataan keluarga dan pemutakhirannya menyajikan informasi mengenai indikator Keluarga Berencana. Indikator Keluarga Berencana tersebut menyajikan data Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan karakteristik, status kehamilan, dan kesertaan dalam KB. PUS adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan sah, di mana istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun.

Sebagaimana persebaran penduduk di Indonesia, sebaran PUS menurut wilayah terkonsentrasi di Pulau Jawa yaitu sebesar 56,70%.

"Jumlah Pasangan Usia Subur di Indonesia berdasarkan hasil Pendataan Keluarga dan Pemutakhirannya Tahun 2023 sebesar 47.017.047 PUS atau terdapat 65,50 % PUS dari jumlah keluarga terdata di Indonesia"



Gambar 4.1 Sebaran PUS menurut Wilayah

PUS Berdasarkan Kategori Umur

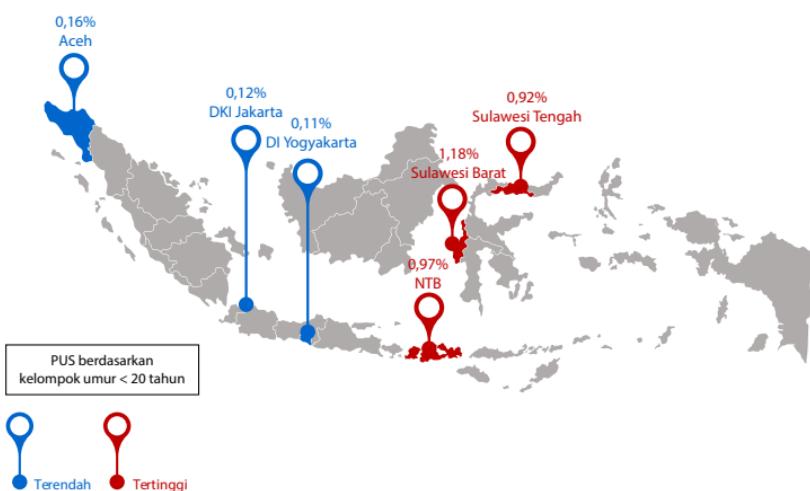
Salah satu strategi dalam Program KB yang bertujuan untuk mengendalikan angka kelahiran adalah program pendewasaan usia perkawinan. Indikator berhasil atau tidaknya program ini dapat dilihat dari tinggi rendahnya persentase PUS yang istrinya berusia di bawah 20 tahun terhadap PUS yang ada.

Jumlah PUS di Indonesia Hasil Pendataan Keluarga dan Pemutakhirannya Tahun 2023 adalah sebesar 38.657.735, dengan distribusi PUS menurut kelompok umur ada pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Persentase PUS Menurut Kelompok Umur, 2023

Sebagian besar PUS di Indonesia berada pada kelompok umur 35 – 49 tahun yaitu sebesar 61,15%, sedangkan jumlah PUS paling sedikit berada pada kelompok umur kurang dari 20 tahun yaitu sebesar 0,33% dari total PUS.

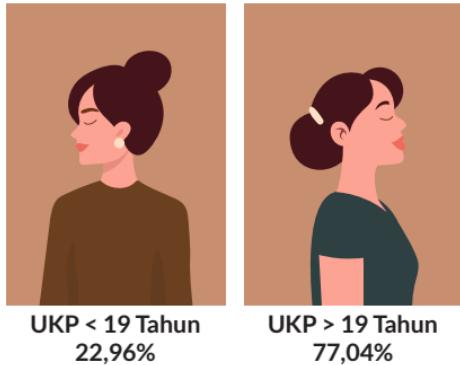


Gambar 4.3 Distribusi PUS Berdasarkan Kelompok Umur < 20 tahun, 2023

Berdasarkan gambar 4.3 persentase tertinggi PUS di bawah usia 20 tahun yaitu Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,18%, diikuti dengan NTB sebesar 0,97 %, dan Sulawesi Tengah sebesar 0,92%. Sedangkan, persentase terendah PUS di bawah usia 20 tahun yaitu Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,11%, diikuti dengan DKI Jakarta sebesar 0,12%, dan Aceh sebesar 0,16 %.

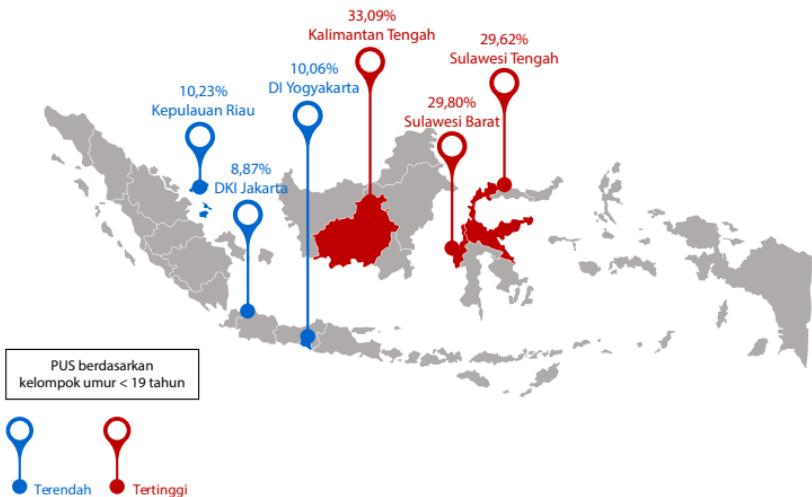
PUS Berdasarkan Usia Kawin Pertama (UKP) Perempuan.

Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak. Oleh karena itu, usia perkawinan untuk perempuan sebaiknya dilakukan pada usia 19 tahun ke atas. Hal ini disebabkan pada usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga karena secara rata-rata sudah matang dan bisa berfikir dewasa.



Gambar 4.4 Persentase PUS Berdasarkan UKP Perempuan, 2023

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa masih ada 22,96% PUS yang UKP perempuannya kurang dari 19 tahun. PUS dengan UKP perempuan kurang dari 19 tahun memungkinkan terdapat persoalan psikologis yang harus menjadi perhatian, yakni mengenai psikis dan mental dari pasangan yang menikah, terutama bagi perempuan, karena menikah berkaitan dengan organ reproduksi yang matang untuk siap menjadi orang tua.



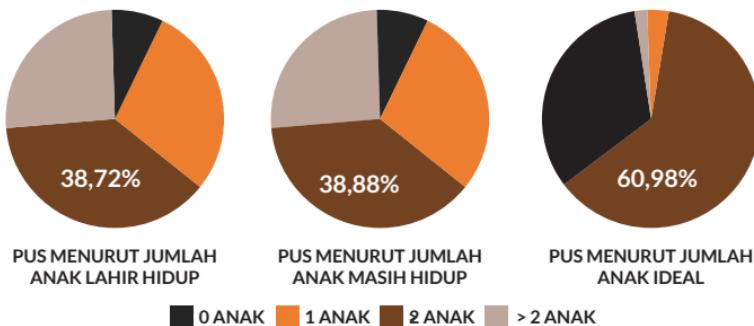
Gambar 4.5 Distribusi PUS dengan UKP Perempuan < 19 tahun, 2023

Berdasarkan Gambar 4.5 persentase tertinggi PUS dengan UKP perempuan kurang dari 19 tahun yaitu Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 33,09%, diikuti dengan Sulawesi Barat sebesar 29,80%, dan Sulawesi Tengah sebesar 29,62%. Sedangkan, persentase terendah PUS dengan UKP perempuan kurang dari 19 tahun yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 8,87%, diikuti dengan DIY sebesar 10,06%, dan Kepri sebesar 10,23%.

PUS Berdasarkan Jumlah Anak Lahir Hidup, Jumlah Anak masih Hidup, dan Jumlah Anak Ideal

Jumlah anak lahir hidup (ALH) adalah jumlah anak yang dilahirkan hidup baik yang saat ini tinggal bersama ataupun tidak tinggal bersama responden,

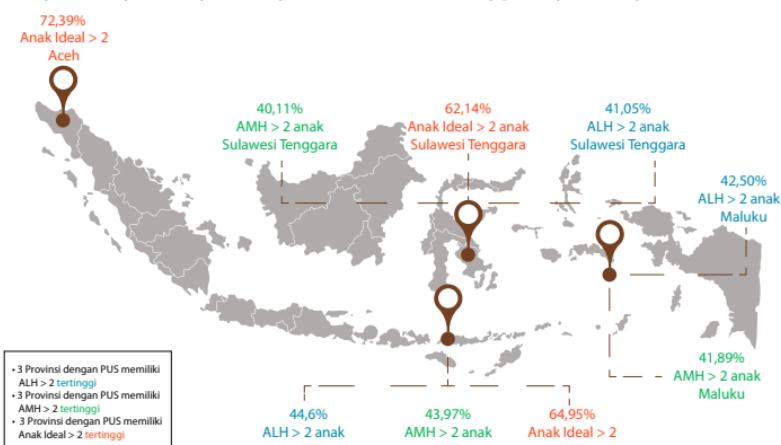
maupun anak yang telah meninggal. Selanjutnya, jumlah anak masih hidup (AMH) adalah jumlah anak yang masih hidup dari total kelahiran hidup, baik yang saat ini tinggal bersama ataupun tidak tinggal bersama responden. Sedangkan, jumlah anak ideal adalah jumlah anak yang diinginkan oleh responden ketika pertama kali menikah.



Grafik 4.1 Persentase PUS Berdasarkan ALH, AMH, dan Anak Ideal, 2023

Secara nasional, pada Grafik 4.1 menunjukkan bahwa persentase PUS berdasarkan jumlah ALH, AMH, dan anak ideal tertinggi pada 2 anak, yaitu PUS menurut jumlah ALH sebesar 2 anak adalah 38,72%, PUS menurut jumlah AMH sebesar 2 anak adalah 38,88%, dan PUS menurut jumlah anak ideal sebesar 2 anak adalah 60,98%. Hal ini menandakan cukup tingginya pemahaman PUS akan pentingnya pengendalian jumlah kelahiran. Pengendalian jumlah kelahiran merupakan salah satu tujuan program KB selain untuk menekan angka laju pertumbuhan penduduk namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa persentase PUS dengan jumlah ALH lebih dari 2 anak paling tinggi di Provinsi NTT (44,66%), Maluku (42,50%), dan Sulawesi Tenggara (41,05%). Selanjutnya, persentase PUS dengan jumlah AMH lebih dari 2 anak terjadi tertinggi di Provinsi NTT (43,97%), Maluku (41,89%), dan Sulawesi Tenggara (40,11%). Sedangkan, persentase PUS dengan keinginan jumlah anak ideal lebih dari 2 anak tertinggi di Provinsi Aceh (72,39%), NTT (64,95%), dan Sulawesi Tenggara (62,14%).



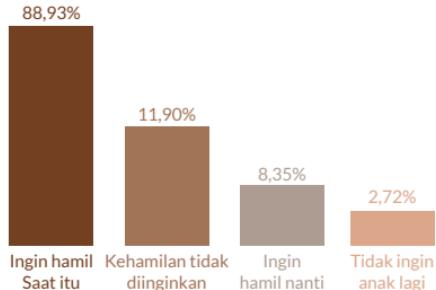
Gambar 4.6 Distribusi Persentase PUS dengan Jumlah ALH, AMH, dan Anak Ideal Lebih Dari 2 Anak Tertinggi, 2023

4.2 Status Kehamilan



PUS hamil adalah wanita kawin berusia 15-49 tahun yang sedang hamil. Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 yang sudah di *weighted* menunjukan bahwa jumlah PUS hamil terdata pada masa pengumpulan data di bulan 1 Juli – 7 Agustus 2023 sampai adalah sebesar 1.329.022 atau 2,83% PUS hamil dibandingkan jumlah PUS di Indonesia.

Selanjutnya, pada Grafik 4.2 menunjukan dari jumlah PUS hamil yang ada, terdapat 11,90% PUS hamil yang kehamilannya tidak diinginkan, 8,35% PUS hamil karena alasan ingin hamil nanti dan 2,72% karena alasan tidak ingin anak lagi.



Grafik 4.2 Persentasi PUS Hamil Berdasarkan Keinginan Kehamilan

PUS hamil dengan 4 Terlalu merupakan faktor yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan, persalinan berisiko tinggi, dan kematian ibu. PUS hamil dengan 4 Terlalu terdiri dari terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat. Gambar 4.7 menunjukan PUS hamil terlalu muda adalah PUS hamil dengan umur istri <20 tahun sebesar 1,42%, artinya dari 100 PUS hamil terdapat 1-2 PUS hamil terlalu muda. PUS hamil terlalu tua adalah PUS hamil dengan umur istri 35-40 tahun sebesar 21,77%, artinya dari 100 PUS hamil terdapat 21-22 PUS hamil terlalu tua. PUS hamil terlalu banyak adalah PUS hamil jumlah anak lahir hidup sebanyak 3 anak atau lebih, termasuk yang sudah menikah atau meninggal, sebesar 30,79%, artinya dari 100 PUS hamil terdapat 30-31 PUS hamil terlalu banyak. Sedangkan, PUS hamil terlalu dekat adalah PUS hamil punya anak kandung umur 0-59 bulan dan jarak kelahiran dengan anak kandung sebelumnya < 2 tahun, sebesar 0,64%, artinya dari 100 PUS hamil terdapat 1 PUS hamil terlalu dekat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 menunjukan PUS hamil dengan 4 Terlalu yang tertinggi adalah faktor terlalu banyak.



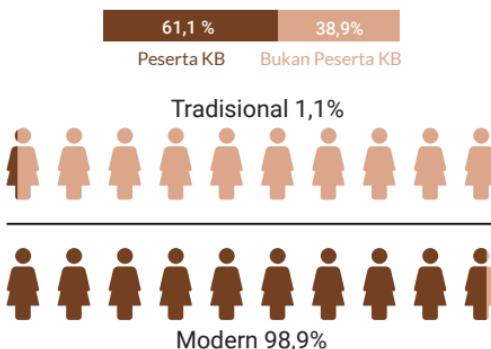
Gambar 4.7 Persentase PUS Hamil 4 Terlalu, 2023

4.3 Kesertaan Ber-KB

Keluarga Berencana selanjutnya disingkat dengan KB, adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. KB merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu melalui: 1) mengatur waktu, jarak dan jumlah kehamilan; 2) mencegah atau memperkecil kemungkinan seorang perempuan hamil mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau janin selama kehamilan, persalinan dan nifas; dan 3) mencegah atau memperkecil terjadinya kematian pada seorang perempuan yang mengalami komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas.

Jumlah PUS Berdasarkan Kesertaan Ber-KB

Peserta KB adalah PUS yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Gambar 4.8 menunjukkan bahwa dari jumlah PUS di Indonesia terdapat 61,1% PUS peserta KB, sedangkan sisanya 38,97% merupakan PUS bukan peserta KB.

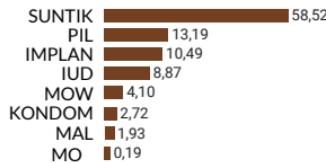


Gambar 4.8 PUS Berdasarkan kesertaan ber-KB di Indonesia, 2023
Data Pemutakhiran PK-23 weighted

PUS peserta KB terdiri dari peserta KB modern (menggunakan alat/obat/cara KB berupa Steril Wanita (MOW), Steril Pria (MOP), IUD, Implant/Susuk, Suntik, Pil, Kondom, dan Metode Amenore Laktasi (MAL)) dan tradisional (menggunakan alat/obat/cara KB berupa pantang berkala, sanggama terputus, dan alat/obat/cara KB tradisional lainnya. Gambar 4.8 menunjukkan bahwa dari PUS peserta KB yang ada, didominasi oleh PUS peserta KB modern sebesar 98,9%, sedangkan PUS peserta KB tradisional hanya sebesar 1,1%.

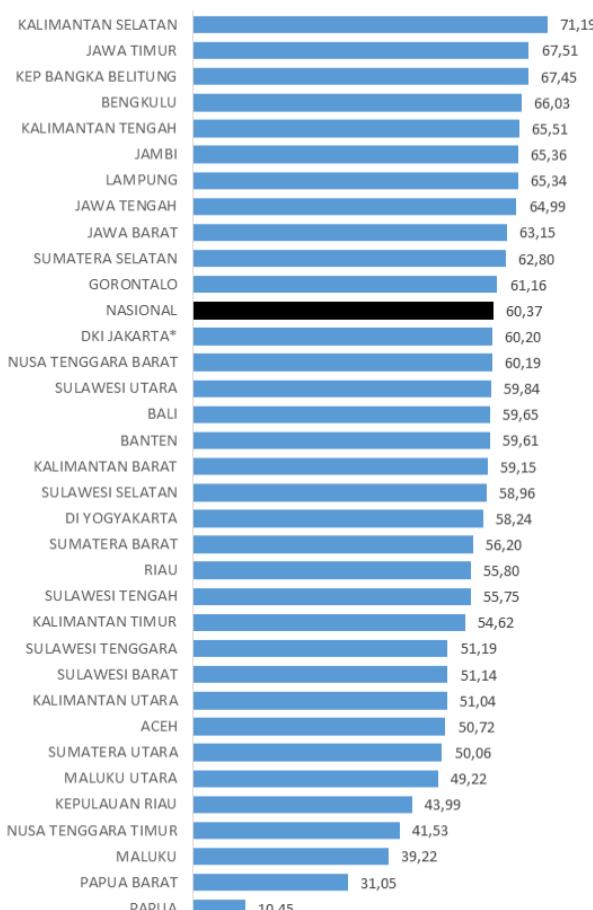
PUS Peserta Kb Modern Berdasarkan Metode Kontrasepsi

Distribusi PUS peserta KB modern menurut metode kontrasepsi dapat dilihat pada Grafik 4.3 Metode kontrasepsi modern yang paling banyak digunakan oleh PUS adalah Suntik sebesar 58,52% dan diikuti Pil sebesar 13,19%.

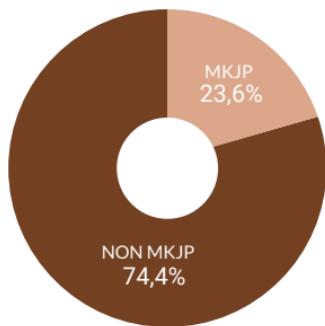


Grafik 4.3 PUS Peserta KB Modern Berdasarkan Metode Kontrasepsi, 2023
Data Pemutakhiran PK-23 weighted

Grafik 4.4 menunjukkan distribusi persentase PUS peserta KB modern berdasarkan provinsi. Dari 38 provinsi terdapat 11 provinsi yang persentase PUS peserta KB modern-nya lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Provinsi dengan persentase PUS peserta KB modern tertinggi adalah Kalimantan Selatan sebesar 71,19%, diikuti Jawa Timur sebesar 67,51% dan Kep Bangka Belitung sebesar 67,45%. Sedangkan, Provinsi dengan persentase PUS peserta KB modern terendah adalah Maluku sebesar 39,22%, diikuti Papua Barat sebesar 31,05%, dan Papua sebesar 10,45%.



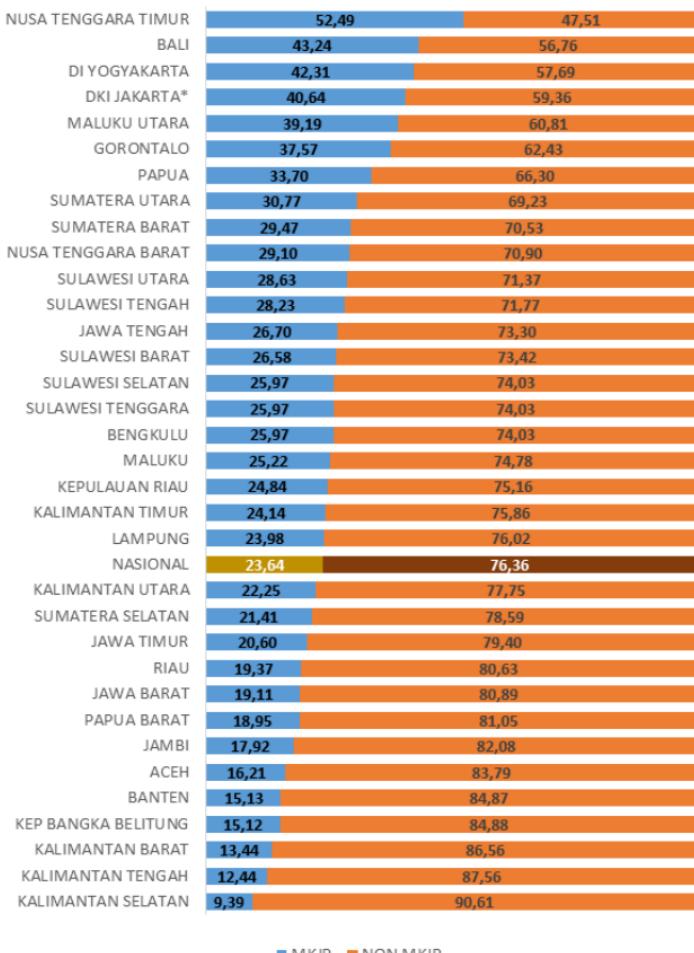
Grafik 4.4 PUS Peserta KB Modern Berdasarkan Provinsi, 2023
Data Pemutakhiran PK-23 weighted



Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama, lebih dari dua tahun, efektif dan efisien untuk tujuan pemakaian menjarangkan kelahiran lebih dari tiga tahun atau mengakhiri kehamilan pada PUS yang sudah tidak ingin menambah anak lagi. Alat/obat/cara KB yang termasuk dalam MKJP yaitu IUD, Implan, MOP, dan MOW. Penggunaan MKJP masih rendah. Hal ini dapat terjadi salah

satunya karena pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang kelebihan MKJP sehingga dari total PUS KB Modern, baru 23,6% PUS yang menggunakan MKJP.

Selanjutnya, Grafik 4.6 menunjukkan bahwa terdapat delapan Provinsi dengan Tingkat penggunaan MKJP lebih dari 30% yaitu Provinsi NTT, Bali, D.I Yogyakarta, Papua, Maluku utara, Gorontalo, DKI Jakarta dan Sumatera Utara.

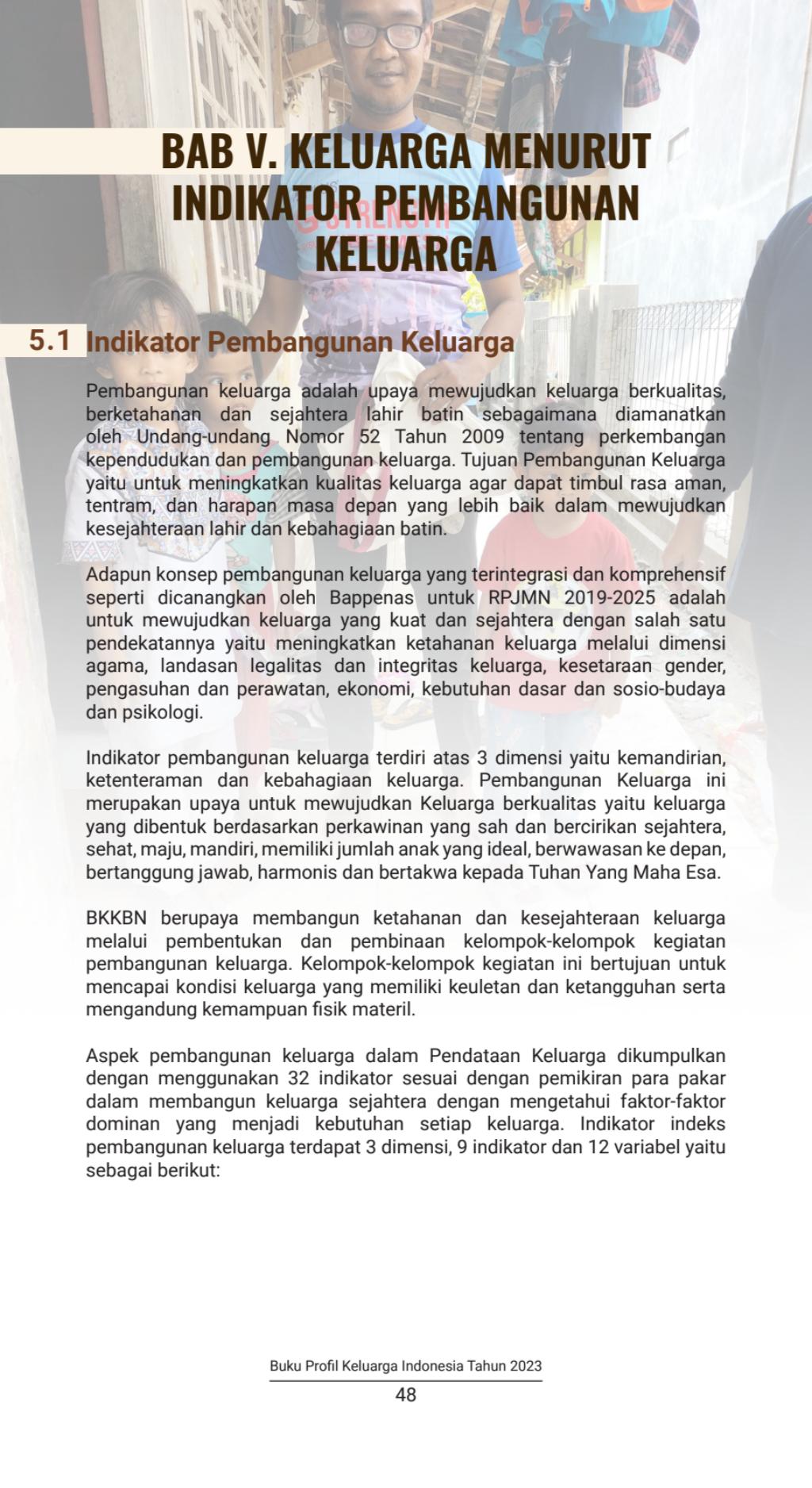


Grafik 4.5 PUS Peserta KB MKJP dan Non MKJP Berdasarkan Provinsi, 2023
Data Pemutakhiran Pk-23 weighted

BAB

V

Keluarga Menurut Indikator Pembangunan Keluarga



BAB V. KELUARGA MENURUT INDIKATOR PEMBANGUNAN KELUARGA

5.1 Indikator Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Tujuan Pembangunan Keluarga yaitu untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Adapun konsep pembangunan keluarga yang terintegrasi dan komprehensif seperti dicanangkan oleh Bappenas untuk RPJMN 2019-2025 adalah untuk mewujudkan keluarga yang kuat dan sejahtera dengan salah satu pendekatannya yaitu meningkatkan ketahanan keluarga melalui dimensi agama, landasan legalitas dan integritas keluarga, kesetaraan gender, pengasuhan dan perawatan, ekonomi, kebutuhan dasar dan sosio-budaya dan psikologi.

Indikator pembangunan keluarga terdiri atas 3 dimensi yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga. Pembangunan Keluarga ini merupakan upaya untuk mewujudkan Keluarga berkualitas yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BKKBN berupaya membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok kegiatan pembangunan keluarga. Kelompok-kelompok kegiatan ini bertujuan untuk mencapai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil.

Aspek pembangunan keluarga dalam Pendataan Keluarga dikumpulkan dengan menggunakan 32 indikator sesuai dengan pemikiran para pakar dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Indikator indeks pembangunan keluarga terdapat 3 dimensi, 9 indikator dan 12 variabel yaitu sebagai berikut:

5.1.1 Dimensi Ketentraman

- a. Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut



Indikator ini menunjukkan setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut, yaitu tidak menyimpang dari ajaran agama atau kepercayaan yang dianut. **Contoh** : Sholat 5 waktu (Islam), Ibadah Minggu (Kristen), Misa (Katholik), dll.

70.244.157 atau **97,85%** keluarga terdata di Indonesia menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut dan yang tidak menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut sebesar 2,15%

- b. Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang



Indikator ini menunjukkan keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Penduduk beragama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Sedangkan, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam maka dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

52.799.644 atau **94,52%** keluarga yang berstatus kawin di Indonesia memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan tidak memiliki buku/akta nikah sebesar 5,48%.

- c. Setiap anak usia (0 – 17 tahun) dalam keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.



Indikator ini menunjukkan kepemilikan akta lahir anak usia (0-17 tahun) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Akta Lahir merupakan suatu dokumen identitas otentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan.

36.132.349 atau **90,14%** keluarga yang memiliki anak usia (0-17 tahun) di Indonesia setiap anak usia (0 – 17 tahun) dalam keluarga tersebut memiliki akta lahir, sedangkan yang tidak memiliki akta lahir sebesar 9,86%.

- d. Setiap anggota keluarga memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta).



Indikator ini menunjukkan kepemilikan kartu jaminan kesehatan bagi setiap anggota keluarga baik itu dari instansi pemerintah seperti BPJS ataupun swasta (asuransi swasta).

43.542.647 atau **60,66%** keluarga terdata di Indonesia memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta) dan yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta) sebesar 39,34%.

- e. Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat konflik keluarga diantaranya
- 1) **tanpa tegur sapa**, adalah kondisi di mana dalam 3 (tiga) hari berturut-turut terdapat anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya tidak melakukan tegur sapa atau komunikasi.
 - 2) **pisah ranjang** antara suami dan istri, adalah kondisi di mana paling sedikit dalam 7 (tujuh) hari (bisa berturut-turut atau beberapa kali) pasangan suami istri tidak tidur dalam satu ranjang yang disebabkan oleh pertengkaran/perselisihan.
 - 3) **pergi dari rumah/minggat**, adalah kondisi di mana 2 (dua) hari berturut-turut terdapat anggota keluarga yang pergi dari rumah tanpa memberikan informasi pada anggota keluarga lain.
 - 4) **kekerasan dalam rumah tangga**, adalah setiap perbuatan terhadap salah satu anggota keluarga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik.



Grafik 5.1 Persentase Konflik Dalam Keluarga, 2023

f. Keluarga mengalami cerai hidup



Indikator ini menunjukkan keluarga mengalami perceraian bukan karena alasan salah satu dari pasangan meninggal. Keputusan cerai hidup antara suami dan istri menandakan bahwa suami dan istri gagal dalam berkomitmen, bekerjasama, berkomunikasi dan tidak ada jalan penyelesaian masalah.

3.637.932 atau **5,07%** keluarga terdata di Indonesia, mengalami konflik cerai hidup dan tidak memiliki konflik cerai hidup sebesar 94,93%.

5.1.2 Dimensi Kemandirian

- a. Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga yang memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan.



Indikator ini menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) bulan terakhir, kemampuan anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan. Sumber penghasilan bukan hanya dari segi bekerja tetapi juga dapat berasal dari sewa rumah, sewa kebun, uang pensiunan dan sebagainya.

Dalam 6 (enam) bulan terakhir **68.617.894** atau **95,59%** keluarga terdata di Indonesia memiliki sumber penghasilan perbulan sedangkan yang tidak memiliki sebesar 4,41%.

- b. Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari.**



Indikator ini menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) bulan terakhir, kemampuan keluarga untuk memenuhi setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” menurut kebiasaan keluarga atau masyarakat setempat, seperti makanan pokok (nasi, sagu, singkong, ubi, jagung atau sumber karbohidrat lainnya), lauk pauk sumber protein (ikan, telur, daging, unggas, susu, kacang-kacangan, olahan kedelai/tahu dan tempe) disertai sayur atau buah-buahan paling sedikit 2 (dua) kali sehari selama 6 (enam) bulan terakhir.

Dalam 6 (enam) bulan terakhir **69.692.814** atau **97,09%** keluarga terdata di Indonesia makan “makanan beragam”, sedangkan yang tidak makan “makanan beragam” sebesar 2,91%.

- c. Keluarga tinggal dalam rumah layak huni**

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi paling sedikit enam dari tujuh kriteria berikut:

- 1) Keselamatan bangunan, yaitu keadaan rumah tinggal keluarga memiliki atap, lantai, dinding dalam kondisi yang layak ditempati dari segi perlindungan. Meliputi atap rumah, dinding dan lantai yang layak.
- 2) Kecukupan minimum luas bangunan, yaitu keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas maupun tingkat bawah dibagi dengan jumlah penghuni rumah sehingga masing-masing mendapat ruang minimal 7,2 m².

Kesehatan lingkungan rumah, dilihat dari ketersediaan listrik, jamban dan sumber air minum.



Sebanyak **42.094.974** atau **58,64%** keluarga terdata di Indonesia tinggal dalam rumah layak huni sedangkan yang tidak sebesar 41,36%.

- d. Keluarga memiliki aset**



Indikator ini menunjukkan aset yang dimiliki dan bernilai ekonomi, dapat berupa uang maupun wujud benda lain yang bersifat nyata. Aset tersebut berupa: Tabungan (uang kontan/rekening aktif), AC, Televisi layar datar, Lemari es/kulkas, Komputer, Sepeda motor, Mobil, Kapal/perahu motor/perahu, Emas/perhiasan (minimal 10 gram), Hewan ternak, Lahan dan Rumah di tempat lain.

61.020.346 atau **85,01%** keluarga terdata di Indonesia memiliki aset sedangkan yang tidak sebesar 14,99%.

- e. Setiap anggota keluarga yang saat ini berusia sekolah (7 – 18 tahun) tidak ada yang putus sekolah di SD/Sederajat sampai dengan SLTA/sederajat**



Indikator ini menunjukkan anggota keluarga berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun tidak ada yang putus sekolah/tidak pernah sekolah atau masih sekolah untuk menamatkan wajib belajar 12 tahun sampai dengan tingkat SLTA atau sederajat.

28.173.126 atau **76,54%** keluarga yang memiliki anggota keluarga berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun tidak ada yang putus sekolah/tidak pernah sekolah atau masih sekolah untuk menamatkan wajib belajar 12 tahun sampai dengan tingkat SLTA atau sederajat di Indonesia anggota keluarga tersebut tidak ada yang putus sekolah sedangkan yang putus sekolah sebesar 23,46%.

f. Selama 1 (satu) bulan terakhir, terdapat anggota keluarga yang sakit (empat hari berturut-turut) sehingga meninggalkan aktivitas, atau ada anggota keluarga yang disabilitas



Indikator ini menunjukkan dalam 1 (satu) bulan terakhir, kondisi kesehatan seseorang dalam keluarga yang berada dalam batas-batas normal, sehingga yang bersangkutan tidak harus dirawat di rumah sakit atau tidak terpaksa absen bekerja/ke sekolah selama jangka waktu 4 hari/lebih secara berturut-turut. Dalam 1 (satu) bulan terakhir, **5.588.007** atau **7,78%** keluarga terdata di Indonesia terdapat anggota keluarga sakit (empat hari berturut-turut), sedangkan yang tidak ada sebesar 92,22%.

g. Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga mengakses informasi dari media online (internet)



Indikator ini menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) bulan terakhir, tersedia kesempatan bagi anggota keluarga untuk memperoleh informasi baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak (seperti surat kabar, majalah, bulletin) atau media elektronik (seperti radio, televisi). Media massa tersebut tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau dimiliki oleh orang/keluarga lain, ataupun menjadi milik umum/milik bersama.

Dalam 6 (enam) bulan terakhir, **58.251.047** atau **81,15%** keluarga terdata di Indonesia terdapat anggota keluarga sakit (empat hari berturut-turut), sedangkan yang tidak ada sebesar 18,85%.

5.1.3 Dimensi Kebahagiaan

a. Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari



Indikator ini menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga melakukan komunikasi dan bonding dalam keluarga. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (telepon, medsos). Bonding adalah keterikatan baik fisik dan emosional.

Dalam 6 (enam) bulan terakhir, **61.807.275** atau **95,67%** keluarga yang memiliki anggota keluarga di Indonesia memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari, sedangkan yang tidak memiliki waktu berinteraksi setiap hari sebesar 4,33%.

b. Selama 6 (enam) bulan terakhir pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri



Indikator ini menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga melakukan pengasuhan anak yaitu proses membesarkan, merawat dan mendidik serta melindungi anak yang melibatkan kedua orang tua secara seimbang.

Dalam 6 (enam) bulan terakhir, **43.728.556** atau **94,79%** keluarga yang memiliki anak di Indonesia melakukan pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri, sedangkan yang tidak melakukan pengasuhan anak bersama sebesar 5,21%.

c. Selama 6 (enam) bulan terakhir keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah



Indikator ini menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) bulan terakhir, keluarga berekreasi bersama-sama oleh seluruh atau sebagian anggota keluarga di luar rumah (tidak identik dengan tempat wisata) yang bertujuan untuk mengukuhkan rasa kasih sayang dan rasa kebersamaan di antara anggota keluarga.

Dalam 6 (enam) bulan terakhir, **44.723.679** atau **69,22%** keluarga yang memiliki anggota keluarga di Indonesia berekreasi bersama di luar rumah, sedangkan yang tidak berekreasi bersama di luar rumah sebesar 30,78%.

d. Selama 6 (enam) bulan terakhir, keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan RT



Indikator ini menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) bulan terakhir, keikutsertaan keluarga dalam kegiatan sosial seperti seperti gotong royong, arisan, pengajian, dll di lingkungan RT atau setara RT sampai dengan desa/kelurahan.

Dalam 6 (enam) bulan terakhir, **60.805.548** atau **84,71%** keluarga terdata di Indonesia ikut dalam kegiatan sosial/gotong royong, sedangkan yang tidak ikut dalam kegiatan social/gotong royong sebesar 15,29%.

5.2 Indikator Rumah Layak Huni

Rumah dapat dikategorikan sebagai Rumah layak huni jika memenuhi persyaratan kecukupan luas tempat tinggal (keseluruhan luas lantai rumah dibagi dengan jumlah penghuni rumah minimal $7,2 \text{ m}^2$), akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak dan ketahanan bangunan. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kondisi atap rumah terluas untuk jenis atap berupa beton, genteng, seng, dan kayu/sirap dengan syarat jenis tersebut dalam kondisi bagus (terawat baik dan rapi).
2. Kondisi dinding rumah terluas adalah tembok, plesteran anyaman bamboo/kawat, kayu/papan/gypsum, dan batang kayu, dengan syarat jenis dinding tersebut dalam kondisi bagus (terawat baik dan rapi).
3. Kondisi lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/batu merah, dengan syarat jenis lantai tersebut dalam kondisi bagus (terawat baik dan rapi).

- Ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh seluruh anggota keluarga adalah memiliki jamban sendiri dengan leher angsa dan tangki septic/IPAL dan menggunakan MCK komunal dengan leher angsa dan tangki septic/IPAL.
- Keselamatan bangunan, adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai, dinding dalam kondisi yang layak ditempati baik dari segi perlindungan.

1. Keluarga Berdasarkan Jenis Atap Rumah Terluas

Indikator ini menunjukkan jenis atap rumah terluas yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah terbuat dari: beton; genteng; asbes/seng; kayu/sirap; bambu; jerami/ijuk/rumbia/daun-daunan; lainnya.

BETON	1.63
GENTENG	60.01
ASBES/SENG	37.19
KAYU/SIRAP	0.39
BAMBU	0.12
JERAMI/ IJUK/ RUMBIA/ DAUN-DAUNAN	0.41
LAINNYA	0.24

Gambar 5.1 Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Atap Rumah

 Secara nasional, 60,01% keluarga terdata di Indonesia tinggal di rumah dengan atap rumah berupa genteng. Namun, masih tedapat 0,12% keluarga di Indonesia dengan jenis atap rumah dari bambu.

2. Keluarga Berdasarkan Jenis Dinding Rumah Terluas

Indikator ini menunjukkan jenis dinding rumah terluas yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah terbuat dari: tembok; kayu/papan; bambu; lainnya

TEMBOK	81.09
KAYU/PAPAN	14.84
BAMBU	1.44
LAINNYA	2.62

Gambar 5.2 Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Dinding Rumah

 Secara nasional, jenis dinding rumah yang paling banyak digunakan keluarga adalah dinding tembok sebesar 81,09% dari keluarga terdata di Indonesia, dan masih ada keluarga yang menggunakan dinding bambu sebesar 1,44%.

3. Keluarga Berdasarkan Jenis Lantai Rumah Terluas

Indikator ini menunjukkan jenis lantai rumah terluas yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah terbuat dari: keramik/granit/marmer/ ubin/tegel; semen; kayu/papan; bambu; tanah; dan lainnya.

KERAMIK/ GRANIT/ MARMER/ UBIN/ TEGL/ TERASO	65.29
SEMEN	22.41
KAYU/ PAPAN	7.91
BAMBU	0.42
TANAH	3.47
LAINNYA	0.49

Gambar 5.3 Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Lantai Rumah Terluas

Secara nasional, jenis lantai rumah yang paling banyak digunakan keluarga adalah lantai keramik/granit/marmer/ubin/tegel sebesar 65,29% dari keluarga



4. Keluarga Berdasarkan Sumber Penerangan Utama

Indikator ini menunjukkan keluarga yang memiliki sumber penerangan dari PLN atau nonPLN yaitu: listrik pribadi \leq 900 watt; listrik pribadi $>$ 900 watt; genset/solar cell; listrik bersama; non listrik.

Secara nasional, 70,67% keluarga terdata di Indonesia sudah menggunakan listrik pribadi \leq 900 watt sebagai sumber penerangan utama. Sementara keluarga yang menggunakan listrik pribadi $>$ 900 watt sebesar 17,11%, genset/solar cell sebesar 0,91%, listrik bersama sebesar 10,41% dan nonlistrik sebesar 0,90%.

5. Keluarga Berdasarkan Bahan Bakar Utama Untuk Memasak

Indikator ini menunjukkan bahan bakar utama yang digunakan oleh anggota keluarga untuk memasak sehari-hari, apakah menggunakan: listrik/gas; minyak tanah; arang/kayu; lainnya.



Secara nasional, bahan bakar memasak yang paling banyak digunakan keluarga berupa listrik/gas sebesar 88,71% dari keluarga terdata Indonesia, sedangkan yang menggunakan minyak tanah sebesar 2,28%, arang/kayu sebesar 8,11% dan selain dari kriteria di atas sebesar 0,90%.

6. Keluarga Berdasarkan Sumber Air Minum Utama

Indikator ini menunjukkan sumber air minum utama yang digunakan oleh anggota keluarga. Sumber air minum utama layak berasal dari: Air kemasan/isi ulang; ledeng/PAM; sumur bor; sumur terlindung, sedangkan sumber air minum utama tidak layak berasal dari sumur tidak terlindung; air permukaan (sungai, danau, dll); air hujan; lainnya



LAYAK 89,03%	TIDAK LAYAK 10,97%
AIR KEMASAN/ISI ULANG 30,34%	SUMUR TIDAK TERLINDUNGI 2,06%
LEDENG/PAM 18,91%	AIR PERMUKAAN (SUNGAI, DANAU, DLL) 1,99%
SUMUR BOR 13,33%	AIR HUJAN 2,04%
SUMUR TERLINDUNGI 26,46%	LAINNYA 4,48%

Gambar 5.4 Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Sumber Air Minum Utama

63.908.309 atau **89,03%** keluarga terdata di Indonesia memiliki sumber air minum utama layak. Secara nasional, sumber air minum utama yang paling banyak digunakan keluarga berupa air kemasan/isi ulang sebesar 30,34%.

7. Keluarga Berdasarkan Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Indikator ini menunjukkan status kepemilikan fasilitas tempat buang air besar yang digunakan seluruh anggota keluarga. Secara nasional, kepemilikan fasilitas tempat buang air besar yang paling banyak digunakan keluarga yaitu dengan septic tank. **61.321.968** atau **85,43%** keluarga terdata di Indonesia memiliki fasilitas tempat buang air besar dengan septic tank, 11,79% lainnya sedangkan tanpa septic tank sebesar 2,78%.

8. Keluarga Berdasarkan Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal

Indikator ini menunjukkan status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah milik sendiri; kontrak/sewa; bebas sewa; menumpang; dinas; lainnya.

MILIK SENDIRI	80.08
KONTRAK/ SEWA	5.07
BEBAS SEWA / MENUMPANG	13.59
DINAS	0.65
LAINNYA	0.62

Gambar 5.5 Persentase Keluarga Berdasarkan Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal

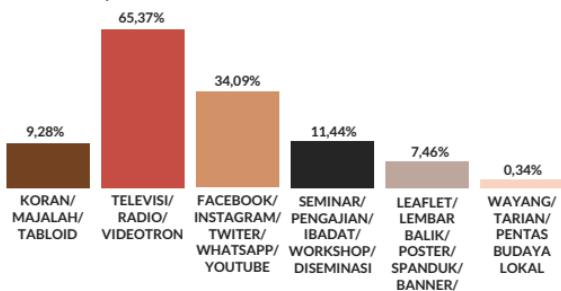
 Secara nasional, status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal yang paling banyak dari keluarga terdata di Indonesia merupakan milik sendiri sebesar 80,08%, kontrak/sewa sebesar 5,08%, bebas sewa/menumpang sebesar 13,59%, dinas sebesar 0,65% dan status kepemilikan rumah/bangunan selain dari kriteria di atas sebesar 0,62%.

5.3 Keluarga Terpapar Program Bangga Kencana

1. Keluarga memperoleh/mendengar/melihat pesan/informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dari media

 Indikator ini menunjukkan keluarga yang memperoleh/mendengar/melihat pesan/informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui media seperti koran/majalah/tabloid; televisi/radio/videotron; facebook/instagram/twitter/whatsapp/youtube/blog/website; seminar/pengajian/ibadat/workshop/diseminasi/pertemuan kelompok kegiatan/konseling/pameran; leaflet/lembar balik/poster/spanduk/banner/umbul-umbul/billboard/baliho/mural/souvenir; wayang/tarian/pentas budaya lokal.

56.335.896 atau **78,48%** keluarga terdata di Indonesia memperoleh/mendengar/melihat pesan/informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui media, sedangkan yang tidak memperoleh/mendengar/melihat pesan/informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui media sebesar 21,52%.

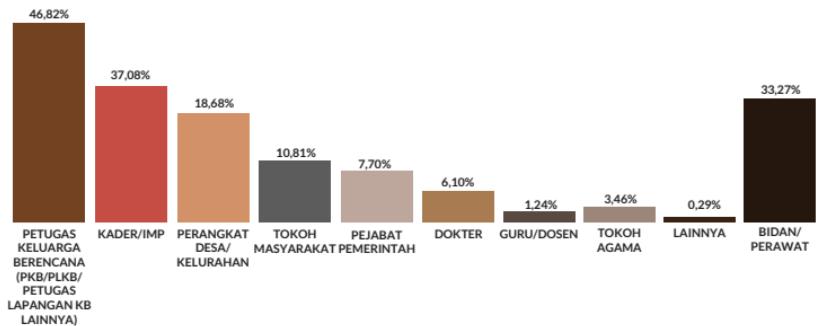


Grafik 5.2 Persentase Keluarga Terpapar Pesan/Informasi Bangga Kencana Melalui Media, 2023

2. Keluarga pernah memperoleh/mendengar/melihat/membaca pesan/informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga dari petugas

 Indikator ini menunjukkan keluarga yang pernah memperoleh/mendengar/melihat/membaca pesan/informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga dari petugas.

57.256.759 atau **79,76%** keluarga terdata di Indonesia pernah memperoleh/mendengar/melihat/membaca pesan/informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga dari petugas, sedangkan yang tidak memperoleh/mendengar/melihat pesan/informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui media sebesar 20,24%.



Grafik 5.3 Persentase Keluarga terpapar pesan/informasi Bangga Kencana melalui Petugas

BAB

VI

Penutup

BAB VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pemutakhiran Pendataan Keluarga memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh tentang karakteristik keluarga yang ditujukan untuk perencanaan, intervensi, peta sasaran/operasional, evaluasi hingga pengukuran kinerja sasaran strategis program Bangga Kencana di semua tingkatan wilayah serta sebagai gambaran tentang hasil Pemutakhiran PK-23 bagi mitra kerja lainnya.

Pemutakhiran PK-23 merekam data keluarga serta individu dalam keluarga sampai dengan *by name by address* yang tidak dimiliki oleh Kementerian/Lembaga lainnya sehingga secara akuntabilitas data dapat dipertanggungjawabkan dalam hal pemanfaatannya secara luas baik oleh internal maupun eksternal baik untuk kepentingan Program Bangga Kencana maupun program pembangunan lainnya.

Dalam Profil Keluarga Indonesia Tahun 2023 ini menyajikan data karakteristik keluarga berdasarkan indikator demografi, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dengan hasil capaian sebagai berikut :

- 1. Demografi**, mencakup karakteristik keluarga yang berkaitan dengan jumlah keluarga, kepala keluarga berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, dan jumlah jiwa dalam keluarga. Berdasarkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023, **jumlah keluarga terdata** adalah 71.784.419 keluarga dengan persebaran tidak merata dan sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa. Terdapat lima provinsi dengan jumlah keluarga tertinggi yaitu Jawa Barat (13.738.854), Jawa Timur (12.143.745), Jawa Tengah (10.948.567), Sumatera Utara (3.484.610), dan Banten (2.961.637). **Berdasarkan kelompok Umur**, kepala keluarga pada usia produktif (15-64 tahun) sebesar 83,83%, 65+ tahun sebesar 16,13%, dan usia <15 tahun sebesar 0,04%. **Berdasarkan jenis kelamin**, kepala keluarga laki-laki tertinggi pada usia 40-44 tahun (14,29%) dan terendah pada usia <15 tahun (0,03%), sedangkan kepala keluarga berjenis kelamin perempuan tertinggi pada usia 65 tahun ke atas yaitu 35,51%. **Berdasarkan status pendidikan**, persentase kepala keluarga yang hanya tamat SD sebesar 35,45%, bahkan 2,41% kepala keluarga yang tidak sekolah. Pendidikan dikatakan rendah jika hanya menamatkan sampai tingkat sekolah dasar, pendidikan sedang sampai SMP dan SMA, dan pendidikan tinggi sampai perguruan tinggi, hasil Pemutakhiran Pendataan keluarga 2023 mencatat kepala keluarga berpendidikan rendah (44,76%), pendidikan sedang (46,41%), dan pendidikan tinggi (8,83%). **Berdasarkan jenis pekerjaan**, kepala keluarga yang memiliki pekerjaan sebesar 90,05% dan tidak bekerja sebesar 9,95%. Dari kepala keluarga yang bekerja, paling tinggi sebagai pegawai swasta (32,08%) dan petani (29,05%). **Berdasarkan kesertaan JKN**, persentase jiwa dalam keluarga yang

memiliki jaminan kesehatan sebanyak 67,77%, dan tidak memiliki jaminan kesehatan sebanyak 32,23%, dan dari peserta yang memiliki jaminan kesehatan tersebut, 96,47% adalah peserta JKN, sedangkan non JKN sebesar 3,53%.

2. **Keluarga Berencana**, meliputi data Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan karakteristik, status kehamilan, dan kesertaan dalam KB. PUS adalah pasangan suami istri dalam perkawinan sah, yang umur istrinya 15-49 tahun. Jumlah PUS di Indonesia sebesar 47.017.047 atau 65,50% PUS dari jumlah keluarga didata dengan sebaran terkonsentrasi di Pulau Jawa sebesar 56,70%. **Berdasarkan PUS kategori umur istri** di bawah 20 tahun sebesar 0,33%, 20-34 tahun sebesar 38,52% dan 35-49 tahun sebesar 61,15%. **PUS berdasarkan Usia Kawin Pertama (UKP) perempuan** sebanyak 22,96% adalah PUS dengan UKP <19 tahun. PUS berdasarkan jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) 2 anak sebesar 38,72%, jumlah Anak Masih Hidup (AMH) 2 anak sebesar 38,88% dan jumlah anak ideal 2 anak sebesar 60,98%. **Status kehamilan**, dari hasil pemutakhiran pendataan keluarga 2023, mencatat PUS hamil (wanita kawin 15-49 tahun) sebanyak 1.329.022 atau 2,83% PUS hamil dari jumlah PUS di Indonesia. Dari jumlah hamil tersebut, 8,35% alasan ingin hamil nanti/kemudian, dan 2,72% alasan tidak ingin anak lagi sedangkan alasan ingin hamil saat itu sebesar 88,93%. Berdasarkan 4T, terlalu muda (PUS hamil <20 tahun) sebesar 1,42%, terlalu tua (PUS hamil >35 tahun) sebesar 21,77%, terlalu banyak (PUS hamil memiliki jumlah anak lahir hidup lebih 2 anak) sebesar 30,79%, dan terlalu dekat (PUS hamil yang jarak kehamilan dengan kelahiran sebelumnya kurang dari 2 tahun) sebesar 0,64%. **Berdasarkan PUS Kesertaan Ber-KB**, terdapat 61,1% PUS adalah peserta KB, dan 38,9% PUS bukan peserta KB. Dari PUS peserta KB tersebut, 98,9% menggunakan **KB modern**, sedangkan 1,1% **KB tradisional**. Untuk PUS KB modern berdasarkan metode kontrasepsi paling tinggi adalah suntik 58,52% dan pil 13,19%. Untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/MKJP (IUD, implan, MOW dan MOP) hanya terdapat 23,6% PUS yang memilih MKJP, sisanya lebih memilih non MKJP.
3. **Pembangunan Keluarga**, meliputi **indikator pembangunan keluarga** berdasarkan dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga, **indikator rumah layak huni** yang terdiri dari atap rumah terluas, dinding rumah terluas, alas rumah terluas, sumber penerangan, sumber air minum utama, bahan bakar untuk memasak, memiliki fasilitas tempat buang air besar, luas dan kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal, **indikator keterpaparan Program Bangga Kencana** melalui **media pendataan keluarga dan pemutakhiran**, dan **indikator keterpaparan Program Bangga Kencana** melalui **petugas pendataan keluarga dan pemutakhiran**. Pada dimensi ketentraman, terdiri dari 97,85% anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) dalam 6 bulan terakhir menjalankan ibadah rutin sesuai agama dan kepercayaannya, 94,52% keluarga memiliki akta/buku nikah, 90,14% memiliki akta lahir anak

(0-17 tahun), 60,66% anggota keluarga memiliki jaminan kesehatan (pemerintah/swasta), adanya konflik keluarga dalam 6 bulan terakhir yaitu tanpa tegur sapa (1,44%), pisah ranjang (0,78%), minggat (0,71%) dan KDRT (0,43%) dan cerai hidup sebesar 5,07%. Pada **dimensi kemandirian**, dalam 6 bulan terakhir terdapat 1 anggota keluarga yang memiliki penghasilan per bulan sebesar 95,59%; keluarga makan makanan beragam sebesar 97,09%; keluarga tinggal dalam rumah layak huni sebesar 58,64%; keluarga memiliki aset yang bernilai ekonomi, baik berupa uang maupun wujud benda lain yang bersifat nyata sebesar 85,01%; terdapat anggota keluarga usia sekolah (7-18 tahun) yang tidak ada putus sekolah SD hingga SLTA sederajat sebesar 76,54%; selama 1 bulan terakhir terdapat anggota keluarga yang mengalami sakit selama 4 hari berturut-turut hingga mengganggu aktivitas sebesar 7,78%; dan dalam 6 bulan terakhir terdapat 1 anggota keluarga mengakses informasi dari media online/internet sebesar 81,15%. Pada dimensi kebahagiaan, dalam 6 bulan terakhir terdapat anggota keluarga memiliki waktu untuk interaksi setiap hari sebesar 95,67%; dalam 6 bulan terakhir pengasuhan anak dilakukan bersama suami istri sebesar 94,79%; 6 bulan terakhir pernah berekreasi bersama keluar rumah sebesar 69,22%; 6 bulan terakhir keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial/ gotong royong di lingkungan RT sebesar 84,71%. **Berdasarkan indikator Rumah Layak Huni**, jenis atap rumah terluas sebesar 60,01% adalah genteng; dinding rumah terluas sebesar 81,09% adalah tembok; jenis lantai terluas sebesar 65,29% adalah keramik/granit/marmer/ubin/tegel; sumber penerangan utama sebesar 70,67% keluarga menggunakan listrik pribadi <900 watt; bahan bakar utama untuk memasak sebesar 88,71% adalah menggunakan kompor listrik/gas; sumber air minum utama layak yang berasal dari air kemasan/isi ulang, ledeng/PAM, sumur bor, sumur terlindungi sebesar 89,03% dengan pemakaian terbesar menggunakan adalah air kemasan/isi ulang dan sumur terlindungi sebesar 30,34% dan 26,46%; keluarga memiliki fasilitas tempat buang air besar sebesar 85,43% memiliki septic tank dan 2,78% tidak memiliki septic tank; serta berdasarkan kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal yaitu milik sendiri (80,08%), kontrak (5,07%), bebas sewa/menumpang (13,59%), rumah dinas (0,65%) dan lainnya (0,62%). **Berdasarkan keterpaparan Program Bangga Kencana**, sebanyak 78,48% keluarga memperoleh/mendengar/ melihat pesan/ informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui media, dengan persentase tertinggi sebesar 65,37% melalui televisi/radio/vidiotron. **Sedangkan untuk keterpaparan Program Bangga Kencana dari petugas**, sebanyak 79,76% keluarga memperoleh/ mendengar/ melihat/ membaca pesan/ informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga dari petugas, dengan persentase tertinggi sebesar 46,82% melalui petugas keluarga berencana (PKB/PLKB/Petugas Lapangan KB lainnya)

6.2 Rekomendasi

Keluarga Indonesia sebagai sasaran program Bangga Kencana harus berbasis data yang tepat, akurat, valid, relevan serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan :

1. Peningkatan kualitas data berkelanjutan sehingga data keluarga dan individu anggota keluarga yang dihasilkan dapat lebih valid dan akurat;
2. Peningkatan kapasitas (pemahaman, pengetahuan dan keterampilan) Sumber Daya Manusia pengelola data di daerah melalui pelatihan dan orientasi khususnya dalam penyiapan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI) di tahun selanjutnya;
3. Peningkatan komitmen penentu kebijakan melalui dukungan anggaran di daerah khususnya dukungan pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga di tahun selanjutnya;
4. Penguatan sarana teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga baik perangkat lunak dan perangkat keras, aplikasi maupun koneksi internet;
5. Peningkatan penyajian dan pemanfaatan data Pemutakhiran PK23 melalui seminar, kajian data, desiminasi serta sarasehan di berbagai tingkatan wilayah.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 JUMLAH KELUARGA MENURUT KELUARAGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINSI	JUMLAH KEPALA KELUARGA LAKU LAKI	KELUARAGA DAN PEMUTAKHIRAN										
			< 15	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	
1	ACEH	12,891,133	156	667	9,693	55,711	128,733	175,462	184,724	171,233	160,496	124,453	101,057
2	SUMATRA UTARA	3,484,610	754	2,346	30,298	150,169	308,722	418,734	489,681	428,804	421,187	364,414	324,948
3	SUMATRA BARAT	1,313,116	196	829	1,313,116	196	1,313,116	196	1,313,116	196	1,313,116	196	1,313,116
4	RIAU	1,502,224	218	870	16,624	76,076	152,540	202,780	229,523	206,253	189,903	147,902	117,045
5	JAMBI	983,119	75	763	13,068	53,659	96,427	124,241	143,734	129,366	117,889	95,166	80,475
6	SUMATRA SELATAN	2,211,093	319	1,765	27,096	113,300	217,706	290,192	311,822	281,905	256,630	213,933	185,819
7	BENGKULU	543,159	41	553	7,728	29,240	55,342	68,708	76,884	69,276	63,336	53,340	46,487
8	LAMPUNG	2,657,218	314	982	18,433	101,766	199,921	267,737	305,943	292,540	277,019	228,108	204,045
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4,182,337	50	712	8,042	41,900	54,454	62,084	70,005	55,999	36,502	32,745	59,356
10	KEPULAUAN RIAU	468,616	53	343	4,740	24,622	49,192	66,523	79,846	72,877	61,005	40,611	28,339
11	DKI JAKARTA	2,286,822	174	9,944	9,385	31,263	105,649	188,004	246,070	308,698	303,999	201,125	253,344
12	JAVA BARAT	13,787,854	895	895	8,365	15,758	56,613	136,562	154,962	171,223	169,032	139,450	118,891
13	JAVA TENGAH	10,948,576	902	4,326	8,050	26,020	47,979	91,741	114,918	135,561	128,831	130,918	120,752
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1,123,634	97	1,329	11,152	44,578	77,815	97,752	124,483	124,370	134,566	128,820	118,555
15	JAVA TIMUR	12,437,745	179	813	113,52	52,571	91,318	119,174	145,528	142,052	151,741	137,553	260,717
16	BANTEN	1,961,637	406	1,621	27,123	159,219	320,466	393,761	431,446	395,058	380,108	297,000	233,947
17	BALI	1,099,369	174	591	9,982	50,093	90,128	107,862	133,616	143,684	157,587	123,340	95,263
18	NUSA TENGGARA BARAT	1,592,241	325	3,058	34,654	101,243	167,633	205,484	215,962	203,032	184,917	141,950	119,718
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1,127,412	387	1,052	15,962	59,725	101,875	134,696	145,853	135,047	131,658	115,881	96,184
20	KALIMANTAN BARAT	1,171,765	254	1,100	17,309	65,669	117,515	150,382	169,182	152,456	139,774	110,64	93,267
21	KALIMANTAN TENGAH	602,503	134	918	11,418	37,124	63,537	77,374	89,919	81,479	56,052	44,117	66,577
22	KALIMANTAN SELATAN	1,108,163	139	2,126	16,626	60,565	105,912	130,254	149,886	148,405	142,661	116,624	94,941
23	KALIMANTAN TIMUR	857,269	184	738	11,729	47,962	85,746	109,458	128,371	117,543	109,663	88,533	67,967
24	KALIMANTAN UTARA	1,34,401	22	113	1,980	7,371	13,221	17,65	20,835	19,10	17,757	13,024	9,739
25	SULAWESI UTARA	668,895	156	792	10,467	35,328	52,213	61,323	75,766	83,826	85,851	75,953	60,970
26	SULAWESI TENGAH	771,795	172	1,424	18,404	49,309	74,880	89,162	104,856	97,518	95,217	75,520	60,680
27	SULAWESI SELATAN	2,246,956	548	3,304	38,162	18,212	192,472	245,179	279,422	277,560	229,556	195,392	374,557
28	SULAWESI TENGGARA	647,767	223	864	18,843	18,647	65,038	83,521	87,297	79,398	79,839	60,228	48,729
29	GORONTALO	339,372	62	612	8,524	26,289	37,240	36,543	43,020	43,538	41,564	32,710	26,649
30	SULAWESI BARAT	322,204	78	688	8,178	22,739	33,429	40,161	42,972	40,492	40,660	28,827	22,553
31	MALUKU	357,477	165	4,565	19,415	33,130	45,422	44,502	44,685	41,067	34,156	29,873	53,942
32	MALUKU UTARA	256,496	93	710	6,439	17,163	26,914	34,979	37,308	33,379	29,783	22,278	18,393
33	PAPUA	168,741	222	841	4,099	11,651	18,066	22,661	23,507	20,754	18,830	16,133	13,483
34	PAPUA BARAT	162,463	221	3,543	10,933	17,587	22,846	24,091	24,481	18,559	14,685	11,800	17,677
35	PAPUA SELATAN	88,164	84	185	1,832	5,279	9,395	12,358	13,595	11,046	10,013	7,875	6,577
36	PAPUA TENGAH	160,336	160	541	4,579	12,709	21,384	26,173	25,869	20,164	19,794	12,807	9,625
37	PAPUA PEGUNUNGAN	37	221,825	285	712	6,790	23,393	27,788	35,881	30,896	30,838	15,879	13,962
JUMLAH			29,586	64,000	814,093	3,578,296	6,443,119	8,130,634	9,403,308	8,822,032	8,862,546	7,493,068	6,465,646
TOTAL			71,784,419										115,7488

**LAMPIRAN 2 JUMLAH KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI MENURUT KELOMPOK UMUR
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN**

NO	PROVINSI	JUMLAH KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI	KELOMPOK UMUR											
			< 15	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 +
1	ACEH	105.617	75	399	7.946	51.379	121.389	163.455	167.815	148.615	132.404	93.815	70.031	99.458
2	SUMATERA UTARA	2.848.605	394	1.420	25.404	136.268	290.111	389.553	378.013	352.340	280.687	230.474	323.135	
3	SUMATERA BARAT	1.090.030	114	539	10.165	53.669	101.522	144.006	162.684	150.806	131.593	106.084	88.260	140.588
4	RIAU	1.317.185	117	543	12.708	71.486	145.492	191.929	215.414	188.320	166.647	121.805	90.186	111.538
5	JAMBI	857.109	43	550	11.781	50.907	92.519	118.567	135.231	103.307	103.753	77.731	61.823	86.397
6	SUMATERA SELATAN	1.938.052	166	1.284	24.197	106.920	208.205	275.744	292.990	257.997	227.012	177.866	147.241	218.430
7	BENGKULU	476.030	19	426	6.920	27.501	52.910	65.465	72.307	63.502	55.955	44.576	37.010	49.439
8	LAMPUNG	2.001.146	167	632	16.590	97.437	133.127	257.536	290.990	271.563	248.730	193.143	164.631	266.900
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	353.877	30	530	7.032	22.917	38.652	51.020	57.221	46.528	39.427	29.510	24.206	36.784
10	KEPULAUAN RIAU	410.775	31	222	3.876	22.682	46.534	62.398	73.218	65.082	53.313	33.725	21.998	27.195
11	DKI JAKARTA	1.778.133	9.139	4.821	20.202	89.692	219.851	268.428	254.452	216.395	186.339	135.598	181.343	
12	JAWA BARAT	11.554.461	985	5.321	135.330	708.502	1.237.541	1.449.091	1.655.075	1.516.075	1.444.445	1.211.190	899.575	1.380.733
13	JAWA TENGAH	9.312.082	511	2.792	70.958	451.877	874.151	1.087.749	1.261.315	1.164.999	1.135.339	997.022	859.478	1.406.053
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	94.1656	45	75	8.377	42.006	74.596	116.425	120.425	113.215	117.871	107.206	93.695	174.267
15	JAWA TIMUR	10.111.479	941	5.261	98.322	490.294	864.809	1.117.710	1.314.709	1.217.047	1.132.089	1.113.363	949.188	1.564.808
16	BANTEN	2.547.531	209	1.008	22.808	147.663	302.830	369.342	396.533	350.979	325.037	237.912	176.474	216.732
17	BALI	996.402	97	449	9.403	48.888	88.298	104.921	128.273	104.935	145.826	110.362	82.283	142.169
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.321.786	166	2.415	31.577	95.220	158.150	190.935	194.111	173.059	152.669	107.180	84.559	132.394
19	NUSA TENGGARA TIMUR	959.197	195	685	13.911	54.753	95.253	125.998	134.381	120.685	113.624	94.187	76.046	129.579
20	KALIMANTAN BARAT	1.026.771	141	778	15.182	60.733	141.618	141.950	147.433	139.010	123.424	92.717	73.864	110.981
21	KALIMANTAN TENGAH	529.911	80	669	10.081	34.353	59.921	73.336	84.273	74.407	65.615	46.604	34.591	45.761
22	KALIMANTAN SELATAN	922.394	78	798	14.113	55.236	98.228	120.386	136.293	130.186	119.415	90.561	69.233	87.845
23	KALIMANTAN TIMUR	745.613	101	479	9.916	43.893	80.515	102.940	116.648	105.390	94.919	72.597	52.988	65.877
24	KALIMANTAN UTARA	118.386	11	90	1.655	6.736	25.325	15.888	19.248	17.356	15.590	10.996	10.616	
25	SUAWESI UTARA	564.158	79	552	9.181	32.496	49.485	56.913	69.591	75.542	75.117	63.443	47.944	83.735
26	SUAWESI TENGAH	665.438	97	2.408	33.563	108.889	180.265	227.531	255.301	244.842	245.714	178.071	140.834	232.780
27	SUAWESI SELATAN	1.850.936	298	145	647	10.333	35.512	60.589	77.644	80.377	67.926	47.382	35.729	55.042
28	SUAWESI TENGGARA	541.767	29	455	7.729	24.608	35.007	34.010	38.573	39.337	35.563	25.592	19.716	26.579
29	GORONTALO	287.598	35	543	7.427	21.498	31.572	37.649	39.692	36.204	34.868	22.733	16.599	26.340
30	SUAWESI BARAT	275.160	81	282	4.908	17.936	31.051	42.422	45.747	40.038	35.303	27.483	22.659	36.241
31	MALUKU	304.151	44	609	5.862	16.000	25.454	33.142	34.913	30.563	24.640	18.695	14.673	21.102
32	MALUKU UTARA	227.461	128	497	2.998	9.244	21.899	20.409	18.450	16.348	13.336	10.786	13.793	
33	PAPUA UTARA	142.953	131	316	2.864	9.519	15.722	21.125	18.050	16.011	12.040	9.334	12.903	
34	PAPUA BARAT	138.508	39	106	1.422	4.563	8.356	11.168	12.260	9.784	8.388	5.241	7.382	
35	PAPUA SELATAN	75.776	481	765	3.954	11.507	19.436	19.711	23.647	18.504	18.006	11.480	8.507	8.777
36	PAPUA TENGGAH	144.669	177	456	4.756	12.609	19.242	23.138	32.070	27.970	27.981	18.392	14.666	12.758
37	PAPUA PEGUNUNGAN	194.235	15.619	41.611	701.438	3.321.294	6.078.846	7.620.127	8.661.147	7.971.633	7.622.054	6.054.502	4.324.554	7.617.452
JUMLAH		60.633.877	15.619	41.611	701.438	3.321.294	6.078.846	7.620.127	8.661.147	7.971.633	7.622.054	6.054.502	4.324.554	7.617.452

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

**LAMPIRAN 3 JUMLAH KEPALA KELUARGA PEREMPUAN MENURUT KELompOK UMUR
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHRan**

NO	PROVINSI	JUMLAH KEPALA KELUARGA PEREMPUAN	KELompOK UMUR											
			< 15	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65+
1	JACAEH	232.515	81	268	1.753	4.335	7.320	12.217	16.995	22.618	28.092	30.638	30.976	77.304
2	SUMATERA UTARA	656.005	360	926	4.894	11.901	18.611	28.881	41.115	68.847	83.722	94.534	231.418	
3	SUMATERA BARAT	222.866	82	290	1.397	3.595	5.304	8.831	13.458	18.323	23.405	28.263	31.374	88.364
4	RIAU	185.039	101	327	1.916	4.590	7.048	9.851	14.111	17.933	23.256	26.097	26.859	52.995
5	JAMBI	126.010	32	213	1.287	2.752	3.908	5.674	8.503	11.059	14.636	17.435	18.652	41.859
6	SUMATERA SELATAN	273.041	153	481	2.893	6.380	9.501	14.448	18.832	23.908	29.618	36.067	38.578	92.182
7	BENGKULU	67.129	22	127	808	1.739	2.433	4.577	5.774	7.371	8.764	9.477	22.795	
8	LAMPUNG	266.072	147	350	1.553	4.329	6.794	10.101	14.953	21.377	28.289	34.965	39.414	103.801
9	KEPUJUAN BANGKA BELITUNG	64.160	20	182	1.051	1.883	2.392	3.437	4.577	6.572	7.392	8.539	22.572	
10	KEPUJUAN RIAU	58.441	22	121	854	1.940	2.658	4.127	6.638	7.795	7.692	6.886	6.340	13.266
11	DKI JAKARTA	508.659	8.805	4.764	10.643	15.957	19.613	26.119	40.270	49.471	61.766	67.095	68.471	135.639
12	JAWA BARAT	2.184.393	910	3.044	7.028	11.111	17.947	20.580	24.305	27.349	28.999	29.459	29.459	
13	JAWA TENGAH	1.636.944	391	1.534	9.722	27.915	43.267	61.434	94.306	123.316	168.689	210.507	235.100	660.313
14	DAERAH ISTIMEWA YOGAKARTA	181.978	52	2415	2.415	2.572	3.219	4.914	8.038	11.155	16.695	21.614	24.860	85.850
15	JAWA TIMUR	2.025.656	2.922	14.340	33.423	49.006	73.671	112.291	152.205	215.282	262.300	291.345	317.282	
16	BANTEN	414.106	197	613	4.315	11.556	17.936	24.419	34.909	44.079	55.071	59.088	57.473	104.750
17	BALI	102.967	77	142	579	1.205	1.830	2.941	5.343	8.251	11.761	13.078	12.980	44.780
18	NUSA TENGGARA BARAT	270.461	159	643	3.087	6.023	9.463	15.189	21.851	26.937	32.257	34.510	35.159	85.147
19	NUSA TENGGARA TIMUR	168.215	192	367	2.051	4.972	6.623	8.798	11.472	14.362	18.034	21.494	22.138	57.733
20	KALIMANTAN BARAT	144.994	113	322	2.127	4.936	6.897	9.092	11.749	13.446	16.350	17.647	19.403	42.912
21	KALIMANTAN TENGAH	73.012	54	250	2.137	2.771	3.616	5.646	7.072	8.733	9.458	9.576	20.311	
22	KALIMANTAN SELATAN	185.869	61	418	2.513	5.329	7.684	9.968	13.539	18.219	22.244	26.063	25.688	53.089
23	KALIMANTAN TIMUR	111.566	83	259	1.813	4.069	5.231	7.168	9.723	12.153	14.744	16.036	14.979	25.398
24	KALIMANTAN UTARA	16.015	11	240	3.357	6.35	8.96	1.177	1.587	3.075	2.028	1.864	3.658	
25	SULAWESI UTARA	104.737	77	240	1.286	2.832	3.748	4.410	6.075	8.284	10.734	12.510	13.026	41.515
26	SULAWESI TENGAH	106.357	75	315	1.845	4.304	4.179	5.408	7.449	9.390	12.331	13.860	14.152	33.949
27	SULAWESI SELATAN	396.660	250	4553	9.323	12.599	17.658	24.171	32.925	45.981	51.588	54.558	141.787	
28	SULAWESI TENGGARA	101.000	78	217	1.410	3.135	4.449	5.877	9.057	11.913	12.846	13.000	31.768	
29	GORONTALO	51.774	33	157	795	1.681	2.233	2.533	3.663	4.965	6.001	6.718	6.933	16.042
30	SULAWESI BARAT	47.004	43	145	751	1.420	1.857	2.512	3.280	4.288	5.792	6.094	5.954	14.908
31	MAULUKU	53.226	84	182	1.479	2.079	3.000	3.755	4.647	6.764	6.673	7.214	17.701	
32	MAULUKU UTARA	29.035	49	101	577	1.163	1.460	1.837	2.395	2.818	3.379	3.583	3.720	7.755
33	PAPUA	25.959	94	344	1.101	1.919	2.187	2.257	2.438	2.504	2.453	2.797	2.697	
34	PAPUA BARAT	23.955	90	182	679	1.414	1.865	2.353	2.401	2.441	2.548	2.645	2.466	4.864
35	PAPUA SELATAN	12.588	45	79	610	716	1.039	1.190	1.336	1.252	1.275	1.358	1.336	2.541
36	PAPUA TENGAH	15.567	60	108	625	1.402	1.948	2.047	2.222	1.660	1.778	1.327	1.118	1.292
37	PAPUA PEGUNUNGAN	27.590	108	256	2.034	3.695	4.157	3.811	2.926	3.702	3.647	1.193	1.204	
JUMLAH		11.151.542	14.067	22.389	112.655	255.902	364.273	510.507	741.561	950.399	1.240.392	1.438.566	1.541.095	3.960.016

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

LAMPIRAN 4 JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TERAKHIR PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINSI	JUMLAH KEPALA KELUARGA	TIDAK SEKOLAH		TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT		TAMAT SD/SEDERAJAT		TAMAT SUTA/SEDERAJAT		TAMAT PT/PTK/AKADEMI	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	ACEH	1.289.133	11.707	0.91	65.793	5.1	371.040	28.78	252.538	19.53	445.453	34.55
2	SUMATERA UTARA	3.484.610	1.58	4.395	16.611.13	47.1	887.213	25.46	738.508	21.19	1.386.346	39.78
3	SUMATERA BARAT	1.313.116	16.470	1.25	139.883	10.65	376.623	28.68	250.939	19.11	400.058	30.47
4	RIAU	1.502.224	26.121	1.74	85.634	5.7	465.737	31	287.428	19.13	504.492	33.58
5	JAMBI	1.17	11.520	72.44	7.37	166.803	7.54	847.993	34.64	189.926	19.32	
6	SUMATERA SELATAN	2.211.093	27.399	1.24	180.803	8.02	403.313	18.24	612.988	27.72	103.461	15.25
7	BENGKULU	543.159	1.95	40.680	7.49	175.445	32.3	103.461	19.05	157.641	29.02	
8	LAMPUNG	2.267.218	22.393	0.98	132.249	5.86	890.313	39.22	519.114	22.5	737.997	32.39
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4.18.237	5.567	1.33	32.933	7.87	173.067	41.38	64.949	15.53	110.097	26.32
10	KEPULAUAN RIAU	6.846.16	22.667	4.84	22.744	6.99	91.307	19.48	59.613	12.72	214.211	45.71
11	DKI JAKARTA	2.265.822	20.554	0.92	44.155	1.93	333.167	14.57	349.016	15.26	1.113.800	48.71
12	JAWA BARAT	13.738.854	174.064	1.27	543.131	3.95	5.607.610	40.82	2.333.867	16.99	3.843.555	27.98
13	JAWA TENGAH	10.948.76	21.324	1.94	770.688	7.04	4.605.352	42.06	2.138.051	22.41	4.53.986	21.76
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	11.23.634	39.365	3.55	56.464	5.03	263.903	23.49	193.183	17.19	404.186	35.97
15	YOGYAKARTA TIMUR	12.143.745	392.307	3.32	1.092.244	9	4.495.452	37.02	2.172.527	17.89	3.067.658	25.26
16	BANTEN	2.961.637	30.964	1.05	120.361	4.06	999.975	33.76	530.096	17.9	960.936	33.46
17	BALI	1.099.369	31.672	2.88	62.604	5.63	302.009	27.47	141.342	12.86	408.045	37.12
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.532.241	138.137	8.58	198.855	12.19	480.874	30.2	246.905	15.51	382.454	24.02
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1.127.412	40.775	3.62	168.174	14.92	450.271	39.94	131.748	11.69	232.862	20.65
20	KALIMANTAN BARAT	1.171.765	41.163	4.11	145.670	11.16	455.573	37.17	188.090	16.94	217.418	23.33
21	KALIMANTAN TENGAH	602.501	7319	1.21	44.761	7.43	213.976	35.51	120.116	19.94	163.330	27.11
22	KALIMANTAN SELATAN	1.108.163	17.131	1.55	9.129	8.24	412.184	37.72	201.835	18.21	289.397	26.12
23	KALIMANTAN TIMUR	2.097.269	12.635	1.47	52.725	16.54	265.163	24.05	146.543	17.09	341.426	38.83
24	KALIMANTAN UTARA	134.401	3.813	2.84	13.002	9.67	37.298	27.75	22.795	16.96	42.594	31.69
25	SULAWESI UTARA	658.895	3.446	0.32	43.313	6.58	173.387	25.92	142.796	21.35	246.404	36.84
26	SULAWESI TENGAH	771.795	14.103	1.83	54.141	7.04	299.003	38.74	133.633	17.31	207.308	26.16
27	SULAWESI SELATAN	2.246.956	99.562	4.12	231.381	10.3	772.542	34.38	323.288	14.39	595.702	26.51
28	SULAWESI TENGGARA	642.767	19.306	3.1	51.895	8.01	190.795	29.68	105.929	16.48	196.356	30.55
29	GORONTALO	339.372	2.518	0.74	56.199	16.54	138.844	40.91	38.954	11.48	75.060	22.12
30	SULAWESI BARAT	3.22.204	14.011	4.35	40.884	12.69	123.101	38.21	46.760	14.51	69.649	21.62
31	MAULUKU	357.477	4.408	1.23	19.359	5.24	91.769	25.65	59.440	16.63	142.522	38.87
32	MAULUKU UTARA	2.456.96	3.027	1.18	20.327	7.92	69.955	27.27	45.316	17.67	91.361	35.62
33	PAPUA	168.747	6.880	4.08	11.427	6.77	25.675	15.22	27.422	16.25	75.649	44.83
34	PAPUA BARAT	162.463	10.267	6.32	16.604	10.22	29.188	17.97	27.020	16.63	57.249	35.24
35	PAPUA SELATAN	88.164	8.399	5.53	12.001	13.61	24.115	13.591	15.42	24.390	27.76	5.668
36	PAPUA TENGAH	160.336	55.241	34.45	25.040	15.62	24.308	15.16	18.950	11.82	27.525	17.17
37	PAPUA Pegunungan	221.825	114.192	51.48	40.192	18.12	24.505	31.05	15.765	7.11	21.123	9.52
JUMLAH		7.728.419	1.728.365	4.82	4.352.381	8.52	25.460.225	30.21	12.794.777	16.70	20.518.536	30.23
TOTAL											6.338.705	9.52

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

LAMPIRAN 6 JUMLAH INDIVIDU DALAM KELUARGA MENURUT KESERTAAN DALAM JAMINAN KESEHATAN

KESEHATAN PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINSI	JUMLAH INDIVIDU DALAM KELUARGA	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			JUMLAH MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN	JUMLAH TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
			BPS - NON IKN	IKN	BPS - NON IKN		
1	ACEH	4.647.910	3.887.426	84,7%	684.485	14.911	17.584
2	SUMATERA UTARA	4.667.339	4.667.339	100%	2.866.629	36.16	392.766
3	SUMATERA BARAT	4.734.654	2.050.221	62.99	1.098.449	33.75	105.913
4	RIAU	5.457.308	1.776.559	54,67	1.228.597	37,78	242.852
5	JAMBI	917.105	917.105	100%	836.925	85.122	6.63
6	SUMATERA SELATAN	7.537.773	2.873.773	36,33	1.260.358	29,09	198.390
7	BENGKULU	1.819.634	756.635	43,91	468.053	36,55	56.846
8	LAMPUNG	3.152.866	3.152.866	100%	1.187.740	35,54	158.971
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.347.157	479.652	48,23	481.703	48,43	33.187
10	KEPULAUAN RIAU	1.677.941	60.69	3.712.47	52,36	97.079	6.95
11	DKI JAKARTA	6.864.387	4.777.766	69,6	2.009.836	29,27	77.455
12	JAWA BARAT	44.537.748	16.060.943	36,1	11.754.812	39,32	1.311.281
13	JAWA TENGAH	34.840.731	15.506.196	45,6	7.538.267	31,95	547.633
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1.879.834	64,6	957.942	31,92	72.395	2.49
15	JAWA TIMUR	36.636.552	13.797.940	63,54	7.131.813	32,24	786.342
16	BANTEN	10.194.831	3.444.019	49,77	3.100.073	44,41	406.601
17	BALI	3.660.177	2.109.886	65,2	1.036.587	32,09	83.338
18	NUSA TENGGARA BARAT	5.115.766	2.261.364	75,22	685.714	22,81	59.301
19	NUSA TENGGARA TIMUR	34.526.358	8.238	534.581	16,71	29.205	0,91
20	KALIMANTAN BARAT	4.088.781	1.420.554	35,03	800.893	34,85	61,12
21	KALIMANTAN TENGAH	2.012.674	751.386	59,07	465.152	36,56	55.590
22	KALIMANTAN SELATAN	3.556.053	1.245.298	60,28	1.284.755	34,39	128.475
23	KALIMANTAN TIMUR	2.998.398	970.926	38,7	1.386.331	55,26	151.620
24	KALIMANTAN UTARA	503.112	231.400	52,37	194.133	44,44	11.304
25	SULAWESI UTARA	2.124.153	2.659.639	1.407.524	50.28	506.141	25,59
26	SULAWESI TENGAH	7.824.533	4.516.655	70,39	1.786.972	27,85	113.147
27	SULAWESI SELATAN	2.362.831	1.315.891	74,13	411.649	23,19	47.597
28	SULAWESI TENGGARA	1.123.291	723.580	77,35	200.168	21,4	11.705
29	GORONTALO	1.210.904	750.849	74,83	234.358	23,41	17.695
30	SULAWESI BARAT	1.386.191	524.413	70,76	220.402	21,15	16.949
31	MAULU	1.182.884	66.93	514.511	29.11	389.863	3.95
32	MAULU UTARA	930.050	366.136	1.413.525	25,71	33.751	1,73
33	PAPUA	604.033	7.824.533	77,38	1.786.972	113.147	1.416.774
34	PAPUA BARAT	597.321	370.231	80,28	83.868	18,19	7.047
35	PAPUA SELATAN	316.938	222.017	87,01	33.975	12,22	2.147
36	PAPUA TENGAH	480.852	177.122	69,68	67.222	26,45	2.147
37	PAPUA PEGUNTINGAN	550.213	223.524	82,28	40.322	14,21	9.752
	JUMLAH TOTAL	215.291.923	100.277.544	65,79	53.102.267	30,68	5.622.266
						3,33	159.457.079
							71,15
							75.845.844
							28,15

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

LAMPIRAN 7 JUMLAH WANITA KAWIN (10-49 TAHUN) MENURUT KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINSI	JUMLAH WANITA KAWIN	KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN													
			JUMLAH 10 - 14		JUMLAH 15 - 19		JUMLAH 20 - 24		JUMLAH 25 - 29		JUMLAH 30 - 34		JUMLAH 35 - 39		JUMLAH 40 - 44	
%	JUMLAH	%	%	JUMLAH	%	%	JUMLAH	%	%	JUMLAH	%	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	ACEH	774.764	3.7	0	1.205	0.16	4.459	14.75	163.017	2.04	158.855	20.5	127.530	18.46		
2	SUMATERA UTARA	1.311.856	9.3	0.01	3.010	0.17	67.481	3.73	231.046	12.75	353.376	19.5	404.769	22.34		
3	SUMATERA BARAT	715.462	3.0	1.902	0.27	29.576	4.1	96.735	13.75	134.229	18.74	159.072	22.2			
4	RIAU	934.983	56	0.01	1.806	0.19	37.754	3.98	124.078	13.21	201.04	210.687	22.53	207.772	22.22	
5	JAMBI	603.523	43	0.01	2.876	0.48	35.396	5.86	86.787	14.38	116.145	19.58	289.801	22.15		
6	SUMATERA SELATAN	1.301.610	114	0.01	4.914	0.38	66.656	5.14	177.393	13.63	256.213	19.58	289.801	21.17		
7	BERGKULU	323.718	30	0.01	1.522	0.47	17.380	5.3	44.682	13.39	64.893	20.05	68.860	21.37		
8	LAMPUNG	1.302.519	95	0.01	2.402	0.17	56.079	4.31	177.453	13.63	254.644	19.32	284.195	21.67		
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	237.710	20	0.01	1.624	0.68	15.894	13.98	45.895	19.32	13.98	51.910	21.64	284.195	16.19	
10	KEPULAUAN RIAU	303.582	16	0.01	572	0.19	9.177	3.02	36.384	11.98	56.564	18.63	68.713	22.53		
11	DKI JAKARTA	965.274	222	0.02	896	0.09	25.844	2.68	118.135	12.27	181.378	18.84	209.237	21.73		
12	JAVA BARAT	7.797.746	387	0.01	24.814	0.33	43.735	5.77	170.405	15.44	1461.659	19.28	1.389.857	19.66		
13	JAVA TENGAH	563.208	138	0	9.819	0.16	25.079	4.55	43.454	14.62	1.085.089	17.49	1.076.743	19.12		
14	DARAH ISLAMINA YOGAKARTA	503.720	8	0	555	0.11	15.894	3.16	65.748	13.05	93.132	18.49	103.722	20.59		
15	JAVA TIMUR	6.003.106	360	0.01	17.453	0.29	29.939	5	848.624	14.14	1.085.747	18.1	1.319.554	20.32		
16	BANTEN	1.919.921	115	0.01	3.833	0.21	83.359	4.58	269.464	14.81	376.212	20.67	381.086	20.94		
17	BALI	577.036	29	0.01	1.277	0.22	23.3781	4.24	77.114	13.36	105.177	18.2	111.267	19.28		
18	NUSA TENGGARA BARAT	916.596	113	0.01	8.739	0.59	75.555	8.24	176.062	19.21	191.035	20.64	181.333	18.94		
19	NUSA TENGGARA TIMUR	617.326	66	0.01	1.981	0.32	32.714	5.3	83.402	13.51	116.958	18.95	139.940	22.02		
20	KALIMANTAN BARAT	693.459	73	0.01	3.348	0.48	41.729	5.96	97.463	14.07	134.303	14.07	147.022	21.23		
21	KALIMANTAN TENGAH	373.183	71	0.02	2.680	0.72	25.189	6.75	52.576	14.08	73.306	19.54	78.430	21.02		
22	KALIMANTAN SELATAN	622.940	52	0.01	2.834	0.45	36.382	5.84	85.734	13.76	121.710	19.54	129.354	20.77		
23	KALIMANTAN TIMUR	510.306	49	0.01	1.472	0.29	23.744	4.65	46.552	13.61	99.552	15.91	111.435	21.17		
24	KALIMANTAN UTARA	82.790	5	0.01	4.000	0.48	4.461	5.15	11.060	13.36	15.641	18.89	18.042	21.19		
25	SULAWESI UTARA	314.554	43	0.01	1.751	0.56	19.562	6.16	44.791	14.24	24.585	17.64	57.425	18.26		
26	SULAWESI TENGAH	348.479	47	0.01	3.982	0.51	41.429	7.87	63.813	14.55	80.092	19.57	91.125	21.15		
27	SULAWESI SELATAN	1.175.316	181	0.02	8.360	0.71	76.459	6.51	161.484	13.74	213.566	18.17	240.379	20.45		
28	SULAWESI TENGGARA	370.061	121	0.03	2.660	0.71	26.222	7.03	53.947	14.46	71.845	12.96	78.901	21.11		
29	GOLONTALO	190.418	24	0.01	1.605	0.84	15.724	8.26	31.888	16.75	36.126	19.23	33.563	17.63		
30	SULAWESI BARAT	195.834	30	0.02	2.284	1.17	16.988	8.67	31.319	15.99	36.730	18.76	39.039	19.93		
31	MALUKU UTARA	479.783	42	0.02	1.022	0.53	9.595	4.93	25.126	12.81	18.416	20.46	22.11	22.62		
32	MALUKU UTARA	155.591	26	0.02	665	0.33	8.878	5.71	21.219	13.64	29.443	18.92	34.322	22.06		
33	PAPUA	88.866	44	0.05	344	0.39	4.452	5.01	11.694	13.16	17.870	20.11	20.069	22.58		
34	PAPUA BARAT	89.246	43	0.05	508	0.57	5.042	5.61	17.775	19.92	19.662	18.973	21.26	14.048		
35	PAPUA SELATAN	49.998	30	0.06	246	0.49	3.714	6.43	6.612	13.22	10.215	20.43	11.307	22.51		
36	PAPUA TENGGARAK	88.114	63	0.07	444	0.54	4.741	5.461	11.712	18.046	20.265	17.91	19.680	22.85		
37	PAPUA PEGUNUNGAN	102.641	44	0.04	274	0.27	4.407	2.07	9.75	17.56	17.08	20.03	27.738	20.95		
JUMLAH		38.660.695	2.960	0.01	124.985	0.32	1.979.832	5.12	5.155.994	14.27	7.397.553	19.13	8.018.354	20.74		
Sumber:	Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran												8.393.394	21.71	7.227.033	18.69

LAMPIRAN 8 JUMLAH PUS MENURUT UMUR KAWIN PERTAMA PENDAATAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINSI	JUMLAH PUS	PEREMPLIAN			LAKI-LAKI		
			< 19 TAHUN		> 19 TAHUN	< 25 TAHUN		> 25 TAHUN
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	JABODETABEK	774.727	108.974	14.07	665.753	85.93	220.205	28.42
2	SUMATERA UTARA	1.811.763	230.437	12.72	1.581.326	87.28	789.948	43.6
3	SUMATERA BARAT	716.332	101.024	14.1	615.408	85.9	251.254	35.07
4	RIAU	934.927	162.962	17.43	771.965	82.57	392.423	41.97
5	JAMBI	603.180	165.087	27.36	438.393	72.64	295.579	48.98
6	SUMATERA SELATAN	1.301.196	326.520	25.09	974.976	74.91	689.499	52.98
7	BENGKULU	233.688	81.945	35.02	241.743	74.68	152.895	52.58
8	LAMPUNG	1.302.224	261.579	20.08	1.040.845	79.92	600.645	46.12
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	237.690	61.318	25.8	176.372	74.2	176.404	53.18
10	REPUBLIKAN RIAU	303.566	31.055	10.23	272.511	89.77	32.24	205.634
11	DEI JAKARTA	962.502	85.370	8.87	877.132	91.13	287.065	29.82
12	JAVA BARAT	2.276.104	291.29	13.09	2.359.255	70.71	3.909.143	51.58
13	JAWA TENGAH	5.631.070	1.203.328	21.13	4.427.747	78.63	4.213.244	42.86
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	503.712	50.685	10.06	453.027	89.94	172.812	34.31
15	JAWA TIMUR	6.002.446	1.505.904	25.09	4.496.842	74.91	2.778.105	46.28
16	BANTEN	1.819.806	385.17	21.2	1.434.089	78.78	870.544	47.84
17	BAJU	577.007	71.591	12.41	505.416	87.58	719.994	42.11
18	NUSA TENGGARA BARAT	916.833	236.711	25.83	679.772	74.17	497.483	53.74
19	NUSA TENGGARA TIMUR	617.160	82.979	13.44	534.281	86.56	391.83	371.41
20	KALIMANTAN BARAT	692.992	182.857	26.41	509.535	73.58	358.008	51.71
21	KALIMANTAN TENGAH	331.12	123.459	33.09	249.653	66.91	70.588	54.62
22	KALIMANTAN SELATAN	622.888	196.701	31.9	424.187	68.1	337.357	54.16
23	KALIMANTAN TIMUR	510.257	107.370	21.04	402.887	78.96	217.510	42.63
24	KALIMANTAN UTARA	82.785	19.954	24.1	62.831	75.9	30.053	41.13
25	SULAWESI UTARA	314.511	72.159	23.59	243.448	77.41	166.735	53.02
26	SULAWESI TENGAH	438.332	129.842	29.62	308.590	70.38	234.294	53.44
27	SULAWESI SELATAN	1.175.335	299.648	25.5	875.487	74.5	576.041	49.02
28	SULAWESI TENGGARA	372.940	106.219	28.48	266.721	71.52	190.524	51.69
29	GORONTALO	190.94	50.908	26.74	139.486	73.26	112.812	59.52
30	SULAWESI BARAT	195.804	58.358	29.8	137.446	70.2	100.982	51.57
31	MALUKU	196.141	31.234	15.88	165.507	84.12	94.115	47.84
32	MALUKU UTARA	155.665	31.808	20.45	123.757	79.55	83.430	53.63
33	PAPUA	88.822	16.606	18.7	72.216	81.3	39.479	44.45
34	PAPUA BARAT	89.203	18.144	20.34	71.059	79.66	42.411	47.54
35	PAPUA SELATAN	49.668	13.806	27.63	36.162	73.37	26.144	52.32
36	PAPUA TENGAH	86.051	22.805	26.5	63.246	73.5	52.056	60.49
37	PAPUA PEGUNINGAN	102.97	20.364	19.85	82.23	80.15	68.93	51.87
	JUMLAH TOTAL	38.657.735	8.876.431	22.96	29.781.304	77.04	17.987.346	46.53
								20.670.189
								53.47

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

**LAMPIRAN 9 JUMLAH PUS MENURUT ANAK LAHIR HIDUP
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN**

NO	PROVINSI	JUMLAH PUS	JUMLAH ANAK LAHIR HIDUP			JUMLAH ANAK LAKI-LAKI LAHIR HIDUP			JUMLAH ANAK PEREMPUAN LAHIR HIDUP			
			0 ANAK	1 ANAK	2 ANAK	> 2 ANAK	0 ANAK	1 ANAK	2 ANAK	> 2 ANAK	0 ANAK	1 ANAK
1	ACEH	774.727	73.247	184.35	227.267	289.978	232.866	302.114	164.53	75.224	260.019	299.596
2	SUMATERA UTARA	1.811.763	15.079	319.883	563.350	717.054	501.616	715.181	408.152	186.814	568.679	713.278
3	SUMATERA BARAT	716.432	55.557	237.740	237.740	205.542	227.719	166.559	71.472	207.774	293.836	369.025
4	RIAU	934.927	75.512	220.515	321.544	317.356	276.785	383.627	197.209	77.306	307.167	384.474
5	JAMBI	603.480	43.981	160.645	231.079	181.775	188.069	259.189	119.518	36.724	207.660	288.956
6	SUMATERA SELATAN	1.301.496	85.842	333.187	516.013	365.834	385.960	568.985	266.121	80.430	437.358	585.572
7	BENGKULU	323.688	20.650	81.949	132.824	88.315	96.738	141.280	66.630	19.040	108.184	140.551
8	LAMPUNG	1.302.424	73.963	314.738	541.507	366.216	388.445	584.705	254.040	65.734	449.875	570.780
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	237.650	17.439	63.600	92.285	63.366	74.014	102.64	47.554	13.478	83.416	101.652
10	KEPULAUAN RIAU	303.566	30.367	74.179	105.851	92.159	96.814	124.653	61.611	20.506	107.792	124.121
11	DK JAKARTA	962.507	70.402	222.665	390.335	278.700	408.533	241.973	201.049	58.855	317.816	408.934
12	JAWA BARAT	7.579.359	55.949	216.450	234.332	191.773	241.113	326.413	1.488.895	433.688	675.682	322.319
13	JAWA TENGAH	5.631.070	367.609	1.678.04	2.497.962	1.087.195	1.847.669	2.508.954	1.053.346	221.101	2.028.995	2.472.673
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	503.712	41.941	164.54	219.330	179.839	222.324	195.540	217.273	78.110	127.89	177.954
15	JAWA TIMUR	6.002.746	451.765	2.063.32	2.348.560	943.043	2.113.88	2.658.176	1.014.639	1.883.03	2.03.131	2.635.456
16	BANTEN	1.819.806	128.494	535.579	698.035	457.658	566.971	790.315	348.358	103.162	643.690	771.167
17	BALI	577.007	49.220	148.110	241.097	138.580	169.712	269.100	117.661	20.563	219.100	233.395
18	NUSA TENGGARA BARAT	915.483	74.158	264.333	316.153	293.456	394.092	171.779	52.156	330.664	382.187	49.654
19	NUSA TENGGARA TIMUR	611.260	45.301	131.365	164.900	215.634	160.323	233.773	141.050	82.114	183.603	230.854
20	KALIMANTAN BARAT	692.392	48.389	180.213	261.532	202.258	207.87	269.274	180.292	48.039	233.175	292.559
21	KALIMANTAN TENGAH	373.112	33.98	104.589	140.051	96.054	120.504	157.997	127.22	33.947	155.88	64.079
22	KALIMANTAN SELATAN	622.888	53.574	17.942	244.121	147.251	204.850	266.361	118.554	33.123	229.909	261.009
23	KALIMANTAN TIMUR	510.257	44.301	120.183	184.167	161.406	155.821	208.983	106.917	35.836	174.733	207.881
24	KALIMANTAN UTARA	82.795	18.307	26.09	31.183	18.059	32.240	8.498	17.02	3.255	16.529	6.987
25	SULAWESI UTARA	314.511	22.952	93.392	121.376	93.971	99.424	13.98	59.611	17.478	113.194	134.466
26	SULAWESI TENGAH	438.432	39.264	105.487	144.133	19.548	131.839	175.627	90.789	40.157	147.644	174.276
27	SULAWESI SELATAN	1.175.135	59.143	288.901	383.395	288.796	355.569	459.578	230.019	105.756	392.586	470.404
28	SULAWESI TENGGARA	291.139	79.388	111.434	183.079	102.721	133.550	83.018	45.651	114.763	144.392	35.787
29	GORONTALO	190.394	17.456	52.074	66.573	54.291	61.654	79.212	36.603	12.925	67.445	78.388
30	SULAWESI BARAT	195.804	16.556	44.810	58.931	77.507	56.045	73.686	41.666	24.407	62.341	74.563
31	MALUKU	176.747	14.727	43.521	54.882	33.611	52.350	75.548	44.156	24.687	59.257	75.838
32	MAULUKUTARA	155.565	12.781	40.335	47.295	55.154	45.290	63.792	32.043	14.440	51.385	62.525
33	PAPUA	88.823	12.301	23.227	23.629	29.655	29.571	32.893	16.930	9.427	33.968	31.839
34	PAPUA BARAT	89.203	10.164	24.549	33.551	33.316	18.381	30.396	31.040	32.887	17.115	8.461
35	PAPUA SELATAN	49.968	5.565	11.553	14.164	17.956	14.903	19.174	10.056	5.795	17.760	18.815
36	PAPUA TENGAH	86.051	22.559	26.503	20.138	16.831	36.961	32.378	12.077	4.635	46.126	26.675
37	PAPUA PEGUNUNGAN	102.597	34.337	41.943	87.897	53.536	57.588	2.126	65.201	30.998	5.257	1.321
TOTAL		38.657.755	2.956.82	10.866.413	1.497.000	9.884.940	12.282.612	16.987.495	7.502.381	2.290.231	13.602.294	16.333.54

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

LAMPIRAN 10 JUMLAH PUS MENURUT ANAK MASHI HIDUP PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINSI	JUMLAH PUS	JUMLAH ANAK MASHI HIDUP			JUMLAH ANAK LAKI-LAKI MASHI HIDUP			JUMLAH ANAK PEREMPUAN MASHI HIDUP		
			0 ANAK	1 ANAK	> 2 ANAK	0 ANAK	1 ANAK	> 2 ANAK	0 ANAK	1 ANAK	> 2 ANAK
1	JADEH	774.727	76.090	186.031	228.584	284.022	236.396	302.755	162.914	22.222	299.874
2	SUMATERA UTARA	566.851	158.214	382.253	704.445	309.372	717.052	404.759	575.687	714.367	365.477
3	SUMATERA BARAT	716.442	57.610	151.319	258.933	268.290	208.491	28.453	155.403	223.420	294.550
4	RIAU	934.927	78.167	222.823	310.512	280.337	384.638	195.098	74.454	310.783	384.936
5	JAMBI	603.480	46.028	162.981	238.599	155.874	259.800	117.728	34.603	210.580	258.829
6	SUMATERA SELATAN	1.301.496	90.401	337.389	518.374	355.332	392.378	567.790	262.695	76.633	443.220
7	BENGKULU	323.668	21.549	83.011	134.011	85.117	98.319	141.801	65.598	17.970	109.915
8	LAMPUNG	1.302.424	77.795	379.792	549.706	296.131	404.099	587.786	250.592	61.947	455.400
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	237.690	18.001	64.250	95.647	59.572	74.843	102.872	47.025	12.950	84.270
10	KEPULAUAN RIAU	303.566	31.000	74.608	107.159	90.799	97.661	124.664	61.269	19.972	108.630
11	DKI JAKARTA	962.502	74.249	226.031	393.322	260.900	299.262	410.040	55.611	32.214	408.869
12	JAWA BARAT	7.579.359	581.192	2.193.029	2.956.423	1.848.715	2.452.875	3.270.746	1.445.823	409.915	2.713.612
13	JAWA TENGAH	5.631.070	386.590	1.705.498	2.506.493	1.032.489	1.878.714	2.513.144	1.033.513	205.699	2.057.029
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	503.712	205	166.229	219.592	74.686	181.844	222.408	85.063	14.397	197.268
15	JAWA TIMUR	6.002.748	473.814	2.088.547	2.546.123	884.722	2.144.650	2.683.086	995.280	175.722	2.332.120
16	BANTEN	1.819.806	135.358	540.054	669.387	445.007	585.779	790.320	344.034	99.673	651.154
17	BALI	577.007	50.443	149.219	242.203	135.142	171.487	265.654	19.470	116.396	220.833
18	NUSA TENGGARA BARAT	916.483	78.282	269.373	339.201	229.627	300.566	39.634	172.742	47.841	336.625
19	NUSA TENGGARA TIMUR	617.260	47.050	132.864	165.556	271.990	162.993	234.892	139.763	79.612	186.126
20	KALIMANTAN BARAT	692.392	50.634	263.025	263.046	196.687	297.033	158.474	85.802	236.119	292.867
21	KALIMANTAN TENGAH	373.112	33.422	105.325	140.469	93.896	121.823	156.219	71.609	21.465	137.099
22	KALIMANTAN SELATAN	622.888	55.425	180.070	245.558	142.135	207.867	266.910	116.928	31.183	232.601
23	KALIMANTAN TIMUR	510.257	45.784	121.167	184.932	158.374	157.743	209.200	105.974	37.340	176.496
24	KALIMANTAN UTARA	32.785	7.381	8.418	26.228	30.178	24.241	32.29	17.934	8.313	27.229
25	SULAWESI UTARA	314.511	24.164	94.632	121.709	74.006	101.201	136.185	58.525	16.600	114.840
26	SULAWESI TENGAH	438.422	41.150	107.506	145.546	144.330	134.991	176.678	89.174	150.444	126.447
27	SULAWESI SELATAN	1.175.135	103.051	293.297	391.079	387.078	362.888	471.542	239.743	101.662	398.276
28	SULAWESI TENGGARA	372.940	30.318	80.491	112.563	149.568	104.751	144.382	82.188	41.619	116.532
29	GORONTALO	190.394	18.262	53.351	67.201	51.580	63.210	79.683	35.747	11.754	68.762
30	SULAWESI BARAT	195.804	17.217	45.548	57.575	75.464	57.198	74.451	41.140	23.015	63.325
31	WALUKE	196.741	15.565	43.766	54.997	82.413	53.324	75.640	43.763	24.014	60.161
32	MALUKU UTARA	155.565	13.257	40.701	47.388	46.003	46.019	33.991	31.680	13.896	52.254
33	PAPUA	88.827	12.609	23.290	23.594	29.329	29.886	32.881	16.804	9.251	34.271
34	PAPUA BARAT	89.203	10.949	20.558	24.503	33.193	27.457	33.311	18.239	10.196	31.347
35	PAPUA SELATAN	49.968	5.701	11.690	14.800	17.771	15.058	19.180	10.011	5.741	17.417
36	PAPUA TENGAH	86.051	23.150	26.403	19.962	16.538	37.474	32.180	11.909	4.433	46.578
37	PAPUA PEGUNUNGAN	102.591	34.655	42.186	18.138	7.618	53.988	39.147	7.450	2.012	65.446
JUMLAH TOTAL		38.657.735	3.067.738	11.004.725	15.029.227	9.556.045	12.481.016	16.612.466	7.390.556	2.173.637	13.834.073
											16.340.931
											6.704.580
											1.778.141

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

**LAMPIRAN 11 JUMLAH PUS MENURUT ANAK IDEAL YANG DIINGINKAN
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN**

NO	PROVINSI	JUMLAH PUS	JUMLAH ANAK IDEAL YANG DINGGINKAN			> 2 ANAK
			0 ANAK	1 ANAK	2 ANAK	
1	ACEH	774.727	2.958	8.922	202.049	560.798
2	SUMATERA UTARA	1.811.763	8.624	33.393	809.054	960.655
3	SUMATERA BARAT	716.432	1.549	8.510	310.958	395.395
4	RIAU	934.927	2.941	15.288	467.976	448.723
5	JAMBI	603.480	1.592	8.570	334.629	238.085
6	SUMATERA SELATAN	1.301.496	4.356	24.578	765.568	506.994
7	BENGKULU	333.688	870	4.477	191.056	127.285
8	LAMPUNG	1.302.424	4.464	24.078	815.432	458.540
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	237.690	3.58	5.595	149.141	82.596
10	KEPULAUAN RIAU	303.566	776	6.194	171.562	125.034
11	DKI JAKARTA	962.502	31.708	75.431	626.358	229.005
12	JAWA BARAT	7.579.359	30.962	135.169	4.681.500	2.731.737
13	JAWA TENGAH	5.631.070	12.348	88.405	4.105.404	1.424.913
14	DIKERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	503.712	682	12.627	412.029	76.378
15	JAWA TIMUR	6.002.748	18.664	193.730	4.608.374	1.181.978
16	BANTEN	1.819.306	6.296	30.384	938.057	824.565
17	BALI	577.007	1.587	13.229	357.526	204.665
18	NUSA TENGGARA BARAT	916.483	2.701	10.652	392.846	510.304
19	NUSA TENGGARA TIMUR	617.260	5.183	13.519	197.652	400.906
20	KALIMANTAN BARAT	692.392	3.188	17.251	362.218	309.735
21	KALIMANTAN TENGAH	373.112	1.877	9.926	324.090	137.219
22	KALIMANTAN SELATAN	622.888	2.282	15.381	404.795	200.436
23	KALIMANTAN TIMUR	510.257	2.734	11.086	296.242	200.199
24	KALIMANTAN UTARA	82.785	265	1.380	38.949	42.191
25	SULAWESI UTARA	314.511	2.331	17.587	206.754	87.839
26	SULAWESI TENGAH	438.432	3.529	11.552	240.192	183.159
27	SULAWESI SELATAN	1.175.135	5.245	24.551	575.276	570.065
28	SULAWESI TENGGARA	312.940	1.719	5.514	133.957	231.750
29	GORONTALO	190.394	1.584	7.121	117.016	64.673
30	SULAWESI BARAT	195.804	632	2.965	75.115	117.092
31	MAULUKU	196.741	1.413	6.119	74.626	114.383
32	MAULUKU UTARA	155.565	1.317	4.932	70.116	79.200
33	PAPUA	88.822	930	3.269	40.691	43.912
34	PAPUA BARAT	89.203	1.318	3.604	39.820	44.461
35	PAPUA SELATAN	49.968	467	1.611	23.243	24.647
36	PAPUA TENGAH	86.051	8.402	8.465	32.970	36.210
37	PAPUA PEGUNUNGAN	102.597	5.944	11.426	38.444	46.783
JUMLAH		38.657.735	183.796	877.002	23.571.725	14.025.212

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

LAMPIRAN 12 JUMLAH PUS STATUS HAMIL MENURUT KEINGINAN KEHAMILAN SAAT ITU
PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA

NO	PROVINSI	JUMLAH PUS (WANITA KAWIN)	KEINGINAN KEHAMILAN			
			STATUS HAMIL	INGIN HAMIL ITU	INGIN HAMIL NANTU/KENYADAN	TIDAK INGIN ANAK LAGI
1	ACEH	41.575		38.772	2.476	327
2	SUMATERA UTARA	62.531		55.129	5.517	1.885
3	SUMATERA BARAT	31.279		27.815	2.604	860
4	RIAU	28.899		25.891	2.278	730
5	JAMBI	20.480		18.717	1.354	409
6	SUMATERA SELATAN	37.288		34.128	2.387	773
7	BENGKULU	11.169		10.235	691	243
8	LAMPUNG	38.688		34.952	2.814	922
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7.335		6.643	501	191
10	KEPULAUAN RIAU	8.535		7.464	811	260
11	DKI JAKARTA	26.738		20.744	3.530	2.464
12	JAWA BARAT	270.714		237.002	25.446	8.266
13	JAWA TENGAH	189.534		168.497	15.585	5.442
14	DI RERIAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	15.053		13.360	1.165	528
15	JAWA TIMUR	171.500		152.787	13.544	5.169
16	BANTEN	53.600		47.406	4.987	1.207
17	BALI	13.827		12.572	914	341
18	NUSA TENGGARA BARAT	24.798		39.181	2.779	518
19	NUSA TENGGARA TIMUR	24.629		22.609	1.742	448
20	KALIMANTAN BARAT	19.625		17.838	1.400	387
21	KALIMANTAN TENGAH	9.156		8.329	642	185
22	KALIMANTAN SELATAN	19.676		17.331	1.405	340
23	KALIMANTAN TIMUR	15.091		13.108	1.520	463
24	KALIMANTAN UTARA	2.533		2.241	237	55
25	SULAWESI UTARA	7.723		6.764	657	302
26	SULAWESI TENGAH	14.982		13.400	1.247	335
27	SULAWESI SELATAN	43.246		38.354	4.001	891
28	SULAWESI TENGGARA	15.783		14.179	1.346	258
29	GORONTALO	7.584		6.785	679	130
30	SULAWESI BARAT	9.360		8.410	843	107
31	MALUKU	6.945		6.075	665	205
32	MALUKU UTARA	4.627		4.214	347	66
33	PAPUA	1.923		1.617	251	55
34	PAPUA BARAT	2.234		1.806	355	73
35	PAPUA SELATAN	1.487		1.342	95	50
36	PAPUA TENGAH	5.223		4.852	378	43
37	PAPUA PEGUNGAN	2.318		2.156	133	29
JUMLAH TOTAL		1.235.588		1.143.305	107.326	34.957

Sumber: Pendataan Keluarga dan Permutakhiran

LAMPIRAN 13 JUMLAH PUS STATUS HAMIL MENURUT EMPAT TERLAU DAN UMUR ANAK TERKECIL PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA

NO	PROVINSI	JUMLAH PUS IWANNAI KAWIN	UMUR PUS (WANITA KAWIN) HAMIL			JUMLAH PUS (WANITA KAWIN) STATUS HAMIL	YANG JARAK KELAHIRAN SEREUMNYA DENGAN KEHAMILAN < 2 TAHUN (TERLAU)	YANG JUMLAH PUS (WANITA KAWIN) STATUS HAMIL	YANG JUMLAH PUS (WANITA KAWIN) STATUS HAMIL
			< 20 (TERLAU MUDA)	20-35	> 35 (TERLAU TUAN)		YANG JUMLAH ANAK LAHIR HIDUP > 2 ANAK TERLAU BANYAK)		
1	ACEH	41.575	223	31.383	9.969	15.316	150	1.159	1.159
2	SUMATERA UTARA	62.531	583	48.244	13.704	24.163	625	3.307	3.307
3	SUMATERA BARAT	31.279	345	23.981	6.953	11.925	502	2.894	2.894
4	RIAU	28.599	262	22.066	6.571	10.330	186	1.410	1.410
5	JAMBI	20.380	494	16.069	3.917	5.893	112	774	774
6	SUMATERA SELATAN	37.288	694	28.522	8.072	11.959	156	1.134	1.134
7	BENGKULU	11.165	247	8.742	2.180	3.376	47	325	325
8	LAMPUNG	38.688	303	28.986	9.399	11.654	116	940	940
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7.335	255	5.835	1.225	2.786	67	464	464
10	KEPULAUAN RIAU	8.539	75	6.416	2.04	3.064	152	864	864
11	DKI JAKARTA	26.338	77	19.954	6.707	11.114	777	4.559	4.559
12	JAWA BARAT	270.114	3.793	207.374	60.047	86.387	1.156	9.745	9.745
13	JAWA TENGAH	189.124	1.668	189.650	38.306	45.889	743	6.508	6.508
14	DIKEMERISTIMWA YOGAKARTA	15.053	78	11.960	3.015	2.776	108	808	808
15	AWA TIMUR	171.500	2.338	134.729	34.333	35.115	655	5.174	5.174
16	BANTEN	53.600	473	40.720	12.407	17.708	330	2.274	2.274
17	BAU	17.827	200	11.371	2.256	4.081	186	1.150	1.150
18	NUSA TENGGARA BARAT	42.478	1.486	31.431	9.561	12.988	180	1.310	1.310
19	NUSA TENGGARA TIMUR	24.595	322	17.565	6.912	10.739	150	983	983
20	KALIMANTAN BARAT	19.625	434	14.769	4.422	6.946	79	585	585
21	KALIMANTAN TENGAH	9.156	314	6.838	2.014	2.932	65	364	364
22	KALIMANTAN SELATAN	19.676	376	15.194	4.106	6.108	100	584	584
23	KALIMANTAN TIMUR	15.091	229	11.499	3.333	5.966	223	1.176	1.176
24	KALIMANTAN IAKA	2.533	45	1.918	570	1.139	37	245	245
25	SULAWESI UTARA	7.723	210	5.999	1.514	2.537	66	386	386
26	SULAWESI TENGAH	14.982	533	11.397	3.052	5.582	153	852	852
27	SULAWESI SELATAN	43.246	1.275	32.192	9.779	16.137	509	2.935	2.935
28	SULAWESI TENGGARA	15.783	402	11.744	3.637	6.366	201	1.073	1.073
29	GORONTALO	7.594	244	6.035	1.315	2.380	89	457	457
30	SULAWESI BARAT	9.360	417	7.171	1.772	3.629	158	821	821
31	MAKU	6.945	104	4.949	1.894	3.052	98	506	506
32	MAKU UTARA	4.627	89	3.321	1.217	1.852	28	191	191
33	PAPUA	1.923	31	1.882	610	838	12	107	107
34	PAPUA BARAT	2.734	42	1.882	610	904	29	140	140
35	PAPUA SELATAN	1.487	15	1.014	458	682	2	23	23
36	PAPUA TENGAH	5.773	23	4.278	972	873	36	250	250
37	PAPUA PEGUNUNGAN	2.318	14	1.257	1.047	943	1	14	14
TOTAL		1.285.588	18.213	987.445	279.930	395.877	8.222	56.341	

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

LAMPIRAN 14 JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KETENTRAMAN
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

14 JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KEPENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

36	PAPUA TIMES AM	16.0 3124	221 824	181 8956
37	PAPUA REGIONAL	14.5 6412	21.5 6412	14.5 6412

LAMPIRAN 15 JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KEMANDIRIAN PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINSI	JUMLAH KELUARGA	VARIA BELUM MENCESSI KEMANDIRIAN											
			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, TEROADAP YANG SEDIKIT (SATU) ANGGOTAKELUARGAMEMIKSUMMER PENGHISIUSAN UNTUK MIMINNUHI KEBUTUHAN POKOK PADA BULAN			SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, SETIANGGOTAKELUARGAWANGSAATN POKOK, SAVU/UNJAN DAN LANTI PANTAI KELUARGA TINGGIDALAM RUMAH LAYAK HUNI			KELUARGA MEMILIKI ASET YANG UTUS, SEDIKA DI SDI SEDIKAAT YANG DIPERLUAS SEPASEFAZAT			SETIANGGOTAKELUARGA WANGSAATN BURUSUS, SEDIKA DI TAKA KADA (EMPAT) MABERTUJUTUJUH SENNGGA ANGGOTAKELUARGA, TAKAADA INFORMASI DI RI MEDIA ONLINE [INTERNET]		
TA	TODA	YIA	TA	TODA	YIA	TA	TODA	YIA	TA	TODA	YIA	TA	TODA	YIA
1	ACEH	1,199,113	2,261,111	60,522	4,015	50,015	94,956	2,343,307	22,125	50,015	110,086	1,021,435	20,436	
2	SUMATERA UTARA	3,499,010	3,201,149	26,489	3,111,179	50,015	2,119,794	1,010,916	2,051,151	81,129	1,503,621	111,140	3,109,719	20,436
3	MALAYSIA BARAT	1,223,135	1,223,135	1,223,135	1,223,135	1,223,135	1,223,135	1,223,135	1,223,135	1,223,135	1,223,135	1,223,135	1,223,135	1,223,135
4	BALI	2,224,324	1,803,171	1,803,171	1,803,171	1,803,171	1,803,171	1,803,171	1,803,171	1,803,171	1,803,171	1,803,171	1,803,171	1,803,171
5	ANAMBAS	988,118	954,320	28,189	1,195,203	1,195,203	1,195,203	1,195,203	1,195,203	1,195,203	1,195,203	1,195,203	1,195,203	1,195,203
6	SUMATERA SELATAN	2,111,039	2,114,224	76,879	2,152,508	2,152,508	2,152,508	2,152,508	2,152,508	2,152,508	2,152,508	2,152,508	2,152,508	2,152,508
7	BENGKULU	543,158	527,726	15,285	533,220	533,220	533,220	533,220	533,220	533,220	533,220	533,220	533,220	533,220
8	JAMBI	2,677,218	2,665,794	2,19,23	40,515	40,515	40,515	40,515	40,515	40,515	40,515	40,515	40,515	40,515
9	REBOLUJUAN MANGGA BELUTUNG	418,233	405,554	11,848	413,440	413,440	413,440	413,440	413,440	413,440	413,440	413,440	413,440	413,440
10	MEULABOH BESAR	468,618	465,650	11,656	465,248	465,248	465,248	465,248	465,248	465,248	465,248	465,248	465,248	465,248
11	DAMIAMARITA	2,386,822	2,267,654	20,108	2,210,617	2,210,617	2,210,617	2,210,617	2,210,617	2,210,617	2,210,617	2,210,617	2,210,617	2,210,617
12	JAWA BARAT	13,738,854	13,056,930	211,964	13,361,924	13,361,924	13,361,924	13,361,924	13,361,924	13,361,924	13,361,924	13,361,924	13,361,924	13,361,924
13	JAWA TENGAH	10,948,576	10,919,488	208,408	10,411,919	10,411,919	10,411,919	10,411,919	10,411,919	10,411,919	10,411,919	10,411,919	10,411,919	10,411,919
14	DAMRI STIMA VOGYAMATA	1,723,611	1,657,617	1,050,074	3,154,026	3,154,026	3,154,026	3,154,026	3,154,026	3,154,026	3,154,026	3,154,026	3,154,026	3,154,026
15	JAWA TIMUR	12,431,245	11,722,097	481,536	11,839,860	11,839,860	11,839,860	11,839,860	11,839,860	11,839,860	11,839,860	11,839,860	11,839,860	11,839,860
16	BANTEN	2,661,637	2,668,790	11,876	64,538	1,708,054	1,708,054	1,708,054	1,708,054	1,708,054	1,708,054	1,708,054	1,708,054	1,708,054
17	BALI	1,099,365	1,061,939	37,676	1,077,080	1,077,080	1,077,080	1,077,080	1,077,080	1,077,080	1,077,080	1,077,080	1,077,080	1,077,080
18	NEGERI TENGARAU RAYA	1,597,247	1,495,288	138,509	1,527,266	1,527,266	1,527,266	1,527,266	1,527,266	1,527,266	1,527,266	1,527,266	1,527,266	1,527,266
19	NEGERI TENGARAU MULIA	1,372,411	1,035,193	1,02,123	302,119	333,319	287,099	314,311	193,299	314,311	193,299	202,791	418,875	18,382
20	KOLOMANTAN BESAR	1,771,265	1,728,101	43,679	1,119,265	353,116	328,972	353,116	1,02,773	353,116	1,02,773	402,079	1,02,320	1,02,320
21	KOLOMANTAN TENGAH	692,921	590,159	2,746,92	2,591,114	1,12,121	2,591,114	1,12,121	1,12,121	1,12,121	1,12,121	1,12,121	1,12,121	1,12,121
22	KOLOMANTAN TENGAH	1,129,135	1,021,900	4,423	2,220,230	1,021,900	1,021,900	1,021,900	1,021,900	1,021,900	1,021,900	1,021,900	1,021,900	1,021,900
23	KOLOMANTAN TENGAH	1,460,135	1,420,135	4,654	1,460,135	1,460,135	1,460,135	1,460,135	1,460,135	1,460,135	1,460,135	1,460,135	1,460,135	1,460,135
24	GOMANTAN LIPUH BESAR	1,444,421	1,414,421	13,654	1,460,135	1,460,135	1,460,135	1,460,135	1,460,135	1,460,135	1,460,135	1,460,135	1,460,135	1,460,135
25	SULAWESI UTARA	771,750	628,279	628,279	628,279	628,279	628,279	628,279	628,279	628,279	628,279	628,279	628,279	628,279
26	SULAWESI TENGAH	2,46,956	21,91,51	2,19,51	55,645	1,29,788	9,90,168	1,04,02	2,20,311	1,05,500	1,05,500	1,05,500	1,05,500	1,05,500
27	SULAWESI SELATAN	2,46,755	21,91,266	2,19,51	55,645	1,29,788	9,90,168	1,04,02	2,20,311	1,05,500	1,05,500	1,05,500	1,05,500	1,05,500
28	SULAWESI TENGGARA	642,75	612,42	32,025	62,476	132,31	358,312	324,23	10,356	269,402	2,28,493	6,17,3	51,9,74	22,739
29	GOMONTOAO	39,27	38,166	21,106	32,691	12,651	18,784	15,58,98	24,95,00	9,32,11	12,651	44,2	50,053	20,739
30	SULAWESI BARAT	33,227	30,447	17,772	30,191	14,61,3	14,61,3	14,61,3	14,61,3	14,61,3	14,61,3	14,61,3	20,851	20,851
31	MALUKU UTARA	337,47	315,946	21,52,9	331,439	11,018,18	11,018,18	11,018,18	11,018,18	11,018,18	11,018,18	11,018,18	11,018,18	11,018,18
32	MALUKU UTARA	256,486	11,318	22,842	16,32,5	16,32,5	16,32,5	16,32,5	16,32,5	16,32,5	16,32,5	16,32,5	16,32,5	16,32,5
33	DAERAH	168,747	184,851	10,026	85,205	85,205	85,205	85,205	85,205	85,205	85,205	85,205	85,205	85,205
34	SULAWESI BARAT	152,453	11,391	15,24,54	9,9,9	20,008	9,9,9	133,159	28,34,5	60,42,7	20,008	20,008	20,008	20,008
35	DAERAH SELATAN	88,154	80,002	80,008	80,008	80,008	80,008	80,008	80,008	80,008	80,008	80,008	80,008	80,008
36	DAERAH TENGAH	160,316	99,173	61,019	52,454	38,1	56,673	50,96,7	69,88,7	20,76	38,1	10,72	64,626	20,739
37	DAERAH PUGONGNGAUN	221,925	140,730	102,105	80,432	135,178	80,77,7	14,48,6	20,730	10,72	14,48,6	10,72	64,626	20,739
	JUMLAH TOTAL	6,016,413	6,016,325	6,016,325	6,016,325	6,016,325	6,016,325	6,016,325	6,016,325	6,016,325	6,016,325	6,016,325	6,016,325	6,016,325

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

LAMPIRAN 16 JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KEBAHAGIAAN PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINSI	JUMLAH KELUARGA		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, SETIAP ANGGOTA KELUARGA MEMUKU WAKTU UNTUK BERINTERAKSI SETIAP HARI		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, PENGASUHAN ANAK DI LAKUKAN BEBERAPA ANTARA SUAMI DAN ISTRI		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, KELUARGA PERNAH BERERASI BERSAMA DI LUAR RUMAH		SELAMA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, KELUARGA HUT SERTA DALAM KEIGATAN SOSIAL/GOTONG ROYONG DI LINGKUNGAN RT/TDAK		
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	
1	ACEH	1,269,133	1,107,375	64,501	117,227	832,967	283,500	42,594	950,020	211,856	111,757	
2	SUMATERA UTARA	3,446,610	2,928,314	199,168	357,028	1,254,820	2,10,449	428,938	876,801	325,316	2,552,389	
3	SUMATERA BARAT	1,313,116	1,139,548	62,965	10,999	83,500	1,254,354	45,478	1,039,410	91,033	11,084	
4	RIAU	1,502,224	1,366,734	49,092	96,398	1,03,871	40,896	291,416	76,035	96,398	1,308,508	
5	JAMBI	983,119	870,872	36,212	76,035	66,016	24,687	688,956	218,728	76,035	104,555	
6	SUMATERA SELATAN	2,211,093	1,954,233	94,143	163,117	1,455,182	83,385	675,938	1,425,017	63,959	1,907,309	
7	BENGKULU	543,159	477,136	23,023	43,000	361,650	16,013	166,451	107,697	468,190	74,959	
8	LAMPUNG	2,267,218	2,011,456	87,329	168,433	1,509,158	68,760	689,300	1,386,437	713,348	2,012,325	
9	KEPULAUAN BANGKA	418,237	366,316	50,343	50,343	50,343	16,000	261,606	79,676	50,343	300,791	
10	KEPULAUAN RIAU	468,116	427,976	10,915	29,725	324,575	9,003	155,038	389,891	49,000	117,446	
11	DKI JAKARTA	2,266,222	1,791,940	34,424	460,058	1,154,833	34,132	1,097,857	1,392,988	29,725	336,828	
12	JAWA BARAT	13,178,554	11,774,736	526,020	1,36,098	85,351,818	561,651	4,425,385	8,276,566	4,026,190	1,561,79	
13	JAWA TENGAH	10,948,376	9,562,674	264,062	1,081,840	6,66,083	310,277	3,374,216	6,678,380	3,383,556	9,965,35	
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1,123,634	969,354	20,154	134,126	63,7298	20,345	626,701	367,807	134,126	1,015,909	
15	JAWA TIMUR	12,143,745	10,354,778	385,114	1,403,853	6,398,887	310,998	4,89,860	7,298,340	3,441,552	10,716,609	
16	BANTEN	2,961,137	2,659,965	112,229	189,443	2,031,245	81,369	648,523	2,151,478	620,116	1,881,443	
17	BALI	1,069,246	991,429	22,226	76,734	19,466	20,293	788,493	231,300	767,324	932,550	
18	NUSA TENGGARA BARAT	1,592,447	1,343,870	75,457	172,920	94,011	64,259	579,977	933,158	179,240	1,364,006	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1,127,412	911,576	111,168	67,674	70,400	80,685	342,377	633,366	67,674	1,024,847	
20	KALIMANTAN BARAT	1,171,765	1,031,012	64,997	75,756	744,744	73,529	363,492	733,374	75,756	1,012,836	
21	KALIMANTAN TENGAH	602,023	522,259	26,574	53,670	388,373	23,608	53,670	384,726	492,527	109,776	
22	KALIMANTAN SELATAN	1,108,163	952,065	40,184	115,914	666,668	36,293	405,266	405,266	917,163	191,000	
23	KALIMANTAN TIMUR	857,169	761,348	29,398	65,933	554,363	30,184	121,293	227,722	507,020	223,336	
24	KALIMANTAN UNTA	1,141,403	1,111,394	4,370	8,047	2,001	4,287	388,824	31,530	8,047	654,469	
25	SULAWESI UTARA	668,895	563,300	34,916	70,679	377,616	26,765	264,514	412,743	175,473	112,342	
26	SULAWESI TENGAH	771,795	652,136	46,556	73,103	469,834	33,527	91,441	827,092	1,212,481	73,103	
27	SULAWESI SELATAN	2,246,156	1,924,463	116,267	206,216	1,228,423	90,436	209,078	374,226	214,318	54,223	
28	SULAWESI TENGGARA	642,167	552,835	35,209	54,233	404,363	29,326	14,236	210,936	91,638	30,396	
29	GORONTALO	339,312	286,941	21,633	30,736	195,707	15,369	1,24,236	1,24,236	59,224	24,5254	
30	SULAWESI BARAT	322,204	280,685	18,469	23,050	209,589	13,391	99,224	171,556	22,598	21,059	
31	MALUKU	377,477	22,003	24,631	231,340	15,245	10,892	88,624	85,825	24,691	339,309	
32	MALUKU UTARA	256,996	219,025	18,951	18,570	269,141	12,305	66,050	167,371	70,605	18,520	
33	PAPUA	168,447	142,751	8,700	17,216	96,395	5,713	125,674	258,557	17,216	152,623	
34	PAPUA BARAT	162,465	150,446	11,807	20,110	91,988	9,161	61,314	107,399	21,110	144,926	
35	PAPUA SELATAN	88,164	74,700	6,376	7,038	51,295	4,484	32,385	57,357	2,37,19	7,088	
36	PAPUA TENGAH	160,136	87,376	44,193	45,877	57,871	26,386	76,799	57,852	28,748	103,688	
37	PAPUA PEGUNUNGAN	221,125	175,887	42,221	50,717	70,080	23,649	128,096	92,172	50,717	170,819	
	JUMLAH TOTAL	71,784,419	61,807,275	2,799,484	7,177,660	43,728,556	2,405,644	25,650,219	44,723,679	19,883,080	7,177,660	60,805,548
	Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran										30,978,871	

LAMPIRAN 17 JUMLAH KELUARGA MENURUT VARIABEL RUMAH LAYAK HUNI (1)

PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINSI	JUMLAH KELUARGA	JENIS ATAP RUMAH TERBUKA						JENIS ATAP RUMAH TUTUP						SUMBER PENINGGALAN UNTAMA															
			BETON	GENTENG	ANEKASUNG	KANJISAMP	BAMBU	RUMAH/ JUKU/ RUMAH DAKAR	JUNNA	TEMOK	KANU	BAMBU	JUNNA	MAMAN/ JUN/ TEGU	SEMIN	KANU	BAMBU	TAMAN	JUNNA	PERAK/ GRANIT/ SEMEN	GEN/ PAPAN	PLAT/ S	GEN/ Y	LSTNK	BERAMA	NON				
1	ACHEN	1,289,133	31,300	51,559	13,187	2,756	8,448	552	13,187	2,657	763,784	565,770	3,193	18,865	2,465,710	77,864	70,059	1,102	24,556	8,542	905,265	233,802	1,821	113,505	3,739					
2	SUMATERA UTARA	3,684,613	56,165	103,444	3,217,277	16,396	1,738	37,650	9,079	2,917,260	944,130	30,720	57,718	1,560,166	1,657,789	397,547	1,816	43,517	11,098	2,562,567	578,443	14,129	244,553	43,165						
3	SUMATERA BARAT	1,313,115	11,407	23,131	1,271,081	2,113,2	1,25	3,311	1,689	1,669,781	273,311	21,108	4,288	1,621,112	488,779	725,501	1,878	5,303	1,000,940	18,453	8,464	136,789	10,953							
4	AKSARA	1,302,215	20,035	32,155	1,41,375	9,273	4,275	7,755	1,289	1,621,112	488,779	5,303	4,288	1,621,112	488,779	725,501	1,878	5,303	1,000,940	18,453	8,464	136,789	10,953							
5	AKSARA	100,325	100,325	100,325	100,325	100,325	100,325	100,325	100,325	100,325	100,325	100,325	100,325	100,325	100,325	100,325	100,325	100,325	100,325	100,325	100,325	100,325	100,325	100,325						
6	SUMATERA SELATAN	2,211,093	41,246	1,233,320	893,501	11,935	41,1	5,447	5,018	1,845,753	683,138	3,261	18,543	2,018,653	1,854	24,128	1,438,085	341,185	31,852	2,23,545	17,093	1,000,940	18,453	8,464	136,789	10,953				
7	BENGKULU	243,155	57,478	25,602	51,018	7,872	68	161	246	1,492,753	162,030	2,102	11,727	279,089	279,089	60,932	1,867	382,028	10,457	2,501	2,02,000	4,113	1,000,940	18,453	8,464	136,789	10,953			
8	LAMBIANG	2,267,213	13,007	2,012,018	23,481	2,228	741	883	476	1,813,403	271,483	2,923	998,42	1,191,554	39,783	1,617	6,064	9,441	1,629,487	277,312	10,387	36,637	12,693	1,000,940	18,453	8,464	136,789	10,953		
9	KEPULAUAN RIAU/ BULINTANG	413,237	6,333	25,117	38,375	3,76	27	4,422	377	370,914	66,130	47	11,18	279,177	117,765	4,512	28	3,34	427	277,312	111,601	1,574	24,538	1,211	1,000,940	18,453	8,464	136,789	10,953	
10	KEPULAUAN RIAU	466,618	14,624	40,279	1,103	45	1,600	3,692	301	73,197	3,210	3,210	2,816	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210					
11	DEP. AKRAKA	2,286,827	138,572	722,908	141,269	3,358	1,872	1,486	2,049	2,146,534	2,146,534	43,187	65,1	38,853	65,1	38,853	65,1	38,853	65,1	38,853	65,1	38,853	65,1	38,853	65,1	38,853	65,1			
12	JAMBI BARAT	11,783	85,1	11,792,777	9,872	9,453	3,448	2,471	12,485	12,221	5,321	40,741	3,921	3,921	3,921	3,921	3,921	3,921	3,921	3,921	3,921	3,921	3,921	3,921	3,921					
13	JAMBI SELATAN	12,112	12,112	12,112	12,112	12,112	12,112	12,112	12,112	12,112	12,112	12,112	12,112	12,112	12,112	12,112	12,112	12,112	12,112	12,112	12,112	12,112	12,112	12,112						
14	JAMBI TIMUR	12,148,744	11,688,719	48,838	3,154	1,898	11,96	6,943	2,67,985	63,57	3,003	1,93,222	79,154	10,222	18,407	9,838	1,93,222	79,154	10,222	18,407	9,838	1,93,222	79,154	10,222	18,407	9,838				
15	JAMBI TAMBIR	2,265,633	33,155	2,012,044	48,838	3,154	1,898	11,96	6,943	2,67,985	63,57	3,003	1,93,222	79,154	10,222	18,407	9,838	1,93,222	79,154	10,222	18,407	9,838	1,93,222	79,154	10,222	18,407	9,838			
16	MAN. BAUTIN	1,699,863	1,699,863	91,270	1,699,863	1,699,863	1,699,863	1,699,863	1,699,863	1,699,863	1,699,863	1,699,863	1,699,863	1,699,863	1,699,863	1,699,863	1,699,863	1,699,863	1,699,863	1,699,863	1,699,863	1,699,863	1,699,863	1,699,863						
17	BAUL	2,093,247	28,015	84,041	69,570	5,211	5,926	2,778	1,709	1,694,056	19,959	4,099	2,070	11,117	931,442	1,629	15,658	6,934	2,070	11,117	931,442	1,629	15,658	6,934	2,070	11,117	931,442	1,629		
18	NIKUS/ TENGKARU MARAT	1,692,247	4,075,876	4,276,276	5,211	3,173	2,331	3,178	69,021	65,331	165,917	20,349	22,675	231,059	57,975	97,177	117,765	4,512	3,34	427	277,312	111,601	1,574	24,538	1,211	1,000,940	18,453	8,464	136,789	10,953
19	NIKUS/ TENGKARU MARAT	1,171,793	9,952	10,197,471	10,197,471	14,184	14,625	1,471	4,111,520	4,111,520	1,709	1,471	1,471	1,471	1,471	1,471	1,471	1,471	1,471	1,471	1,471	1,471	1,471	1,471	1,471					
20	KO. MANTAPAN/ BAKAT	1,160,611	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981					
21	KO. MANTAPAN/ BAKAT	1,160,611	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981					
22	KO. MANTAPAN/ BAKAT	1,160,611	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981					
23	KO. MANTAPAN/ BAKAT	1,160,611	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981					
24	KO. MANTAPAN/ BAKAT	1,160,611	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981					
25	SALAKAN/ UDARA	1,699,853	1,699,853	8,820	63,820	2,747,86	3,272	3,104	5,955	505,754	141,741	4,653	16,631	2,02,726	3,15,111	37,517	92,170	4,096	16,631	4,653	505,754	141,741	4,653	16,631	2,02,726	3,15,111				
26	SALAKAN/ UDARA	77,113	77,113	27,272	27,272	27,272	27,272	27,272	27,272	27,272	27,272	27,272	27,272	27,272	27,272	27,272	27,272	27,272	27,272	27,272	27,272	27,272	27,272	27,272	27,272					
27	SALAKAN/ TENGKARA	2,265,958	2,238,677	2,139,810	888	15,458	4,307	1,54,844	867,710	18,096	2,265,205	873,277	54,635	878,576	5,475	13,338	1,882,000	4,09,570	5,475	13,338	1,882,000	4,09,570	2,214,447	187,785	20,765	1,000,940	18,453	8,464	136,789	10,953
28	SALAKAN/ TENGKARA	620,767	6,635	61,096	2,139,810	3,917	9,51	3,139	898	28,165	45,328	5,475	13,338	27,778	27,778	1,882,000	4,09,570	5,475	13,338	1,882,000	4,09,570	2,214,447	187,785	20,765	1,000,940	18,453	8,464	136,789	10,953	
29	KO. GOMBEWA	339,372	3,122	3,122	32,204	3,917	9,51	3,139	7,722	8,52	5,475	13,338	27,778	27,778	1,882,000	4,09,570	5,475	13,338	1,882,000	4,09,570	2,214,447	187,785	20,765	1,000,940	18,453	8,464	136,789	10,953		
30	KO. GOMBEWA	339,372	3,122	3,122	32,204	3,917	9,51	3,139	7,722	8,52	5,475	13,338	27,778	27,778	1,882,000	4,09,570	5,475	13,338	1,882,000	4,09,570	2,214,447	187,785	20,765	1,000,940	18,453	8,464	136,789	10,953		
31	KO. GOMBEWA	339,372	3,122	3,122	32,204	3,917	9,51	3,139	7,722	8,52	5,475	13,338	27,778	27,778	1,882,000	4,09,570	5,475	13,338	1,882,000	4,09,570	2,214,447	187,785	20,765	1,000,940	18,453	8,464	136,789	10,953		
32	MALINTU/ UTTARAK	256,493	5,321	24,170	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205					
33	MALINTU/ UTTARAK	168,741	2,653	15,319	24,170	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205					
34	SEPAU/ BAKAT	162,465	2,653	15,319	24,170	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205					
35	SEPAU/ BAKAT	88,154	11,158	89,096	2,621,21	70	2,232	2,232	1,785	90,410	23,122	4,09,570	2,214,447	187,785	3,173	25,693	63,8	1,205	4,09,570	2,214,447	187,785	2,214,447	187,785	1,205	4,09,570	2,214,447	187,785	1,205	4,09,570	2,214,447
36	SEPAU/ TENGKARA	180,154	3,161	89,096	20,913	31,016	30,606	18,072	7,006	20,909	32,71	3,173	25,693	63,8	1,205	4,09,570	2,214,447	187,785	3,173	25,693	63,8	1,205	4,09,570	2,214,447	187,785	3,173	25,693	63,8		
37	SEPAU/ TENGKARA	210,000	43,112	89,096	20,913	31,016	30,606	18,072	7,006	20,909	32,71	3,173	25,693	63,8	1,205	4,09,570	2,214,447	187,785	3,173	25,693	63,8	1,205	4,09,570	2,214,447	187,785	3,173	25,693	63,8		
	JUMLAH TOTAL	71,094,431	12,131	634	3,207	11,655	27,272	9,665	1,205	11,728	17,311	30,733	10,3																	

**LAMPIRAN 18 JUMLAH KELUARGA MENURUT VARIABEL RUMAH LAYAK HUNI (2)
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN**

Jumlah Penduduk Keluarga dan Pemutakhiran

LAMPIRAN 19 JUMLAH KELUARGA YANG TERPAPAR PESAN/INFORMASI PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINSI	JUMLAH KELUARGA MINURUT KETERADAVAN / MEMPERQUREN/NEUDENGAR/ MELHATI/SESAU/INFORMASI				YA	TIDAK	KORAN/MAGAZIN/ TABLOID	TELEVISI/RADIO / VIDEOTRON	FACEBOOK/INSTAGRAM/ TWITTER/WHATSAPP/YOUTUBE/BLOG/WEBSITE	SEMINAR/PENGARAHAN/MASSA AT WORKSHOP/DISMASA KEGAMIAN/KONSENTRASI	LEAFLET/LEAFLET BAUK/ POSTER/STANDUP/BANNER	WANANG/TABUNY/PRINTAS / UMBUL/UMBUL/NDK	SUMBER MEDIA		
1	ACI EH	977.680	311.453	2.210.10	745.199	495.953	156.657	104.177	20.065							
2	SUMATERA UTARA	2.647.201	841.409	518.09	2.333.825	1.103.106	345.599	238.296	7.742							
3	SUMATERA BARAT	1.042.887	270.229	173.778	871.376	523.226	132.079	108.277	3.285							
4	RIAU	1.159.461	342.763	177.666	918.377	652.625	194.755	106.898	4.331							
5	IAWAH	775.719	207.400	101.756	621.037	395.115	162.380	78.563	3.353							
6	SUMATERA SELATAN	1.794.953	416.140	275.249	1.441.404	893.149	268.295	186.289	4.334							
7	BENGKULU	437.233	105.434	83.761	366.483	210.314	60.198	43.955	1.397							
8	LAMPUNG	1.713.344	533.874	1.784.98	1.356.286	692.268	233.564	97.575	3.915							
9	KERUJUAN BANTEN BEUITUNG	322.954	99.223	64.871	195.857	108.857	43.714	48.396	1.177							
10	KERUJUAN RIAU	379.613	89.003	80.137	275.743	257.500	58.951	34.000	1.308							
11	DONGKARTA	1.913.907	311.215	1.154.95	1.844.186	421.662	12.802	17.744	2.607							
12	JAYA BARAT	11.084.858	2.653.996	991.143	9.952.942	4.773.568	1.285.264	698.549	24.466							
13	JAYA TENGGAL	9.029.813	1.975.763	1.935.49	7.103.794	3.508.102	1.547.769	1.547.484	68.205							
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	279.583	1.850.071	721.090	356.110	278.044	141.504	17.137								
15	JAYA TIMUR	9.425.749	2.717.996	1.095.94	8.048.508	3.932.146	1.374.476	901.722	47.936							
16	JAYA TEN	2.455.205	596.182	2.950.62	1.962.003	1.095.722	278.461	162.277	4.722							
17	BAU	888.160	211.209	150.337	738.662	449.875	91.118	74.006	18.489							
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.094.319	497.928	897.286	533.585	533.585	133.404	4.000	4.000							
19	NUSA TENGGARA TIMUR	794.027	333.385	1.858.86	540.904	293.179	229.404	176.863	2.642							
20	KALIMANTAN BARAT	845.658	265.107	30.957	668.014	405.315	10.941	105.343	3.855							
21	KALIMANTAN TENGAH	429.172	173.331	43.599	287.744	228.205	68.039	73.300	1.288							
22	KALIMANTAN SELATAN	400.024	309.109	77.448	635.226	360.611	102.085	93.056	1.173							
23	KALIMANTAN TIMUR	659.746	217.523	853.13	469.610	396.289	99.080	69.270	1.807							
24	KALIMANTAN UTARA	101.917	32.489	135.11	64.071	65.071	19.698	12.779	2.665							
25	SUAWEI SULTAN	519.149	149.746	87.044	420.379	251.975	70.822	37.188	9.902							
26	SUAWEI TENGAH	543.405	228.390	42.779	423.676	233.676	74.906	1.023								
27	SUAWEI SELATAN	1.813.628	431.328	2.010.88	1.694.801	886.668	398.634	388.075	218.386	2.775						
28	SUAWEI TENGGARA	482.655	162.122	43.554	370.752	213.191	84.491	72.443	9.18							
29	GORONTALO	262.559	62.613	222.974	144.348	21.805	674									
30	SUAWEI BARAT	237.059	85.056	21.690	173.659	134.548	50.386	32.056	6.64							
31	MALUKU	262.548	94.926	36.10	189.048	130.55	53.662	44.093	3.04							
32	MALUKU UTARA	191.026	65.470	23.39	134.373	90.346	35.635	36.085	2.21							
33	PAPUA	129.811	38.936	92.002	50.914	30.933	35.118	1.270								
34	PAPUA BARAT	118.760	41.703	13.446	69.607	30.829	20.350	20.350	4.603							
35	PAPUA UTARA	75.177	10.29	46.965	20.965	12.197	15.713	7.786								
36	DAMPU ENGAH	81.590	78.746	16.68	38.415	28.192	28.192	28.192	1.223							
37	DAMPU PUGUNGAN	59.421	162.401	3.915	21.478	7.930	28.284	19.048	2.18							
	JUMLAH TOTAL	56.338.896	15.484.523	6.653.391	46.226.351	24.472.541	8.212.398	5.317.085	240.392							

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

LAMPIRAN 20 JUMLAH KELUARGA YANG TERPAPAR PESAN/INFORMASI PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI PETUGAS PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINSI	PETUGAS										
		YA	TIDAK	PEJABAT	PENGAWAS KELUARGA	GURU/DOSEN	TOHOKU	DOKTER	BIDAN/PERAWAT	KELUARGA	KADUR/IMP.	
1	AECH	1,061,801	279,332	94,141	299,506	9,932	17,779	53,297	38,588	107,799	213,346	
2	SUMATERA UTARA	2,067,556	276,955	365,130	1,711,411	65,130	87,193	50,249	133,077	220,946	617,946	
3	SUMATERA BARAT	1,067,672	276,444	18,399	684,764	21,113	292,254	142,073	110,266	198,538	8,754	
4	RIAU	1,161,037	341,187	156,439	645,760	26,125	45,591	165,909	119,196	38,360	53,462	
5	JAMBI	1,199,376	319,998	91,528	594,686	17,492	36,390	104,611	62,813	305,917	515,104	
6	SUMATERA SELATAN	3,867,617	2,460	1,19,424	291,133	64,292	199,731	116,971	164,211	189,173	2,174	
7	BENGKULU	4,499,355	57,123	299,506	9,932	17,779	53,297	133,077	220,946	107,799	2,159	
8	LAMPUNG	1,796,883	468,235	161,449	1,110,645	20,346	68,729	221,903	91,217	79,688	1,044	
9	KEPUALAAN BANGKA BELITUNG	3,23,557	214,345	31,440	6,686	16	45,237	32,551	167,073	127,207	2,044	
10	KEPUALAAN RIAU	105,675	165,675	57,615	166,365	11,746	17,516	67,186	65,302	72,316	2,955	
11	DIREKTORAT JENDERAL	1,709,316	47,925	1,201,395	9,932	30,575	117,059	141,326	178,837	97,036	0	
12	DAERAH BALI	11,006,339	2,772,515	968,023	5,986,427	143,927	105,072	505,216	1,448,446	1,057,110	2,361,216	
13	DAERAH TENGAH	5,988,390	1,859,846	789,427	4,277,530	483,857	1,681,597	611,786	4,141,161	2,468,779	5,12,186	
14	DAERAH TIMUR VIVA YOGAKARTA	8,90,123	2,53,311	108,531	350,092	25,805	54,509	134,946	1,28,897	4,653,492	30,321	
15	JAWA TIMUR	5,687,315	6,745,254	5,745,254	1,37,046	16,592	40,519	1,77,974	1,381,812	4,33,963	4,894,777	
16	BANTEN	2,866,229	575,114	19,141	1,111,020	22,220	77,006	239,935	78,406	492,912	10,205	
17	BALI	959,879	11,910	944,526	16,109	15,152	11,910	35,285	110,522	118,139	2,254	
18	NUISA TEGARAKA SUMAT	1,24,407	3,77,940	13,953	710,851	54,446	54,193	161,829	101,912	100,135	4,02,114	
19	NUISA TEGARAKA THOUR	19,82,221	286,991	12,455	444,947	28,594	47	128,605	94,417	85,772	1,28,776	
20	DAERAH BALI	855,139	3,96,829	11,423	953,287	12,185	40,956	123,039	123,039	128,535	3,305	
21	DAERAH SULTAN HAMID	642,166	805,139	10,188	307,120	11,207	12,207	12,207	12,207	12,207	0	
22	DAERAH SULTAN ENGAH	8,41,122	2,85,313	91,045	535,304	12,353	13,329	35,724	35,724	13,329	0	
23	DAERAH SULTAN UNGAH	6,61,176	2,0,122	2,0,122	61,032	11,032	11,032	20,380	20,380	11,032	0	
24	SULAWESI UTARA	169,911	11,544	10,009	60,009	11,036	11,036	4,603	4,603	10,009	7,252	
25	SULAWESI UTARA	520,271	1,18,274	18,346	366,200	8,532	21,989	48,389	155,178	147,789	1,12,118	
26	SULAWESI TENGAH	186,518	77,576	415,801	5,946	17,389	55,546	42,592	169,614	138,811	1,08,634	
27	SULAWESI SELATAN	1,86,018	238,450	1,659,165	32,513	23,140	169,725	23,140	23,140	20,904	2,49,293	
28	SULAWESI TENGGARA	513,723	62,032	392,671	6,241	10,385	41,592	36,484	194,026	88,942	1,29,936	
29	GORONTALO	289,231	51,261	201,444	3,315	4,566	13,023	13,793	80,767	85,578	1,35,755	
30	SULAWESI BARAT	59,227	269,377	30,632	194,665	5,507	12,664	34,601	23,719	52,369	4,031	
31	MALUKU	226,632	81,025	47,168	18,785	5,924	12,627	26,658	27,345	151,959	40,256	
32	MALUKU UTARA	205,301	50,995	23,341	158,773	2,355	14,243	16,131	14,243	87,252	0	
33	PAPUA BARAT	135,110	18,237	41,598	86,760	10,802	14,927	19,319	22,619	30,705	85	
34	PAPUA SELATAN	64,973	14,744	14,744	79,150	1,770	14,207	11,782	22,411	27,103	415	
35	PAPUA BARIS	66,724	21,440	8,514	42,911	2,578	4,858	8,151	10,537	15,604	10,3	
36	PAPUA TENGAH	88,188	22,148	16,138	49,561	2,582	10,724	12,819	12,819	32,885	34,871	
37	PAPUA BARIS	90,528	31,131	18,197	53,138	3,227	5,586	8,604	8,604	32,412	12,358	
	JUMLAH TOTAL	5,726,559	14,537,660	5,520,668	3,3,412,570	819,409	2,845,801	7,717,208	4,176,668	23,791,436	26,614,318	208,416

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

**Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Direktorat Pelaporan dan Statistik
2024**